



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 07 Juli 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

PETRUS KASIHAW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 07 Juli 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 12



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19770103 200909 1 001

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024



RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah

DISUSUN TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	I-8
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN.....	I-12
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-14
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD.....	I-15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-17
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-126
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD	II-145
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-177
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-177
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-178
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020.....	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023	III-11
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-12
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-12
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-21
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pertama	IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kedua	IV-3
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketiga	IV-3

4.1.4. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keempat	IV-5
4.1.5. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kelima	IV-5
4.1.6. Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keenam	IV-6
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023.....	IV-7
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-7
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat	IV-11
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni	IV-12
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Distrik, 2020.....	II-3
Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Distrik 2016-2020.....	II-4
Tabel 2.3. Nama dan Ketinggian Gunung Menurut Distrik, 2017.....	II-6
Tabel 2.4. Nama dan Panjang Sungai Menurut Distrik, 2017.....	II-8
Tabel 2.5. Suhu di Kabupaten Teluk Bintuni, 2020	II-9
Tabel 2.6. Tekanan Udara dan Kelembaban Udara (persen) di Kabupaten Teluk Bintuni, 2020..	II-10
Tabel 2.7. Kecepatan Angin, Penyinaran, dan Curah Hujan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2020...	II-11
Tabel 2.8. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Distrik, 2020.....	II-13
Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020	II-19
Tabel 2.10. Kontribusi PDRB AHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020.....	II-21
Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016-2020.....	II-24
Tabel 2.12. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020	II-25
Tabel 2.13. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020.....	II-26
Tabel 2.14. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2020	II-28
Tabel 2.15. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf di Kabupaten Teluk Bintuni, 2019-2020.....	II-29
Tabel 2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni 2019-2020.....	II-31
Tabel 2.17. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2017.....	II-32
Tabel 2.18. Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Atau Lebih Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup dan Meninggal di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017.....	II-34
Tabel 2.19. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Teluk Bintuni, 2013-2017.....	II-35
Tabel 2.20. Perkembangan IPM Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2017.....	II-36
Tabel 2.21. Komponen IPM Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat, 2014.....	II-36
Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja, 2017.....	II-39

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2015,2017.....	II-42
Tabel 2.24. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Usaha Utama (persen), 2015.....	II-43
Tabel 2.25. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2015.....	II-44
Tabel 2.26. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama (jiwa), 2015	II-46
Tabel 2.27. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015.....	II-50
Tabel 2.28. Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Tingkat Pendidikan, 2011-2015	II-51
Tabel 2.29. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan, 2017.....	II-52
Tabel 2.30. Rasio Murid-Sekolah dan Murid-Guru di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-53
Tabel 2.31. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Distrik, 2017.....	II-54
Tabel 2.32. Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2012-2017.....	II-55
Tabel 2.33. Jumlah Peserta Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2017	II-57
Tabel 2.34. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2009-2015.	II-59
Tabel 2.35. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015	II-60
Tabel 2.36. Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2017.....	II-63
Tabel 2.37. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2011-2017.....	II-65
Tabel 2.38. Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan, 2012-2014.....	II-66
Tabel 2.39. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air untuk Minum, 2014.....	II-68
Tabel 2.40. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset, 2014.....	II-69
Tabel 2.41. Jumlah dan Penumpang Kapal di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015.....	II-73
Tabel 2.42. Jumlah dan Penumpang Pesawat di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015.....	II-74
Tabel 2.43. Banyaknya Surat Nikah Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-77
Tabel 2.44. Banyaknya Akte Kelahiran Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017	II-78
Tabel 2.45. Banyaknya Kartu Keluarga Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017	II-79
Tabel 2.46. Banyaknya Kartu Tanda Penduduk Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017	II-80
Tabel 2.47. Perkembangan PPKBD dan Klinik KB di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015.....	II-82
Tabel 2.48. Perkembangan Jumlah Akseptor Aktif di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015.....	II-83
Tabel 2.49. Jumlah Akseptor Aktif Menurut Pemakaian Kontrasepsi, 2015.....	II-84

Tabel 2.52. Jumlah Akseptor Baru Menurut Distrik dan Alat Kontrasepsi, 2015.....	II-85
Tabel 2.53. Jumlah PUS dan Akseptor Aktif Menurut Distrik, 2015.....	II-86
Tabel 2.54. Banyaknya Penyandang Masalah Sosial Menurut Jenis dan Distrik, 2015.....	II-88
Tabel 2.55. Persentase Penduduk Menurut Jenis Agama, 2015.....	II-89
Tabel 2.56. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015	II-91
Tabel 2.57. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-91
Tabel 2.58. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015	II-92
Tabel 2.59. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-93
Tabel 2.60. Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015..	II-93
Tabel 2.61. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-94
Tabel 2.62. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis, 2015.....	II-95
Tabel 2.63. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi di Sektor Industri Kecil Menurut Jenis, 2012	II-95
Tabel 2.64. Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-95
Tabel 2.65. Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015.....	II-97
Tabel 2.66. Banyaknya Surat Yang Dikirim dan Diterima, 2013-2015.....	II-97
Tabel 2.67. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-99
Tabel 2.68. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-99
Tabel 2.69. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-100
Tabel 2.70. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-101
Tabel 2.71. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-101
Tabel 2.72. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-101
Tabel 2.73. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-102
Tabel 2.74. Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Talas di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015	II-103
Tabel 2.75. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayuran di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-103
Tabel 2.76. Luas Panen dan Produksi Sayuran Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni,	

2015	II-104
Tabel 2.77. Perkembangan Produksi Buah-buahan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015.....	II-104
Tabel 2.78. Produksi Buah-buahan Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015.....	II-105
Tabel 2.79. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-105
Tabel 2.80. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-106
Tabel 2.81. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-107
Tabel 2.82. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015	II-107
Tabel 2.83. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015.....	II-108
Tabel 2.84. Populasi Ternak Menurut Distrik dan Jenis, 2015.....	II-108
Tabel 2.85. Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015....	II-109
Tabel 2.86. Populasi Ternak Unggas Menurut Distrik dan Jenis, 2015.....	II-110
Tabel 2.87. Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015	II-111
Tabel 2.88. Perkembangan Produksi Kayu di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015.....	II-112
Tabel 2.89. Jumlah Pembangkit Listrik di Kabupaten Teluk Bintuni (KVA), 2015.....	II-112
Tabel 2.90 Jumlah Jaringan Listrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-113
Tabel 2.91. Perkembangan Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2013-2015	II-118
Tabel 2.92. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2014	II-121
Tabel 2.93. Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan, 2011-2014.....	II-123
Tabel 2.94. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010-2014	II-124
Tabel 2.95. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2014.....	II-126
Tabel 2.96. Jumlah Barang, Bagasi, dan Pos Paket yang Dibongkar dan Dimuat, 2011-2014.....	II-128
Tabel 2.97. Jumlah Pelanggan Listrik, Daya Terpasang dan Energi Terjual, 2015.....	II-130
Tabel 2.98. Jumlah KK, KK Berlistrik, KK Belum berlistrik, dan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015	II-131
Tabel 2.99. Angka Kriminalitas di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2014.....	II-132
Tabel 2.100. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015.....	II-134
Tabel 2.101. Jumlah ASN di Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Tingkat Pendidikan, 2015.....	II-135
Tabel 2.102. Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015....	II-137

Tabel 2.103. Capaian Misi / Tujuan Strategis.....	II-138
Tabel 2.104. Capaian Per Sasaran Tahun 2016.....	II-139
Tabel 3.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022-2026 (Rp.Juta)	III-14
Tabel 3.2. Perhitungan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2022-2026 (Rp.Juta).....	III-19
Tabel 3.3. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2016-2021.....	III-16
Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016-2020.....	III-30
Tabel 3.5 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016-2020.....	III-34
Tabel 5.1. Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022.....	V-2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026	IV-2
Tabel 6.2 Penetapan Kinerja Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022.....	VI-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-11
--	------

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Teluk Bintuni, 2016.....	II-2
Gambar 2.2.	Persentase Wilayah Menurut Kondisi Topografi, 2016.....	II-5
Gambar 2.3	Persentase Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan.....	II-6
Gambar 2.4.	Peta Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman di Kabupaten Teluk Bintuni.....	II-20
Gambar 2.5.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015	II-22
Gambar 2.6.	Piramida Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, 2015.....	II-24
Gambar 2.7.	Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB AHK Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2014	II-26
Gambar 2.8.	Struktur Perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni, 2014 (persen).....	II-29
Gambar 2.9.	Perkembangan Persentase Angka Melek dan Buta Huruf di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015	II-36
Gambar 2.10.	Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014.....	II-44
Gambar 2.11.	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2015.....	II-47
Gambar 2.12.	Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2015	II-48
Gambar 2.13.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Keluhan (persen), 2015	II-65
Gambar 2.14.	Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Teluk Bintuni (persen), 2015	II-66
Gambar 2.15.	Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2014.....	II-68
Gambar 2.16.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2014.....	II-70
Gambar 2.17.	Persentase Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2014	II-115
Gambar 2.18.	Peta Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan di WPP RI.....	II-117
Gambar 2.19.	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, 2011-2014	II-120
Gambar 2.20.	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, 2011-2014.....	II-121
Gambar 2.21.	Perkembangan Jaringan Jalan dan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2014	II-125
Gambar 2.22.	Persentase Jumlah Kunjungan Kapal Menurut Jenis Pelayaran di Kabupaten Teluk Bintuni, 2014	II-127

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD dimaksudkan sebagai upaya untuk mensinergikan perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah sehingga terwujud efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung sasaran pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Proses perencanaan pembangunan dilaksanakan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, ruang lingkup perencanaan dikelompokkan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahun. Kinerja pemerintah daerah (kabupaten) secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing OPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara Substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

3. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Organisasi Perangkat Daerah; dan

4. Secara Faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Penyusunan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024. Hal-hal lain yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan

antar wilayah serta penjangkauan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang dilakukan secara partisipatif mulai dari Kampung hingga Kabupaten.

Substansi penting yang termuat dalam RKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024 antara lain terdiri atas gambaran dari rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun serta kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi covid-19 di daerah. RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP 2024, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- c) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat

diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teknokratis yaitu pendekatan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program.
- c. Pendekatan Politis; Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek perencanaan hal-hal yang bersifat politik strategis dirumuskan dalam bentuk dokumen

- perencanaan baku sebagai pedoman bersama dalam perencanaan pembangunan dari waktu ke waktu, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024; b) Keterlibatan aktif DPRD dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD dan pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan langsung pada Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyepakati rumusan rancangan RKPD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.
- d. Pendekatan *Top Down*; Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat *mandatory* dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Papua Barat, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Teluk Bintuni; c) Konsisten dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *sustainable development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
- e. Pendekatan *Bottom Up*; Pendekatan ini mengakomodasi secara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur

kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui komunikasi masyarakat sekaligus untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kabupaten Teluk Bintuni; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah; c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* menjadi pengarusutamaan dalam proses penyusunan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Penyusunan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 mengacu pada agenda pembangunan tahunan pada tahun 2024 yang merupakan perencanaan tahun pertama pemerintahan Tahun 2021-2026

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Bupati Teluk Bintuni tentang Perubahan RKPD 2019 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019, Rancangan

Kebijakan Umum Anggaran-Perubahan (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031.
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2024.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN

RKPD adalah penjabaran dari RPJMD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RKP tahun 2024, (2) RPJPD/RPJMD Provinsi Papua Barat, (3) RPJPD/RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni, (4) Renstra SKPD, dan (6) Renja SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut di bawah ini:

beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2024:

- a) Menjabarkan arahan umum RPJMD dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024;
- b) Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan masukan-masukan dari masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya;
- c) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- d) Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan;
- e) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 adalah sebagai:

- a) Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2024;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024;
- c) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- d) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- e) Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

- 1.4. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM EKONOMI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
Dalam sub bab ini diuraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Diuraikan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Membahas kondisi ekonomi daerah tahun sebelumnya dan tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2024.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Membahas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Membahas tujuan dan sasaran pada Misi Pertama sampai dengan Misi Keenam Bupati Teluk Bintuni Periode Tahun 2016-2021.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Membahas dan menyampaikan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat serta prioritas pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi kalimat daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Teluk Bintuni pada RKPD Tahun 2024.

BAB VII PENUTUP

Berisi kaidah-kaidah implementasi dan kalimat penutup dalam konteks penyusunan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah otonom dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Teluk Bintuni terletak di bagian tengah Provinsi Papua Barat dengan ibukota kabupaten berada di Distrik Bintuni. Secara geografis, Kabupaten Teluk Bintuni terletak di antara 1°57'00" - 3° 11'26" Lintang Selatan dan 132°44'59" - 134°14'49" Bujur Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas wilayah administrasi 20.840,83 km² dan luas wilayah 18.637 km² atau setara 20% persen dari luas Provinsi Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni terletak di daerah kepala burung Pulau Papua, merupakan salah satu kabupaten yang terdapat dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Papua Barat. Secara geografis Kabupaten Teluk Bintuni memiliki batas-batas sebagai berikut:

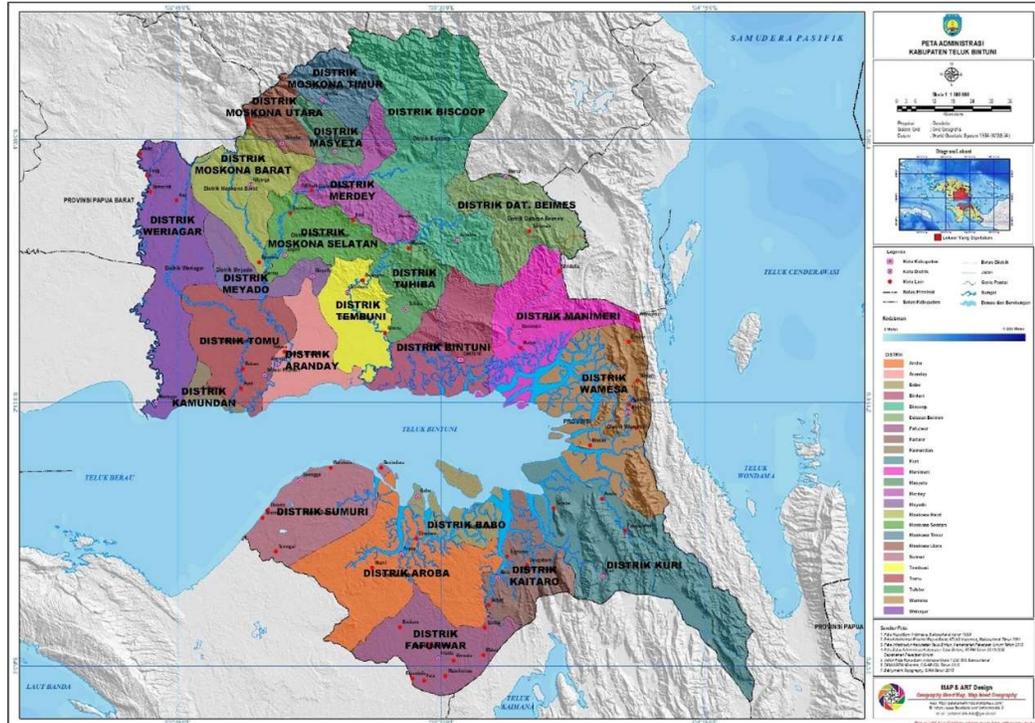
Sebelah utara : Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Pegunungan Arfak;

Sebelah selatan : Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Fak-Fak;

Sebelah timur : Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan

Sebelah barat : Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Teluk Bintuni



Sumber: RTRW Kabupaten Teluk Bintuni

Pada awalnya, jumlah distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 10 distrik berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik. Sejalan dengan adanya perkembangan waktu dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, jumlah distrik di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 24 distrik. Berdasarkan data terbaru di tahun 2021, dari 24 distrik tersebut terdiri atas 262 kampung, 2 diantaranya berupa kelurahan, 115 kampung definitif dan 145 kampung persiapan. Dua puluh empat distrik tersebut yaitu: Distrik Farfuwar, Babo, Sumuri, Aroba, Kaitaro, Kuri, Idoor/Wamesa, Bintuni, Manimeri, Tuhiba, Dataran Beimes, Tembuni, Aranday, Tomu, Komundan, Weriagar, Moskona Selatan, Meyado, Moskona Barat, Merdey, Biscoop, Masyeta, Moskona Utara, dan Moskona Timur (Gambar 2.1).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Distrik, 2021

No	Distrik	Ibu kota	Luas wilayah (Km ²)	%
1	Fafurwar	Fruata	1.171,00	6,28
2	Babo	Irarutu III	687,43	3,69
3	Sumuri	Tofoi	1.922,00	10,31
4	Aroba	Aroba	859,29	4,61
5	Kaitaro	Sara	859,29	4,61
6	Kuri	Sarbe	1.611,00	8,64
7	Wamesa	Idoor	816,00	4,38
8	Bintuni	Bintuni Barat	421,75	2,26
9	Manimeri	Bumi Saniari	316,32	1,70
10	Tuhiba	Tuhiba	263,60	1,41
11	Dataran Beimes	Homa	316,32	1,70
12	Tembuni	Tembuni	1.326,00	7,11
13	Aranday	Aranday	572,01	3,07
14	Kamundan	Kalitami I	572,00	3,07
15	Tomu	Sebyar Rejosari	572,00	3,07
16	Weriagar	Weriagar	715,00	3,84
17	Moskona Selatan	Jagiro	929,62	4,99
18	Meyado	Meyado	743,69	3,99
19	Moskona Barat	Meyerga	743,69	3,99
20	Merdey	Merdey	789,44	4,24
21	Biscoop	Jahabra	789,44	4,24
22	Masyeta	Masyeta	451,11	2,42
23	Moskona Utara	Moyeba	679,43	3,65
24	Moskona Timur	Mesna	509,57	2,73
	Teluk Bintuni		18.637,00	100,00

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2023

Luas wilayah masing-masing distrik cukup bervariasi tetapi secara rata-rata berkisar antara 400 Km² sampai dengan 900 Km² kecuali tiga distrik yang memiliki luas wilayah di atas 1.000 Km² yaitu distrik Sumuri, distrik Kuri, distrik

Tembuni, serta distrik Fafurwar. Wilayah terluas dimiliki oleh Distrik Sumuri dengan luas 1.922 km² atau setara 10,31% dari luas total Kabupaten Teluk Bintuni, sementara luas terkecil adalah distrik Tuhiba 263,60 km² atau setara 1,41% dari luas Kabupaten Teluk Bintuni.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), tidak ada perubahan signifikan jumlah desa atau kampung. Jumlah kampung hanya bertambah 1 (satu) desa tepatnya terjadi di distrik Dataran Beimes dari 6 desa menjadi 7 desa di tahun 2021. Distrik dengan jumlah kampung terbanyak adalah distrik Bintuni dan distrik Merdey masing-masing memiliki 25 desa. Sedangkan distrik yang memiliki jumlah kampung/kelurahan terkecil adalah Distrik Kamundan yaitu sebanyak 5 kampung/kelurahan. Rincian jumlah kampung per distrik lima tahun terakhir di Kabupaten Teluk Bintuni ditampilkan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Distrik 2017-2021

No	Distrik	2018	2019	2020	2021	2022
1	Fafurwar	7	7	7	7	7
2	Babo	6	6	6	6	6
3	Sumuri	8	8	8	8	8
4	Aroba	7	7	7	7	7
5	Kaitaro	7	7	7	7	7
6	Kuri	7	7	7	7	7
7	Wamesa	6	6	6	6	6
8	Bintuni	25	25	25	25	25
9	Manimeri	14	14	14	14	14
10	Tuhiba	14	14	14	14	14
11	Dataran Beimes	7	6	6	7	6
12	Tembuni	10	10	10	10	10
13	Aranday	8	8	8	8	8
14	Kamundan	5	5	5	5	5
15	Tomu	11	11	11	11	11
16	Weriagar	6	6	6	6	6
17	Moskona Selatan	15	15	15	15	15
18	Meyado	9	9	9	9	9
19	Moskona Barat	14	14	14	14	14

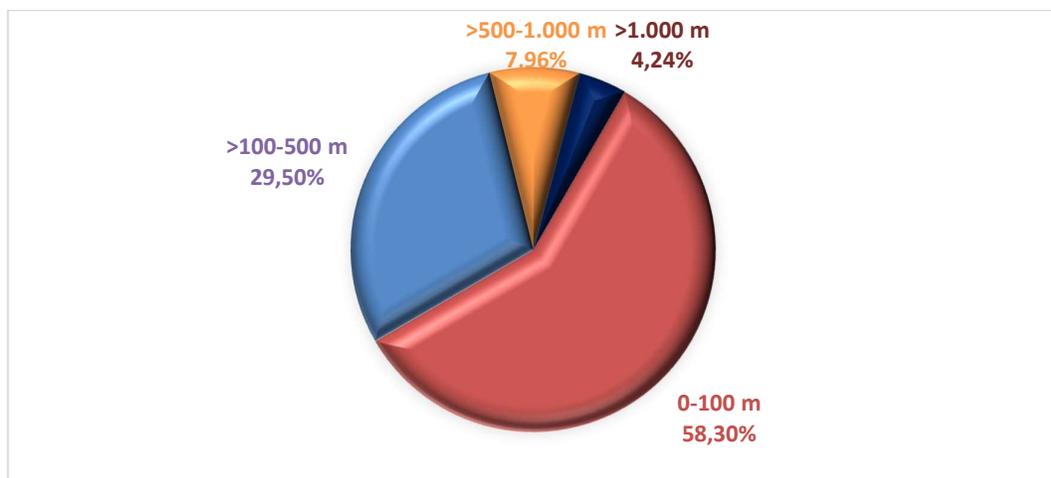
No	Distrik	2018	2019	2020	2021	2022
20	Merdey	25	25	25	25	25
21	Biscoop	14	14	14	14	14
22	Masyeta	15	15	15	15	15
23	Moskona Utara	10	10	10	10	10
24	Moskona Timur	12	12	12	12	12
	Teluk Bintuni	262	261	261	261	261

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2023

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam wilayah dataran rendah (kelas ketinggian 0-100 m) dengan luas mencapai 1.175.826,69 ha (58,30 persen). Luas wilayah yang termasuk dalam daerah perbukitan adalah seluas 755.540,20 ha yang terdiri atas wilayah dengan ketinggian >100-500 m seluas 594.939,07 ha (29,50 persen) dan kelas ketinggian >500-1.000 m seluas 160.601,13 ha (8 persen), sedangkan wilayah yang termasuk dalam daerah pegunungan >1.000 m adalah seluas 85.481,14 ha (4,20 persen).

Gambar 2.2 Persentase Wilayah Menurut Kondisi Topografi, 2021



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022 (diolah)

Topografi Kabupaten Teluk Bintuni terdiri atas: pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Pesisir pantai dan dataran rendah Kabupaten Teluk Bintuni didominasi rawa-rawa yang ditumbuhi hutan mangrove dan pohon-pohon sagu. Kawasan dataran rendah dengan kemiringan lahan relatif datar sampai landai terdapat di wilayah pesisir teluk dan kawasan sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Kawasan dataran rendah juga terdapat di sebelah selatan Distrik Babo sampai dengan Distrik Farfuwar yang berbatasan dengan Kabupaten Fakfak. Ketinggian permukaan lahan di Kabupaten Teluk Bintuni berkisar antara 0 meter sampai lebih dari 2925 meter di atas permukaan laut (mdpl). Dataran tinggi terletak di Distrik Merdey dengan keberadaan Gunung Faumai (1.476 mdpl) dan Gunung Ubukai (1.130 mdpl). Dataran tinggi yang lain terdapat di Distrik Bintuni karena adanya Gunung Sigimerai (1.760 mdpl) dan Distrik Babo dengan adanya Gunung Wayura (495 mdpl).

Tabel 2.3 Nama dan Ketinggian Gunung Menurut Distrik, 2017

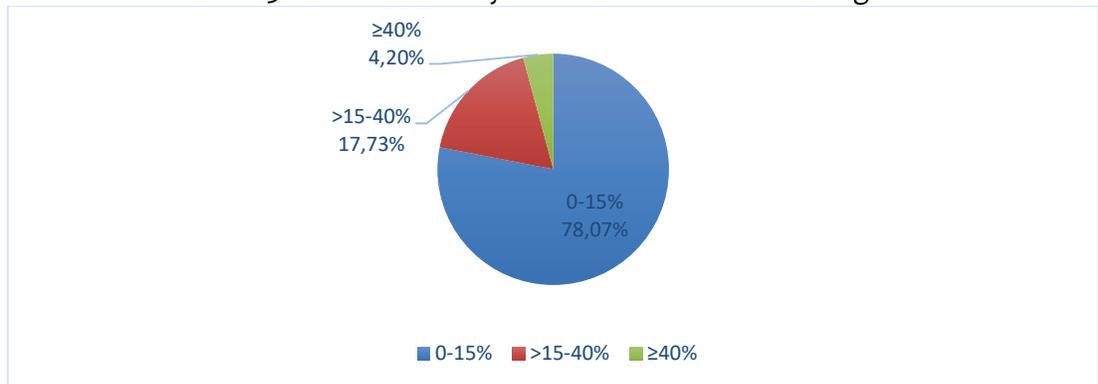
No.	Distrik	Nama Gunung	Ketinggian (m)
1.	Merdey	Faumai	1.476
2.	Merdey	Ubukai	1.130
3.	Bintuni	Sigimerei	1.760
4.	Babo	Wayura	495

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Ditinjau dari segi kelerengan, sebagian besar wilayah Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kelas lereng 0-15 persen. Kondisi tersebut merupakan kondisi pendukung utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian khususnya untuk tanaman pangan. Luas wilayah dengan kondisi kelerengan 0-15 persen adalah seluas 1.574.552,80 ha (78,07 persen). Wilayah yang memiliki kondisi

kelerengan >15-40 persen adalah seluas 357.536,95 ha (17,73persen), sedangkan wilayah dengan kondisi kelerengan \geq 40 persen seluas 84.758,28 ha (4,20 persen).

Gambar 2.3 Persentase Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 (diolah)

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Struktur geologi Kabupaten Teluk Bintuni didominasi oleh jenis batuan (litologi) sedimen tersier dan kuarter. Sedimen tersier yang terdiri dari batu pasir, batu lumpur mikaan, batu lanau, batu napal, batu gamping dan konglomerat, dijumpai di bagian utara dan selatan Kabupaten Teluk Bintuni. Sedimen kuarter berupa kerikil, pasir lumpur dan gambut dapat dijumpai di bagian tengah pada Distrik Aranday dan Distrik Bintuni. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi bahan galian golongan C dan golongan A. Adanya batuan sedimen ini banyak terdapat di Distrik Aranday, Tembuni, Bintuni, Babo, Farfurwar yaitu yang termasuk golongan geologi lingkungan tipe 1 dan 2. Adanya batuan gamping juga berpotensi untuk bahan galian golongan C yang terdapat di Distrik Idoor dan Kuri.

Jenis tanah di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri dari jenis tanah organosol di daerah mangrove, alluvium di meander sungai dan daerah tangkapan hujan, gleisol di daerah yang letaknya rendah dan banyak terdapat sumber air, kambiosol dan padosolik di daerah perbukitan, serta jenis tanah renzina dan mediteran di daerah yang berbukit dan berbatu dasar kapur. Isi tanah di Kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya memiliki kapasitas tukar kation dari sedang hingga tinggi sehingga memiliki kapasitas cukup tinggi dalam mengikat zat hara. Kesuburan tanah cenderung mengalami kejenuhan Al dan pH yang rendah dan memiliki kandungan bahan organik sedang serta kandungan nitrogen dengan kisaran antara 0,23 persen hingga 1,12 persen. Kandungan fosfor relatif rendah berkisar dari 7,96 hingga 10,26 mg/liter serta kandungan kalium berkisar sedang hingga tinggi.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki banyak sungai yang terdiri dari sungai-sungai kecil dan besar. Sungai-sungai besar tersebut merupakan induk dari beberapa sungai kecil. Kapasitas air di sungai-sungai besar di Kabupaten Teluk Bintuni relatif terjaga sehingga tidak mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Secara umum, apabila ditinjau dari kondisi fisik, sungai yang terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni masih menunjukkan kondisi fisik air sungai yang alami. Kondisi ini sangat ditunjang dengan adanya vegetasi yang tumbuh di sepanjang aliran sungai sebagai daerah tangkapan air hujan. Beberapa daerah aliran sungai (DAS) utama di Kabupaten Teluk Bintuni, di antaranya adalah: DAS Naramasa, DAS Korol Bomberai, DAS Muturi, DAS Remu. Selain itu, juga terdapat Sub-Sub DAS antara lain: Sub DAS Kasuri, Sub DAS Sebyar, Sub DAS Bomberai, Sub DAS Weriagar, Sub Das Kamundan, Sub DAS Wasian, Sub DAS Muturi, Sub DAS Naramasa dan Sub DAS Wagura. DAS tersebut dilalui parit-parit kecil limpasan yang berhubungan dengan sungai utama yang semuanya dapat dianggap bersifat ephermal karena pada musim kemarau yang ekstrim parit-parit ini kering. Beberapa nama sungai besar di Kabupaten Teluk Bintuni ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Nama dan Panjang Sungai Menurut Distrik, 2022

No.	Distrik	Nama Sungai	Panjang
1.	Bintuni	Muturi	140,00
2.	Aranday	Sebyar	150,00
3.	Tembuni	Tembuni	110,00
4.	Babo	Kaitero	53,00
5.	Babo	Kasuri	63,00

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki 2 danau besar, yaitu Danau Tenemot seluas 97,5 Hh dan Danau Makiri seluas 75 ha yang keduanya terletak di Distrik Aranday. Selain itu, Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki rawa-rawa yang ditumbuhi hutan mangrove. Kawasan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni tersebar lebih kurang 450.000 ha yang merupakan kawasan mangrove terluas di Indonesia. Sebaran hutan mangrove terdapat pada hampir pada semua kawasan pesisir pantai dan sungai di Distrik Bintuni, Babo, Sumuri, Aranday, Kuri, dan Wamesa, sedangkan hutan sagu terdapat di Distrik Aranday, Kamundan, Weriagar dan Kawasan Wamesa-Kuri.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Iklm tropis lembab dan panas merupakan kondisi iklim yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Pada tahun 2020, suhu udara rerata tertinggi terjadi pada bulan Januari- Februari yaitu masing-masing sebesar 27,3-27,2°C, sedangkan suhu udara rerata terendah terjadi pada bulan November-Desember yaitu sebesar 26,6°C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 34,0°C, sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 22,0°C.

Tabel 2.5 Suhu di Kabupaten Teluk Bintuni, 2022

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rerata
Januari	22,2	26,6	32,8
Februari	21,7	26,4	32,6
Maret	22,5	26,7	32,4

Bulan	Suhu Minimum	Suhu Maksimum	Suhu Rerata
April	22,4	27	32,8
Mei	22,4	26,9	32,8
Juni	22,5	26,7	32,5
Juli	20,4	26,3	32
Agustus	21,5	26,2	32,4
September	22,3	26,5	32,2
Oktober	22	27,1	33,6
November	21,4	27	32,8
Desember	22	26,7	32

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Pada umumnya tekanan udara di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kecenderungan menurun dan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Juli dan terendah terjadi pada bulan Januari. Kondisi tekanan udara di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2022 dapat dikatakan relatif stabil. Tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 1009,1 mbps, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 1006,5 mbps. Kelembaban udara di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kecenderungan stabil dan pada umumnya kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Juni. Namun pada tahun 2022, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Desember yaitu sebesar 86 persen dan kelembaban terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 83 persen.

Tabel 2.6 Tekanan Udara dan Kelembaban Udara (persen) di Kabupaten Teluk Bintuni, 2022

Bulan	Tekanan Udara (mbps)	Kelembaban Udara (persen)
Januari	1007,5	88
Februari	1007,3	87
Maret	1007,7	87
April	1007,1	86
Mei	1008,3	87

Bulan	Tekanan Udara (mbps)	Kelembaban Udara (persen)
Juni	1008,2	82
Juli	1007,9	88
Agustus	1008,4	86
September	1009,1	84
Oktober	1008,3	83
November	1008,1	86
Desember	1006,5	87

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Kecepatan angin di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2022 cenderung fluktuatif. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 21,2 knot dan kecepatan terendah terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 14,2 knot. Sementara itu, dari sisi penyinaran matahari, durasi tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 88 persen, sedangkan durasi terendah terjadi pada bulan Januari yang hanya sebesar 43 persen. Pada tahun 2020, curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 676 mm³, sedangkan curah hujan bulanan terendah terjadi pada bulan November yang hanya sebesar 32,4 mm³. Jika dilihat dari jumlah hari hujan, frekuensi tertinggi juga terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 27 hari dan hari hujan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 9 hari.

Tabel 2.7 Kecepatan Angin, Penyinaran, dan Curah Hujan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2022

Bulan	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran (persen)	Curah Hujan (mm ³)
Januari	19,40	43,00	167,20
Februari	20,80	44,00	459,90
Maret	21,20	53,00	293,60
April	16,60	58,00	676,00
Mei	14,20	66,00	226,50
Juni	14,80	58,00	176,20
Juli	15,20	69,00	58,50

Bulan	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran (persen)	Curah Hujan (mm3)
Agustus	19,60	76,00	68,30
September	14,40	84,00	63,80
Oktober	15,00	88,00	89,00
November	15,80	55,00	32,40
Desember	20,00	44,00	537,60

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

2.1.1.6. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selama periode 2020-2022 laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,92 persen. Hal ini mengindikasikan angka fertilitas dan migrasi masuk di Kabupaten Teluk Bintuni lebih tinggi dibanding angka mortalitas dan migrasi keluarnya.

Berdasarkan data BPS Teluk Bintuni, jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022 tercatat sebanyak 92.236 jiwa, atau mengalami lonjakan yang cukup signifikan bila dibandingkan jumlahnya di tahun 2016 yang masih sebesar 60.400

jiwa. Sejalan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, laju pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terakhir (2020-2022) tercatat tumbuh positif sebesar 2,92%.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Distrik Tahun 2019-2022

No.	Distrik	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	
1.	Farfurwar	1.096	1.357	1.375	1.400	1,57
2.	Babo	4.008	3.873	3.925	3.994	1,55
3.	Sumuri	7.872	16.999	17.334	17.754	2,20
4.	Aroba	2.999	2.496	2.516	2.547	1,02
5.	Kaitaro	795	1.143	1.149	1.160	0,74
6.	Kuri	995	1.170	1.176	1.187	0,72
7.	Wamesa	1.204	1514	1.531	1.556	1,38
8.	Bintuni	24.742	32.590	33.888	35.393	4,21
9.	Manimeri	6.001	9.191	9.567	10.002	4,32
10.	Tuhiba	746	1.221	1.263	1.313	3,70
11.	Dataran Beimes	391	684	698	716	2,31
12.	Tembuni	929	1.006	1.018	1.035	1,43
13.	Aranday	1.087	1.512	1.542	1.580	2,22
14.	Kamundan	2.660	1.109	1.115	1.125	0,72
15.	Tomu	722	3.350	3.402	3.471	1,79
16.	Weriagar	1.445	1625	1.633	1.649	0,74
17.	Moskona Selatan	557	778	784	794	1,02
18.	Meyado	1.129	1.405	1.422	1.445	1,41
19.	Moskona Barat	399	454	458	463	0,99
20.	Merdey	573	952	957	966	0,73
21.	Biscoop	519	712	716	722	0,70
22.	Masyeta	387	524	527	532	0,76
23.	Moskona Utara	781	648	650	654	0,46
24.	Moskona Timur	1.054	770	772	778	0,52
Teluk Bintuni		60.400	63.091	89.418	92.236	2,92

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan penduduk berbeda-beda antar distrik. Selama tiga

tahun terakhir (2020-2022), distrik yang mengalami laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah distrik Manimeri, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,32%, selanjutnya distrik Bintuni 4,21% dan distrik Tuhiba 3,70%. Adapun distrik dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah distrik Moskona Utara, dimana laju pertumbuhan penduduknya tercatat hanya 0,46%, selanjutnya distrik Moskona Timur 0,52%. Kecepatan laju pertumbuhan penduduk antar distrik yang cukup timpang menunjukkan masih adanya distribusi penduduk yang belum merata antar distrik.

Distribusi dan kepadatan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk antar distrik yang timpang berdampak pada distribusi penduduk antar distrik yang juga mengalami ketimpangan dari tahun ke tahun. Distribusi penduduk hingga tahun 2022 masih terpusat di tiga distrik, yaitu distrik Bintuni (38,37% dari total penduduk Teluk Bintuni), distrik Sumuri (19,25%) dan distrik Manimeri (10,84%). Adapun distrik-distrik lainnya hanya memiliki jumlah penduduk antara 1-2 persen dari total penduduk Teluk Bintuni.

Tabel 1. 2 Distribusi Penduduk Menurut Distrik Tahun 2020-2022 (persen)

No.	Distrik	2020	2021	2022
1.	Farfurwar	1,56	1,54	1,52
2.	Babo	4,45	4,39	4,33
3.	Sumuri	19,52	19,39	19,25
4.	Aroba	2,87	2,81	2,76
5.	Kaitaro	1,31	1,28	1,26
6.	Kuri	1,34	1,32	1,29
7.	Wamesa	1,74	1,71	1,69
8.	Bintuni	37,42	37,90	38,37
9.	Manimeri	10,55	10,70	10,84
10	Tuhiba	1,40	1,41	1,42
11.	Dataran Beimes	0,79	0,78	0,78
12.	Tembuni	1,16	1,14	1,12
13.	Aranday	1,74	1,72	1,71
14.	Kamundan	1,27	1,25	1,22

No.	Distrik	2020	2021	2022
15.	Tomu	3,85	3,80	3,76
16.	Weriagar	1,87	1,83	1,79
17.	Moskona Selatan	0,89	0,88	0,86
18.	Meyado	1,61	1,59	1,57
19.	Moskona Barat	0,52	0,51	0,50
20.	Merdey	1,09	1,07	1,05
21.	Biscoop	0,82	0,80	0,78
22.	Masyeta	0,60	0,59	0,58
23.	Moskona Utara	0,74	0,73	0,71
24.	Moskona Timur	0,88	0,86	0,84
	Teluk Bintuni	100	100	100

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2023

Distribusi penduduk yang timpang diatas, menyebabkan kepadatan penduduk di masing-masing distrik yang timpang pula. Sehingga distrik yang mengalami kepadatan penduduk paling tinggi secara berturut-turut adalah distrik Bintuni (80,35 per KM²), distrik Manimeri (30,24), serta distrik Sumuri (9,02). Distrik Sumuri meskipun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, namun karena total luas wilayahnya juga besar sehingga kepadatan penduduknya tidak begitu besar. Kepadatan penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagai indikasi meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di distrik Bintuni, yang berarti adanya lonjakan jumlah penduduk yang cukup tinggi di distrik ini.

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Per KM² Menurut Distrik Tahun 2020-2022

No.	Distrik	2020	2021	2022
1.	Farfurwar	1,16	1,17	1,20
2.	Babo	5,63	5,71	5,81
3.	Sumuri	8,84	9,02	9,24
4.	Aroba	2,90	2,93	2,96
5.	Kaitaro	1,33	1,34	1,35
6.	Kuri	0,73	0,73	0,74

No.	Distrik	2020	2021	2022
7.	Wamesa	1,86	1,88	1,91
8.	Bintuni	77,27	80,35	83,92
9.	Manimeri	29,06	30,24	31,62
10.	Tuhiba	4,63	4,79	4,98
11.	Dataran Beimes	2,16	2,21	2,26
12.	Tembuni	0,76	0,77	0,78
13.	Aranday	2,64	2,70	2,76
14.	Kamundan	1,94	1,95	1,97
15.	Tomu	5,86	5,95	6,07
16.	Weriagar	2,27	2,28	2,31
17.	Moskona Selatan	0,84	0,84	0,85
18.	Meyado	1,89	1,91	1,94
19.	Moskona Barat	0,61	0,62	0,62
20.	Merdey	1,21	1,21	1,22
21.	Biscoop	0,90	0,91	0,91
22.	Masyeta	1,16	1,17	1,18
23.	Moskona Utara	0,95	0,96	0,96
24.	Moskona Timur	1,51	1,52	1,53
	Teluk Bintuni	4,67	4,80	4,95

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data-data di atas, isu strategis utama berkaitan dengan persoalan penduduk adalah sebaran penduduk yang tidak merata antar distrik yang berlangsung dari tahun ke tahun. Distribusi penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar distrik dan juga pembangunan kabupaten Teluk Bintuni secara umum. Ketimpangan distribusi penduduk akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Rasio Jenis kelamin penduduk

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai rasio jenis kelamin pada tahun 2022 yaitu sebesar 138,85 yang dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 138 sampai 139 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah laki-laki lebih banyak 38 sampai 39 jiwa daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1. 4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Teluk Bintuni menurut Distrik Tahun 2022

No.	Distrik	2022
1.	Farfurwar	105,88
2.	Babo	119,21
3.	Sumuri	335,04
4.	Aroba	121,48
5.	Kaitaro	107,51
6.	Kuri	115,04
7.	Wamesa	115,51
8.	Bintuni	118,65
9.	Manimeri	117,81
10.	Tuhiba	111,09
11.	Dataran Beimes	97,25
12.	Tembuni	104,55
13.	Aranday	102,30
14.	Kamundan	102,34
15.	Tomu	113,34
16.	Weriagar	109,00
17.	Moskona Selatan	105,17
18.	Meyado	126,84
19.	Moskona Barat	99,55
20.	Merdey	97,55
21.	Biscoop	109,28
22.	Masyeta	107,81
23.	Moskona Utara	123,21

No.	Distrik	2022
24.	Moskona Timur	100,52
	Teluk Bintuni	138,85

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2023

Sebagian besar distrik di Bintuni memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibanding penduduk perempuan, kecuali distrik Merdey dan Moskona Barat, keduanya memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Teluk Bintuni pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan setelah pulih pasca pandemi Covid-19 dua tahun berturut-turut sebelumnya. Nilai PDRB Teluk Bintuni atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 mencapai 25,56 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,05 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,02 persen, menandakan telah berlangsungnya pemulihan ekonomi setelah tahun 2021 sebelumnya tumbuh minus 2,30 akibat pandemi Covid-19 yang melanda. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar

11,24 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 14 mengalami pertumbuhan yang positif dan 3 sisanya bernilai negatif.

Empat belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: lapangan usaha Listrik dan Gas sebesar 8,70 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 4,65 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,57 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,56 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,68 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,87 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,55 persen.

Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018—2022

Lapangan Usaha/ Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	4,53	3,14	-4,89	1,28	-4,04
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	2,80	-1,48	2,18	-2,88	0,87
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,48	-1,32	1,32	-2,82	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	7,35	8,88	9,55	18,72	8,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	2,48	4,25	2,62	3,55	0,68
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	15,10	210,90	-4,36	2,90	-4,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	8,47	6,64	3,83	2,12	8,56
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	5,49	5,27	-22,06	-9,68	11,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	5,40	6,89	-12,37	3,87	8,20
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	7,68	9,85	7,68	5,52	4,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	1,94	9,03	31,18	-4,86	-2,40
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	8,25	7,97	-0,17	3,73	4,19
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	5,49	4,90	-3,16	1,03	3,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	6,12	4,82	-0,46	0,11	8,74
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,70	5,95	-5,51	1,44	5,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,55	5,87	9,53	13,43	5,57
R,S, T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	5,18	4,88	-0,51	12,96	3,10
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,25	3,41	1,06	-2,30	2,02

*Angka sementara / *Preliminary figures***Angka sangat sementara / *Very preliminary figures*

Sumber: PDRB Kab. Teluk Bintuni, 2023

2.1.2.2. Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

PDRB kabupaten Teluk Bintuni lima tahun terakhir (2018-2022) didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Kedua lapangan usaha tersebut menyumbang mencapai 86,37 persen dari total PDRB Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022. Lapangan usaha lainnya seperti pertanian, dan konstruksi rata-rata hanya menyumbang 3% dari total PDRB kabupaten Teluk Bintuni. Kontribusi atau share lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB kabupaten Teluk Bintuni rata-rata per tahun mencapai 50% selama lima tahun terakhir, sementara lapangan usaha pertambangan dan penggalian rata-rata berkontribusi 38,52% per tahun. Ketidakmerataan distribusi PDRB kabupaten Teluk Bintuni sampai saat ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah ke depan untuk menumbuhkan dan mengembangkannya yang diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.10 Kontribusi PDRB AHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Teluk Bintuni, 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	3,14	3,10	3,13	3,19	2,81	
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	38,57	36,17	36,68	36,57	35,81	
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	52,04	48,88	48,33	48,20	50,56	
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	2,75	8,33	8,13	8,32	7,16	
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	0,43	0,45	0,48	0,49	0,50	
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	0,19	0,20	0,15	0,13	0,13	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	0,15	0,15	0,20	0,20	0,18	
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	2,15	2,14	2,29	2,28	2,25	
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,07	0,07	0,08	0,10	0,09	
R,S, T,U Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

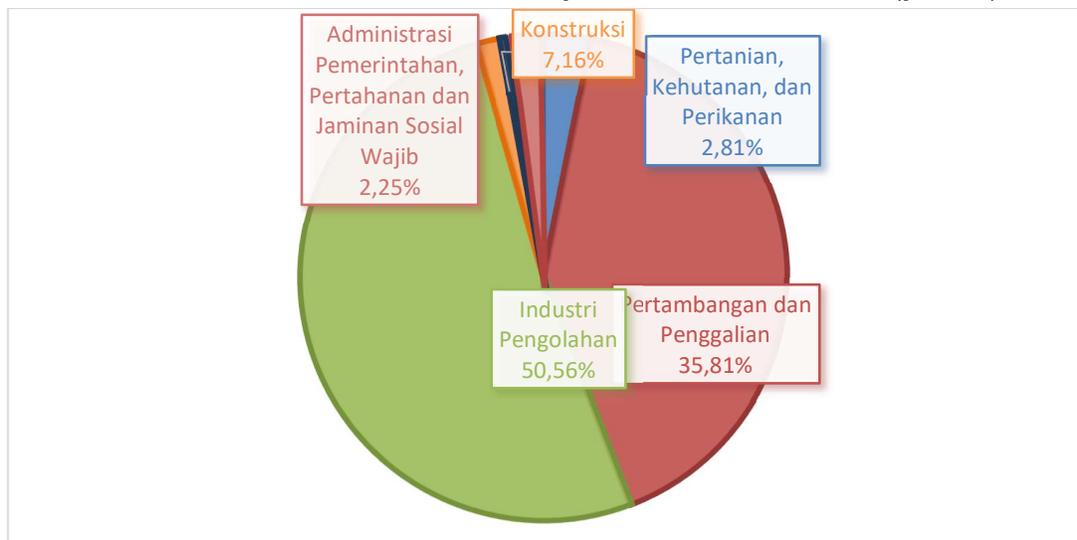
*Angka sementara / Preliminary figures

**Anaka sanaat sementara / Very preliminary figures

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2021

Selama periode 2018-2022, sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni mengalami perubahan cukup signifikan, terutama pergeseran struktur ekonomi yang semula didominasi sektor industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian, sejak empat tahun terakhir (2019-2022) sektor konstruksi dan sektor pemerintahan telah menunjukkan peningkatan kontribusi cukup signifikan. Sektor konstruksi dan sektor pemerintahan di tahun 2022 masing-masing memberikan kontribusi 7,16 persen dan 2,25 persen, atau meningkat tajam bila dibanding kontribusi mereka di tahun 2016 yang masih sebesar 2,02 persen dan 2,10 persen.

Gambar 2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni, 2022 (persen)



Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2023 (diolah)

2.1.2.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kabupaten Teluk Bintuni sehingga pengukuran inflasi Kabupaten Teluk Bintuni mengacu pada

perkembangan inflasi daerah terdekat yang diukur angka inflasinya yaitu Kabupaten Manokwari. Gambaran inflasi Kabupaten Manokwari inilah yang kemudian diasumsikan dapat mewakili inflasi di Kabupaten Teluk Bintuni karena karakteristik wilayah kedua daerah tersebut memiliki persamaan dan berbatasan langsung. Inflasi di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat.

Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah berhasil menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang rendah dalam dua tahun terakhir. Ke depan, besaran inflasi diperkirakan mengalami tren yang semakin rendah. Sasaran inflasi yang telah disepakati BI dan pemerintah pada 2018 dan 2019 sebesar 3,5% plus minus 1%. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 sasaran inflasi berada di level 3% plus minus 1%. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai inflasi 3,5% plus minus 1% dan di 2020-2021 akan mencapai inflasi 3% plus minus 1%. Pemerintah dan BI memperkuat koordinasi dalam hal penentuan besaran dan timing kebijakan energi, pengendalian second round effect dan penguatan kebijakan pangan untuk menekan inflasi volatile food di kisaran 4-5%. Pembangunan di berbagai daerah berdampak positif terhadap penurunan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya menurunkan tingkat inflasi. Prospek inflasi yang rendah juga dipengaruhi oleh koordinasi erat antara BI dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi bahan pangan. Ekspektasi inflasi juga terjaga seiring dengan stabilitas nilai tukar rupiah yang terkendali. BI melihat keseluruhan prospek perekonomian Indonesia tetap positif. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi membaik dengan ketahanan eksternal yang terjaga dan nilai tukar rupiah terkendali. Optimisme BI ini juga ditopang oleh kepercayaan investor yang semakin membaik.

Secara umum, laju Inflasi di Teluk Bintuni tergolong moderat karena tidak melampaui diatas 10 persen. Pemerintah setempat telah terbukti mampu mengendalikan laju inflasi sehingga terhindarkan dari guncangan ekonomi lokal walaupun dinamika tantangannya cukup berat. Inflasi yang tak terkendali atau hyperinflasi, mampu diantisipasi dengan baik. Mengingat, jika terjadi hyperinflasi berpotensi menyebabkan gangguan pada stabilitas ekonomi di mana para pelaku

ekonomi enggan untuk melakukan aktifitas dalam perekonomian serta menurunnya daya beli masyarakat secara umum akibat harga-harga yang naik.

2.1.2.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita 2018-2022

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB/ at current price	28 998,66	31 332,44	31 006,05	31 380,55	34 935,20
- ADHK/ at 2010 Constant Price	24 542,83	25 380,15	25 648,78	25 058,62	25 564,58
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta rupiah/Million rupiahs)					
- ADHB/ at current price	459,63	482,42	357,98	351,02	378,76
- ADHK/ at 2010 Constant Price	389,01	390,77	296,13	280,28	277,16
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	3,08	0,45	-24,22	-5,35	-1,11
Jumlah Penduduk (orang)/ Population (People)	63 091	64 949	86 614	89 418	92 236
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	2,1	2,94	33,36	3,24	3,15

*Angka Sementara / Preliminary figures

**Angka Sangat Sementara / Very preliminary figures

Sumber: BPS. PDRB Kab. Teluk Bintuni, 2023

Nilai PDRB per kapita Teluk Bintuni atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita

tercatat sebesar 459,63 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 482,42 juta rupiah. Sejak guncangan ekonomi yang melanda dunia dan ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, dunia usaha mengalami tekanan cukup berat hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi dan mengakibatkan PDRDB per kapita Teluk Bintuni di tahun 2020 dan 2021 turun berturut-turut menjadi 357,98 juta rupiah dan 351,02 juta rupiah. Baru mulai 2022 PDRB per kapita mulai meningkat lagi menjadi 378,76 juta rupiah.

2.1.2.5. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan (Bank Dunia)

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain adalah rasio gini. Rasio Gini merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* >0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,4–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) *Gini Ratio* <0,4 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

Tabel 2.12 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020

Tahun	Indeks Gini
2016	0,32
2017	0,31
2018	0,39
2019	0,36
2020	0,39

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, beberapa tahun terbitan.

Selama periode 2016-2020, rasio Gini Kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, rasio Gini Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 0,32, kemudian meningkat selama 2 tahun menjadi sebesar 0,39 pada tahun 2018, kemudian rasio Gini mengalami penurunan menjadi sebesar 0,36 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020, rasio Gini mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 0,39. Angka rasio Gini sebesar 0,39 tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Teluk Bintuni masuk kategori ketidakmerataan rendah.

2.1.2.6. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Dari data BPS Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan angka kemiskinan memiliki kecenderungan yang terus menurun selama lima tahun terakhir. Hal tersebut seiring dengan beragam program pembangunan daerah yang secara berkesinambungan terus digulirkan oleh pemerintah daerah. Di bulan September 2018 tingkat kemiskinan masih pada level 31,30 persen, kemudian tahun 2019 turun pada angka 30,57 persen, dan sampai dengan September tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni telah berhasil diturunkan pada angka 29,39 persen. Namun persentase penduduk miskin yang terus menurun tersebut, di tahun 2022

Tabel 2.13 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2022

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	549 390	20,43	34,17
2016	549 169	20,97	34,72
2017	583 323	21,09	34,32
2018	587 770	19,64	31,30
2019	664 838	19,59	30,57
2020	683 667	19,22	29,39
2021	693 305	20,07	29,39
2022	716 834	20,45	29,73

Sumber: Teluk Bintuni dalam Angka, 2023

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Perlu diingat, walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni, namun angka tersebut masih tergolong sangat tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di tingkat nasional yang berada pada kisaran 10-11 persen. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni akan mengalami peningkatan lagi jika banyak penduduk Kabupaten Teluk Bintuni

masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni masih cukup tinggi misalnya bila dibandingkan dengan Kabupaten Kaimana, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, yang merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin yang terendah di Provinsi Papua Barat, dengan persentase penduduk miskin di bawah 20 persen. Secara umum, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 22,18 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2015-2022 terus mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang artinya semakin mendekati keluar dari kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode tahun 2015-2022 Indeks

keparahan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni telah menunjukkan tren penurunan. Penurunan indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni semakin berkurang.

Tabel 2.14 Indeks Kedalaman (P₁) dan Indeks Keparahannya (P₂) Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2022

Tahun <i>Year</i>	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>	Indeks Keparahannya Kemiskinan <i>Poverty Severity Index</i>
(1)	(2)	(3)
2015	13,19	6,38
2016	10,30	4,83
2017	14,11	7,36
2018	10,04	4,51
2019	10,68	4,69
2020	8,31	3,15
2021	9,15	3,84
2022	9,96	4,11

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2023

2.1.2.7. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Pada tahun 2020, Kepolisian Resort Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan sebanyak 1.359 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan jumlah 685 untuk keperluan melamar pekerjaan, 580 untuk keperluan mendaftar TNI-Polri, dan 94 untuk keperluan lainnya. SKCK merupakan catatan kepolisian berisi keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebagai bukti peting bahwa orang yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kejahatan kriminal. Sementara itu, penghuni RUTAN Kelas IIB Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2020 adalah sebanyak 81 orang.

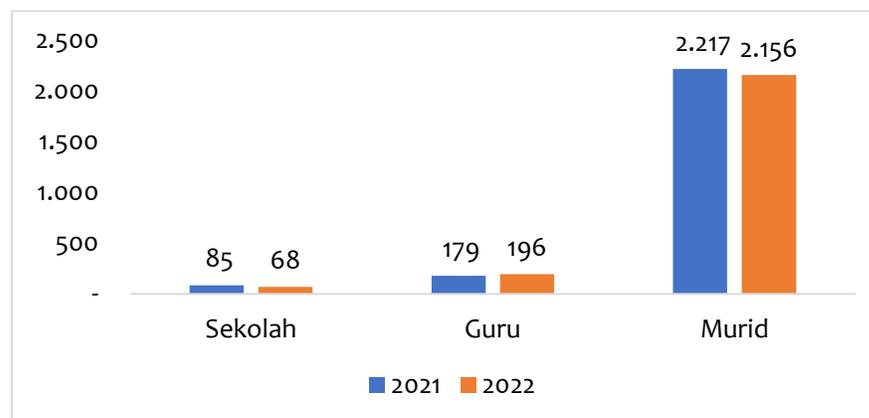
2.1.2.8. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang penting untuk diperhatikan. Besarnya perhatian pemerintah dan partisipasi masyarakat agar pendidikan masyarakat lebih baik. Pembangunan di bidang pendidikan menentukan kemajuan suatu daerah. Capaian pembangunan bidang pendidikan dapat ditunjukkan dari beberapa aspek, antara lain dari aspek ketersediaan fasilitas sarana/prasarana penunjang pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai.

Taman Kanak-Kanak

Sampai dengan tahun pelajaran 2022, jumlah sekolah taman kanak-kanan menjadi 68 unit sekolah dari sebelumnya 85 unit sekolah di tahun 2021. Penurunan jumlah sekolah ini terjadi di Distrik Aranday (berkurang 4 unit sekolah), Distrik Meyado (berkurang 2 unit sekolah), Distrik Fafurwar (berkurang 2 unit sekolah), dan Distrik Sumuri (berkurang 4 unit sekolah).

Gambar Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2022



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2023, diolah

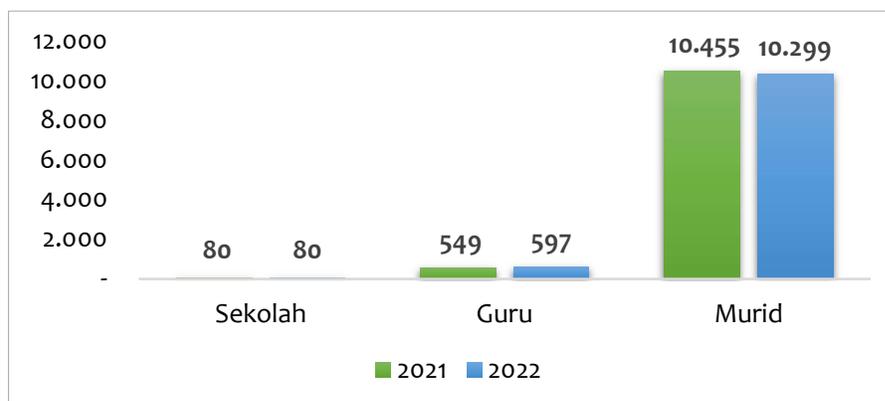
Seiring dengan jumlah sekolah yang berkurang, jumlah guru pendidikan taman kanak-kanak bertambah menjadi 196 guru, dari tahun 2021 sebelumnya sebanyak

179 guru. Kenaikan jumlah guru sementara jumlah muridnya menurun menjadi 2.156 murid dari sebelumnya 2.217 murid di tahun 2021 sehingga menyebabkan rasio murid terhadap guru menurun. Rasio murid terhadap guru pada jenjang Pendidikan TK tahun 2022 tercatat sebesar 11; yang artinya terdapat 11 murid yang dididik setiap satu guru TK.

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

Pada jenjang Pendidikan sekolah dasar, jumlah unit sekolah tidak mengalami perubahan di tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Namun, jumlah gurunya bertambah 48 guru menjadi 597 guru dari tahun 2021 sebanyak 549 guru. Kenaikan jumlah guru di tahun 2022 yang tidak disertai kenaikan jumlah murid sehingga menyebabkan rasio murid terhadap guru menurun. Artinya jumlah murid yang dididik untuk setiap satu guru menurun. Rasio murid terhadap guru untuk sekolah dasar di tahun 2022 sebesar 17,25; yang artinya untuk setiap satu guru mengajar sebanyak 17 murid. Jumlah murid SD di tahun 2022 sebanyak 10.299 murid, atau menurun dari tahun sebelumnya 10.455 murid.

Gambar. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid jenjang Pendidikan SD kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021-2022

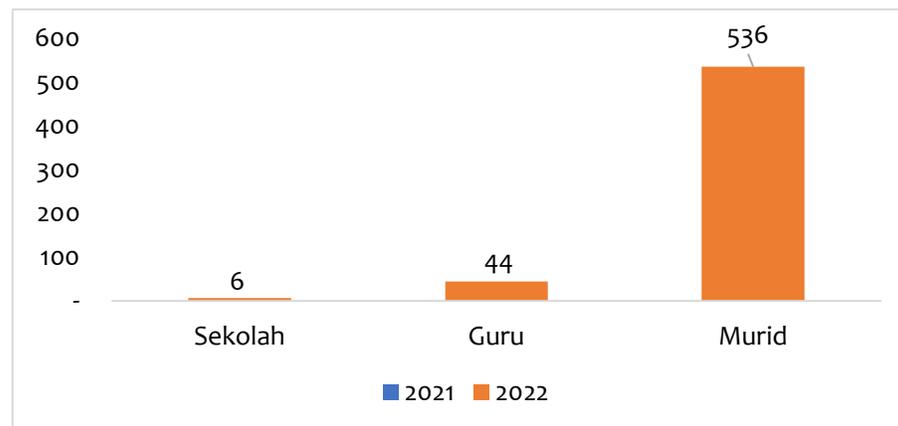


Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2023, diolah

Pada jenjang Pendidikan madrasah ibtidaiyah jumlah sekolah tahun ajaran 2022 sebanyak 6 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 44 guru dan jumlah murid 536

murid. Rasio murid terhadap guru pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah sebesar 12,18; artinya untuk setiap satu guru mendidik sebanyak 12 murid. Rasio murid terhadap guru jenjang Pendidikan madrasah ibtidaiyah Lebih rendah bila dibanding rasio jenjang Pendidikan sekolah dasar.

Gambar. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid jenjang Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021-2022



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2023, diolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi kasar (APK) mengukur banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat. Di tahun 2022 APK jenjang Pendidikan SD/MI sudah cukup baik, diatas 100 persen; artinya partisipasi sekolah anak usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat di atas 100 persen. Adapun angka partisipasi murni (APM) mengukur banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Di tahun 2022, APM SD/MI/ sederajat tercatat 91,78, artinya 91,78% anak usia sekolah SD/MI/ sederajat telah bersekolah di jenjang Pendidikan SD/MI/ sederajat.

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang Pendidikan SMP/MTs tahun 2022 tercatat sebesar 90,74, meningkat dibanding tahun sebelumnya 87,15. Artinya jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat semakin banyak, mendekati 100 persen. Adapun angka partisipasi murni (APM) pendidikan

SMP/MTs tercatat sebesar 69,15. Artinya, jumlah anak pada usia sekolah SMP/MTs/ sederajat yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat adalah sebesar 69,15 persen. Nilai APM SMP/ sederajat idealnya di atas 85 atau bahkan mendekati 100, yang berarti semakin banyak anak usia SMP/ sederajat yang bersekolah di SMP/ sederajat. Nilai APM jenjang SMP/ sederajat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah ke depannya.

Tabel. Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Sederajat kabupaten Teluk Bintuni tahun 2021-2022

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Enrollment Rate</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Enrollment Ratio</i>	
	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/Sederajat <i>Primary School</i>	93,60	91,78	111,89	113,54
SMP/MTs/ Sederajat <i>Lower Secondary School</i>	69,93	69,15	87,15	90,74
SMA/SMK/MA/Sederajat <i>Upper Secondary School</i>	56,86	56,94	96,85	101,44

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2023, diolah

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/MA tahun 2022 tercatat sebesar 101,44 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya 96,85, artinya makin banyak siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat. Meski demikian, bila dilihat dari angka partisipasi murni (APM), nilainya sebesar 56,94 di tahun 2022 dan 56,86 tahun 2021. Artinya partisipasi anak usia sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat yang bersekolah di jenjang ini cukup jauh dari 100%. Dengan kata lain jumlah anak usia sekolah SMA/SMK/MA/ sederajat yang tidak bersekolah di jenjang ini hampir separo. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Teluk Bintuni untuk capaian APM SMA/SMK/MA/ sederajat yang lebih tinggi tahun mendatang.

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sederajat

Jumlah sekolah menengah pertama (SMP) di tahun ajaran 2022 tercatat sebanyak 35 unit sekolah, jumlah yang sama dibanding tahun sebelumnya. Adapun jumlah guru bertambah menjadi 416 guru, naik dari tahun sebelumnya 386 guru. Jumlah murid tercatat 3.929 murid atau menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 3.945 murid. Dengan demikian rasio murid terhadap guru tercatat 9,4. Artinya untuk setiap satu guru mendidik sebanyak 9 murid SMP. Sementara itu, pada jenjang Pendidikan Tsanawiyah, jumlah sekolah sebanyak 1 unit sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 9 guru, dan 42 murid.

Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan/Sederajat

Pada jenjang Pendidikan SMA, di tahun ajaran 2022 jumlah sekolah tercatat sebanyak 16 unit sekolah, bertambah 1 sekolah dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah guru sebanyak 196 guru, atau meningkat dibanding tahun sebelumnya 172 guru. Jumlah murid di tahun 2022 tercatat 2.543 murid, meningkat dari tahun sebelumnya 2.434 murid. Dengan demikian, rasio murid terhadap guru untuk jenjang Pendidikan SMA di tahun 2022 adalah sebesar 12,97 murid, artinya untuk setiap satu guru mendidik 12 sampai 13 murid.

Pada jenjang Pendidikan SMK, di tahun 2022 jumlah sekolah sebanyak 1 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 20 guru dan jumlah murid 552 murid, sehingga rasio murid terhadap guru sebesar 27,6, artinya untuk setiap satu guru SMK harus mendidik 27 siswa, rasio yang kurang ideal sehingga perlu untuk menambah jumlah guru SMK. Sementara itu, pada jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah atau MA, jumlah sekolah tercatat sebanyak 1 unit sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 11 guru, dan murid 83 murid, sehingga rasio murid terhadap guru sebesar 7,54; artinya setiap satu guru mendidik 7 murid MA.

Angka partisipasi sekolah

Dilihat dari angka partisipasi sekolah baik berdasarkan jenis kelamin maupun umur, angka partisipasi sekolah penduduk kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022 untuk usia 7 s/d 24 tahun tercatat sebesar 66,50%, dan usia 19 s/d 24 tahun sebesar 18,76% serta usia 16 s/d 18 tahun sebesar 72,12%.

Adapun bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, partisipasi sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Partisipasi sekolah penduduk laki-laki usia 16 s/d 18 tahun tercatat 76,79%, sementara penduduk perempuan di usia yang sama 65,33%.

Demikian juga di usia 19 s/d 24, partisipasi sekolah penduduk laki-laki tercatat 19,98%, sementara perempuan tercatat hanya 16,48. Perbedaan tingkat partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan ini disebabkan perubahan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga seiring bertambahnya usia.

2.1.2.9. Kesehatan

Angka Kematian Bayi

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e_0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Angka kematian bayi dapat didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup, namun data tersebut belum tersedia di Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2016), persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang memiliki jumlah anak lahir hidup sebanyak 1 anak adalah sebesar 20,09 persen, anak lahir hidup sebanyak 2 orang sebesar 18,98 persen, anak lahir hidup sebanyak ≥ 3 orang sebesar 49,01 persen, sedangkan yang belum memiliki anak sebesar 10,96 persen. Sementara itu, persentase wanita yang

telah memiliki anak dan belum meninggal hingga tahun 2015 adalah sebesar 84,34 persen, meninggal sebanyak 1 orang sebesar 8,45 persen, meninggal sebanyak 2 orang sebesar 4,23 persen, dan meninggal ≥ 3 orang sebesar 2,98 persen.

Tabel 2.18 Persentase Wanita Berumur 10 Tahun Atau Lebih Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup dan Meninggal di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017

Tahun	Jumlah Anak Lahir			
	0	1	2	≥ 3
2010	10,96	21,05	18,98	49,01
2011	14,39	19,47	21,54	44,60
2012	7,37	22,14	22,39	48,10
2013	12,90	21,31	19,63	46,16
2014	8,19	21,77	21,31	48,73
2015	11,89	20,09	18,98	49,04
2016	13,12	17,80	24,68	23,23
2017	0	31,90	27,30	14,30
Tahun	Jumlah Anak Meninggal			
	0	1	2	≥ 3
2010	84,34	8,45	4,23	2,98
2011	79,95	12,44	2,99	4,62
2012	73,55	16,91	6,27	3,27
2013	80,14	12,54	5,49	1,83
2014	78,86	12,51	4,87	3,76
2015	85,72	9,97	3,32	0,99
2016	90,46	5,87	1,83	1,84
2017	0	63,00	30,20	6,70

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Teluk Bintuni juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2010, AHH di

Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 57,41 tahun, kemudian meningkat menjadi sebesar 57,94 tahun pada tahun 2012, pada tahun 2013 menjadi 58,13 tahun, dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 58,42 tahun. AHH sebesar 58,42 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Teluk Bintuni dapat menjaani hidup selama 58 tahun. Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Teluk Bintuni tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. Angka AHH Kabupaten Teluk Bintuni lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 yang mencapai 65,32 tahun. Di Provinsi Papua Barat sendiri, AHH tertinggi ditempati Kabupaten Manokwari dengan AHH mencapai 68,00 tahun.

Tabel 2.19 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2021

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2019	2020	2021
AHH (Tahun)	59,12	59,48	59,83	60,2	60,6	60,8

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2018

2.1.2.10. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya

pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktikal, pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity* (PPP). Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.20 Perkembangan IPM Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2021

Tahun	IPM
2015	61,09
2016	61,81
2017	62,39
2019	63,13
2020	64,00
2021	64,55

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2022

Selama periode 2011-2017, perkembangan IPM Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan selama periode tersebut cukup signifikan sehingga angka IPM Kabupaten Teluk Bintuni telah tergolong dalam kategori sedang. Pada tahun 2011, IPM Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 57,87, kemudian meningkat menjadi 58,84 pada tahun 2012, meningkat kembali menjadi 59,73 pada tahun 2013, dan kinerja IPM pada tahun 2017 adalah sebesar 62,39.

Tabel 2.21 Komponen IPM Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat, 2021

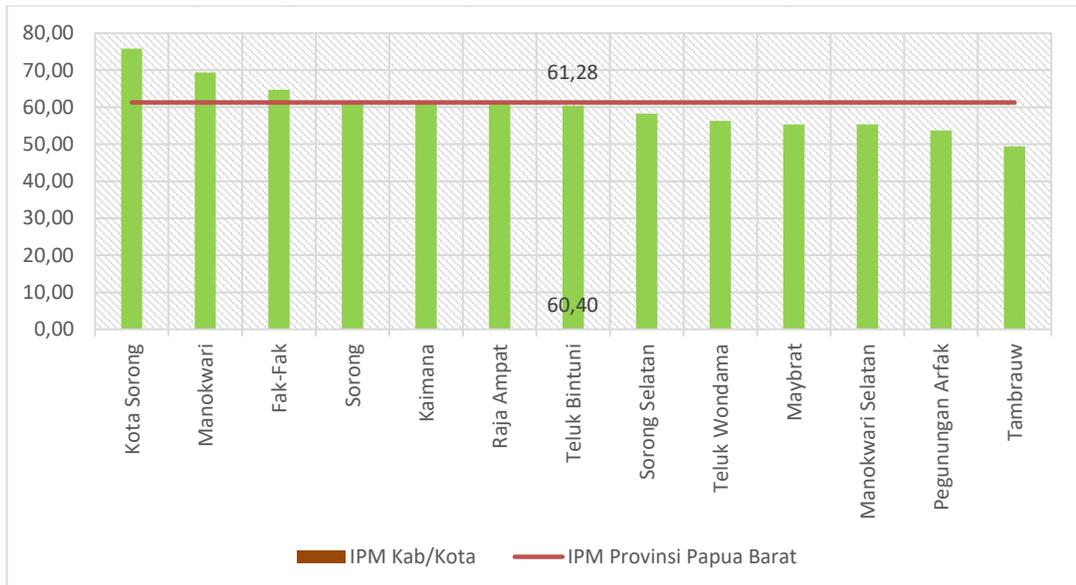
1.	Usia harapan hidup (tahun)	58,42	65,14
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	11,21	11,87

3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,44	6,96
4. Pengeluaran per kapita (Rp juta)	8,93	6,94
5. IPM	60,40	61,28

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni, 2022

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa komponen penyusun IPM adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity*. Pada tahun 2014, angka harapan hidup di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 58,42 tahun, harapan lama sekolah sebesar 11,21 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,44 tahun dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 8,93 juta. IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2014 adalah sebesar 60,40 dan lebih rendah jika dibandingkan IPM Provinsi Papua Barat yang nilainya sebesar 61,28. Angka IPM tersebut berasal dari angka harapan hidup sebesar 65,14 tahun, harapan lama sekolah sebesar 11,87 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 6,96 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 6,94 juta.

Gambar 2.9 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2014



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015 (diolah)

Di tingkat Provinsi Papua Barat, IPM Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2014 berada pada posisi 7 dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Dengan posisi yang berada di kategori sedang, maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai IPM tersebut melalui berbagai kebijakan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sektor ekonomi lainnya agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang maksimal melalui peningkatan kesejahteraan. Di Provinsi Papua Barat sendiri, posisi pertama ditempati oleh Kota Sorong dengan nilai sebesar 75,78 dan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Papua Barat yang memiliki IPM dalam kategori tinggi. Posisi Kabupaten Teluk Bintuni sendiri tergabung dalam kategori IPM sedang bersama dengan Kabupaten Fak-fak, Sorong, Kaimana, dan Raja Ampat.

2.1.2.11. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal misalnya ketersediaan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas, dan lain-lain.

Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedangkan dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan

kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Penduduk Usia Kerja

Penduduk dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Indonesia dalam memberikan batasan umur pada penduduk usia kerja, menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2016), jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 40.524 jiwa yang terdiri atas 23.140 laki-laki dan 17.384 perempuan. Selama periode 2010-2015, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Teluk Bintuni meningkat dari sebanyak 23.651 jiwa (16.037 laki-laki dan 7.614 perempuan) pada tahun 2010 menjadi sebanyak 28.596 jiwa (19.428 laki-laki dan 9.168 perempuan).

Tabel 2.22 Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja, 2021

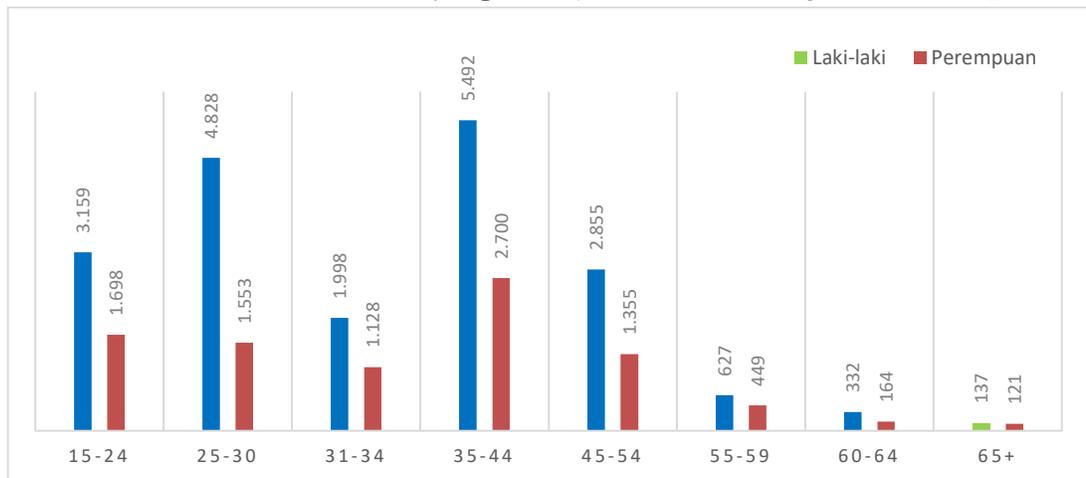
Tahun	Laki-laki	Perempuan
2015	19.428	9.168
2016	23.140	17.384
2017	24.332	18.333
2021	20.250	10.843

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, Tahun 2017 dan 2018

Jika diklasifikasikan menurut kelompok umur, jumlah penduduk usia kerja terbanyak di Kabupaten Teluk Bintuni berada pada kelompok umur 35-44 tahun dengan jumlah sebanyak 8.192 jiwa, diikuti kelompok umur 25-30 tahun sebanyak 6.381 jiwa, dan kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 4.857 jiwa. Porsi penduduk usia 15-24 tahun berkontribusi cukup tinggi untuk penduduk usia kerja dan

umumnya mereka masih berada pada usia sekolah. Penduduk yang lebih banyak terdistribusi pada umur-umur muda memaksa pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni harus bersiap untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dalam gambar terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk usia kerja terkonsentrasi pada kelompok umur muda. Kondisi ini memungkinkan banyak terdapat angkatan kerja baru yang siap bersaing di pasar tenaga kerja. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan terjadi bukan hanya terbatas pada *new entrance* yang baru lulus dari jenjang pendidikan, tetapi juga para pencari kerja yang sebelumnya pernah bekerja maupun yang masih bekerja tetapi kurang puas dengan pekerjaan yang dijalannya sekarang, sehingga masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Gambar 2.10 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2015



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

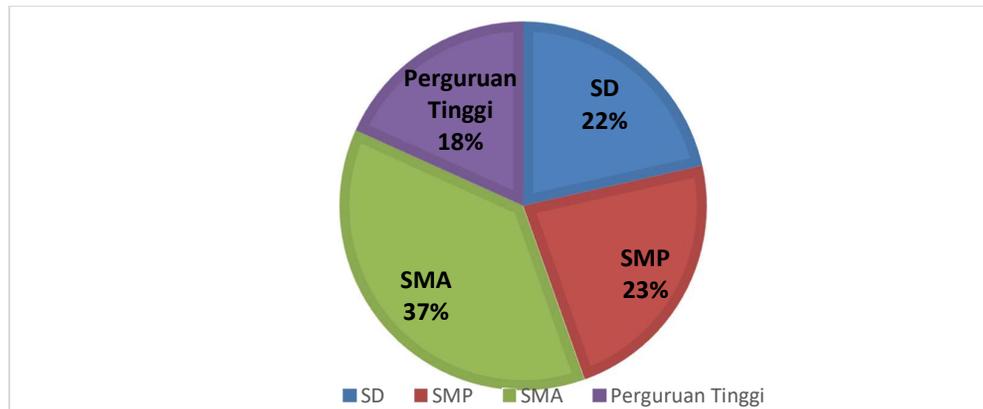
Pada kenyataannya, penambahan jumlah angkatan kerja tidak secepat penambahan persediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi rebutan sekian banyak para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja. Mereka yang kalah bersaing harus tersingkir dari lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semakin

lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

Penduduk Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia yang bekerja atau bekerja namun sementara tidak bekerja, termasuk di dalamnya pengangguran. Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 32.639 jiwa, terdiri atas 21.084 laki-laki dan 11.555 perempuan. Menurut tingkat pendidikannya, persentase angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2021 adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 36,83 persen. Persentase angkatan kerja dengan pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 26,67 persen, pendidikan SMP/MTS sebesar 20,13 persen, pendidikan diploma/sarjana sebesar 13,97 persen, dan yang tidak memiliki ijazah sebesar 2,39 persen. Kualitas sumber daya manusia yang diwakili oleh tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang termasuk bagian angkatan kerja merupakan modal yang sangat penting dalam memasuki pasar kerja, khususnya apabila bekerja pada sektor formal.

Gambar 2.11 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2021



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022 (diolah)

Angkatan kerja, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Konsep bekerja yang dipakai oleh BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2016), jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah sebanyak 28.596 jiwa, terdiri atas 19.428 laki-laki dan 9.168 perempuan.

Tabel 2.23 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Jenis Kelamin	2021
Laki-laki	20.250
Perempuan	10.843
Jumlah	31.093

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Penduduk bekerja memasuki berbagai variasi lapangan pekerjaan yang macamnya sangat banyak. Lapangan usaha dibagi menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Yang termasuk dalam sektor primer adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sektor sekunder meliputi pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air minum dan konstruksi. Sedangkan untuk sektor tersier meliputi perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Teluk Bintuni yang bekerja, sebagian besar pekerjaan utamanya adalah pada sektor tersier yaitu sebesar 54,44 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersier pada tahun 2015 adalah sebanyak 15.569 orang dimana sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor tersier berasal dari lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan yang mencapai 8.859 orang.

Tabel 2.24 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Usaha Utama (persen), 2021

Sektor	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Primer	8,796	30,76
Sekunder	4,231	14,80
Tersier	15,569	54,44
Jumlah	28,596	100,00

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Penduduk yang bekerja di sektor primer pada tahun 2015 adalah sebanyak 8.796 orang (30,76 persen). Penduduk yang bekerja di bidang usaha pertanian adalah sebanyak 7.421 orang, sedangkan yang bekerja di bidang usaha pertambangan dan penggalian sebanyak 1.375 orang. Usaha pertanian yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga adalah pertanian palawija. Bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman, hasil yang diperoleh dari pertanian palawija, seperti ubi jalar dan ketela pohon sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga sendiri

atau digunakan sebagai alat barter untuk mendapatkan barang-barang keperluan sehari-hari lainnya. Komoditas perkebunan yang dihasilkan oleh rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni di antaranya adalah perkebunan coklat dan kelapa. Kegiatan kehutanan dan perburuan juga banyak dilakukan oleh penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, mengingat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Teluk Bintuni masih berupa hutan. Untuk kegiatan perikanan, dengan banyaknya potensi sumberdaya ikan, maka banyak penduduk yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar perairan Teluk Bintuni.

Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021

Status	Jumlah
Berusaha sendiri	6.457
Berusaha dibantu buruh tak tetap/tak dibayar	3.603
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	673
Buruh/karyawan/pegawai	14.733
Pekerja tak dibayar/pekerja keluarga	2.309
Pekerja bebas	3.318
Jumlah	31.093

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor sekunder pada tahun 2015 adalah sebanyak 4.231 orang. Rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor *manufactures* di Kabupaten Teluk Bintuni diduga karena sektor usaha tersebut membutuhkan keahlian yang spesifik sehingga belum banyak penduduk lokal yang terserap pada sektor tersebut. Dengan sumber daya alam di Kabupaten Teluk Bintuni yang sangat melimpah, maka perlu adanya pendayagunaan penduduk lokal agar memiliki keahlian yang dipersyaratkan sehingga sektor sekunder nantinya menyerap tenaga kerja yang besar. Selain itu akses transportasi dan infrastruktur yang belum memadai, termasuk wilayah geografis yang sulit, membuat sebagian besar wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni sulit untuk ditembus.

Menurut status pekerjaan utamanya, penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni yang berusaha sendiri pada tahun 2015 adalah sebanyak 5.554 orang (19,42 persen), berusaha dibantu buruh tak tetap/tak dibayar sebanyak 3.402 orang (11,90 persen), berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 710 orang (2,48 persen), buruh/karyawan/pegawai sebanyak 13.815 orang (48,31 persen), pekerja bebas sebanyak 2.235 orang (7,82 persen), dan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sebanyak 2.880 orang (10,07 persen). Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Teluk Bintun bekerja di sektor informal. Tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor informal dikarenakan latar belakang pendidikan penduduk yang rendah dimana untuk bekerja di sektor informal tidak membutuhkan syarat tingkat pendidikan yang tinggi. Walaupun dapat menyerap banyak tenaga kerja, sektor informal dinilai kurang produktif. Meskipun demikian, setidaknya dengan adanya sektor informal mampu menekan jumlah pengangguran. Dengan memiliki pekerjaan, tentunya diharapkan masyarakat dapat memenuhi minimal kebutuhan dasar, seperti sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Jika ingin memiliki daya saing yang tinggi, maka sumber daya manusia harus berpendidikan yang memadai. Akan lebih baik lagi jika sumber daya manusia yang tersedia dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja yang dibatasi pada umur 15 tahun ke atas dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja ini diantaranya dirinci menjadi tiga kelompok besar kegiatan, yaitu penduduk yang sedang sekolah, penduduk yang sedang mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sedang melakukan kegiatan lainnya. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 sebanyak 9.820 orang, yang terdiri dari 2.821 laki-laki dan 6.999 perempuan. Di antara penduduk bukan angkatan kerja, didominasi oleh penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah

tangga, yaitu sebanyak 5.574 orang (56,76 persen). Selanjutnya kelompok penduduk yang sedang bersekolah adalah sebanyak 3.542 orang (36,07 persen). Penduduk yang melakukan kegiatan selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga, termasuk di dalamnya mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi selama seminggu yang lalu adalah sebanyak 704 orang (7,17 persen).

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama (jiwa), 2021

Status	Jumlah
Sekolah	3.424
Mengurus rumah tangga	8.631
Lainnya	3.767
Jumlah	48.461

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

2.1.2.12. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang cukup besar dengan potensi budaya dan nilai-nilai tradisi yang telah mengakar. Kebijakan pembangunan seni dan kebudayaan diarahkan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat daerah, mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau tidak sesuai dengan budaya lokal. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki keindahan destinasi wisata alam yang luar biasa dengan multikulturalisme penduduk yang tinggal di daerah ini merupakan potensi utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Daya tarik wisata budaya akan menjadi salah satu keunggulan lokal yang mampu membuat Kabupaten Teluk Bintuni sebagai destinasi wisata tujuan utama turis asing dan domestik. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala pengembangan seni budaya.

Peran pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai pelaksana pembangunan yang nantinya diharapkan menciptakan iklim yang nyaman agar pelaku usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dapat berkembang secara efektif dan efisien. Terkait dengan sektor pariwisata secara khusus, sektor tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena memiliki *multiplier effect* yang tinggi. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk menarik minat pengunjung. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kebijakan pengarusutamaan olahraga ditujukan untuk membangkitkan prestasi olahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, budaya masyarakat dan wahana memosisikan kemartabatan dan keberadaban bangsa Indonesia dalam berbagai ajang olahraga internasional. Kebijakan pengarusutamaan pemuda dan olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Langkah-langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini perlu disusun agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya.

Kebijakan pengarusutamaan pemuda dan olahraga menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga. Untuk itu diperlukan kerjasama serta komitmen berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta maupun pemuda itu sendiri dalam berupaya agar pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dapat tercapai secara maksimal. Langkah-langkah strategis yang mendorong implementasi kebijakan ini perlu disusun agar seluruh pihak dapat terbuka dan melaksanakannya.

Di bidang kepemudaan dan olah raga, pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas dan pembina terhadap pemuda dan cabang olah raga, mulai dari pembinaan pelatih dan fasilitasi kegiatan olah raga hingga pengembangan kapasitas SDM pemuda. Namun keterbatasan fasilitas, sarana prasarana penunjang masih menjadi kendala bagi pengembangan seni budaya dan olah raga, misalnya belum ada gedung kantor, gedung kesenian dan olah raga yang representatif. Jadi, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, fasilitas serta sarana prasarana di bidang kepemudaan dan olah raga menjadi sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan di masa mendatang.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten meliputi urusan wajib dan urusan lainnya bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni meliputi 17 urusan wajib, disamping urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Kabupaten Teluk Bintuni masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana fisik sekolah di samping juga menghadapi kendala dalam penyediaan tenaga pengajar dan ketidakmerataan tenaga pengajar pada beberapa distrik. Terbatasnya tenaga pengajar tidak hanya persoalan sedikitnya jumlah guru tetapi juga komitmen guru masih rendah dimana pola tersebut tidak hanya dihadapi Kabupaten Teluk Bintuni tetapi secara umum juga terjadi di Provinsi Papua Barat. Banyak tenaga pengajar yang masih sering meninggalkan tugasnya karena tidak bersedia menetap di lokasi tugasnya serta sering pergi ke kota dalam waktu yang relatif cukup lama. Kondisi ini mengakibatkan ada sebagian guru yang menanggung beban tugas melebihi porsi yang sebenarnya seperti harus mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan sehingga para siswa kurang mendapat perhatian dalam pembelajaran.

Tabel 2.28 Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Tingkat Pendidikan, 2013-2017

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PAUD	43	45	47	49	52
TK	65	67	72	79	80
SD	76	81	81	81	81
SMP	32	34	34	35	35
SMA/SMK	16	18	18	19	17
Jumlah	232	245	252	263	265

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Selama periode 2013-2017, jumlah sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni secara keseluruhan mengalami peningkatan dari sebanyak 232 unit pada tahun 2013

menjadi sebanyak 265 unit pada tahun 2017. Jumlah SD mengalami peningkatan dari sebanyak 76 unit (2013) menjadi sebanyak 81 unit (2017), jumlah SMP meningkat dari 32 unit (2013) menjadi sebanyak 35 unit (2017), dan jumlah SMA/SMK meningkat dari hanya 16 unit (2013) menjadi sebanyak 17 unit (2017). Rincian perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni ditampilkan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.29 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan, 2021

Tingkat Pendidikan	Sekolah (unit)	Guru (orang)	Murid (orang)
PAUD	52	124	1.270
TK	80	205	3,238
SD	85	581	10,418
SMP	34	352	3,649
SMA/SMK	18	230	2,522

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 diolah

Pada tahun 2021, jumlah fasilitas pendidikan anak usia dini dan TK di Kabupaten Teluk Bintuni masing-masing sebanyak 52 dan 80 unit, untuk fasilitas pendidikan dasar (SD) sebanyak 85 unit. Untuk fasilitas pendidikan menengah, jumlah SMP pada tahun 2021 adalah sebanyak 34 unit, sedangkan jumlah SMA/SMK pada tahun 2021 adalah 18 unit (11 Negeri dan 7 Swasta). Selain fasilitas pendidikan yang sudah ada, ketersediaan tenaga pengajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Pada tahun 2021, jumlah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan PAUD adalah sebanyak 124 guru, TK sebanyak 205 guru, SD sebanyak 581 guru, SMP sebanyak 352 guru, SMA sebanyak 208 guru, dan SMK sebanyak 22 guru. Jumlah siswa PAUD pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.270 orang, TK sebanyak 3.238 orang, SD sebanyak 10.418 orang, SMP sebanyak 3.349 orang, dan SMA/SMK sebanyak 2.522 orang siswa.

Jika dilihat berdasarkan rasio antara sekolah dan murid pada tahun 2017, pada jenjang pendidikan PAUD, rasionya adalah sebesar 1:24,42 yang berarti bahwa 1 unit PAUD di Kabupaten Teluk Bintuni menampung sebanyak 24 murid. Pada

jenjang pendidikan TK, rasio sekolah dan murid adalah sebesar 1:40,48, jenjang pendidikan SD sebesar 1:128,62, jenjang pendidikan SMP sebesar 1:104,26, dan jenjang pendidikan SMA/SMK sebesar 1:148,35. Sementara itu, rasio antara guru dan murid pada tingkat pendidikan PAUD adalah sebesar 1:10,24 yang berarti bahwa 1 orang guru PAUD di Kabupaten Teluk Bintuni mengampu sebanyak 10 siswa, sedangkan rasio guru dan murid pada pendidikan TK adalah sebesar 1:15,80. Pada jenjang pendidikan SD, rasionya adalah sebesar 1:17,93, jenjang pendidikan SMP rasionya sebesar 1:10,37, sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK, rasio antara guru dan murid sebesar 1:10,97.

Tabel 2.30 Rasio Murid-Sekolah dan Murid-Guru di Kabupaten Teluk Bintuni

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah		Rasio Murid-Guru	
	2015	2017	2015	2017
PAUD	19,85	24,42	9,06	10,24
TK	43,35	40,48	16,69	15,80
SD	128,62	128,62	17,66	17,93
SMP	97,12	104,26	10,65	10,37
SMA/SMK	122,78	148,35	10,05	10,97

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 dan 2018 (diolah)

Jika dirinci menurut fasilitas pendidikan dan distrik, terlihat bahwa persebaran fasilitas pendidikan dari jenjang pendidikan PAUD hingga SMA/SMK di Kabupaten Teluk Bintuni belum merata dan cenderung terpusat di beberapa distrik seperti Distrik Bintuni, Manimeri, dan Sumuri. Sebagai contoh, dari 47 unit PAUD yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, 36 unit diantaranya berada pada 3 distrik tersebut dengan rincian Distrik Manimeri (14 unit), Distrik Bintuni (18 unit), Sumuri (5 unit), dan Aroba (4 unit). Di Kabupaten Teluk Bintuni, fasilitas pendidikan PAUD hingga tahun 2017 baru tersebar di 10 distrik. Dengan masih belum meratanya fasilitas pendidikan PAUD dan TK, maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu membangun fasilitas pendidikan TK mengingat pentingnya fasilitas pendidikan anak usia dini. Usia dari kelahiran hingga enam tahun merupakan usia kritis bagi perkembangan semua anak, karena pada usia inilah perkembangan sel-sel otak sangat cepat. Stimulasi yang diberikan pada usia ini akan mempengaruhi laju

pertumbuhan dan perkembangan anak serta sikap dan perilaku sepanjang rentang kehidupannya.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Distrik, 2017

No.	Distrik	PAUD	TK	SD	SMP	SMA/SMK
1.	Farfurwar	2	2	2	1	-
2.	Babo	3	4	3	1	1
3.	Sumuri	5	15	7	3	2
4.	Aroba	4	3	3	2	-
5.	Kaitaro	-	-	5	1	1
6.	Kuri	-	2	5	1	-
7.	Wamesa	-	2	5	2	-
8.	Bintuni	18	17	10	5	5
9.	Manimeri	14	12	8	4	-
10.	Tuhiba	-	2	3	1	-
11.	Dataran Beimes	-	1	1	1	-
12.	Tembuni	-	2	3	2	1
13.	Aranday	-	3	4	1	-
14.	Tomu	2	5	4	2	1
15.	Kamundan	-	1	1	1	1
16.	Weriagar	1	1	1	1	-
17.	Moskona Selatan	1	3	3	1	-
18.	Meyado	3	3	2	1	1
19.	Moskona Barat	-	1	1	1	1
20.	Merdey	-	1	6	1	1
21.	Biscoop	-	1	-	-	-
22.	Masyeta	-	-	2	-	-
23.	Moskona Utara	-	-	1	1	-
24.	Moskona Timur	-	-	1	1	-
	Jumlah	52	80	81	35	15

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 (diolah)

Fasilitas pendidikan TK di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2017 tersebar di 16 distrik dengan distrik yang memiliki jumlah TK terbanyak adalah Distrik Bintuni (17 unit), Distrik Manimeri (12 unit), dan Distrik Sumuri (15 unit). Fasilitas pendidikan SD di Kabupaten Teluk Bintuni hingga tahun 2017 tersebar di 23 distrik dengan

distrik yang tidak memiliki fasilitas SD adalah Distrik Biscoop. Seperti pada jenjang pendidikan PAUD dan TK, persebaran SD juga kurang merata di setiap distrik. Jumlah SD paling banyak juga berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 10 unit, Distrik Manimeri sebanyak 8 unit, dan Distrik Sumuri sebanyak 7 unit. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus berusaha menambah fasilitas pendidikan dimana dengan semakin bertambahnya fasilitas SD, maka akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan semakin terbuka sehingga tingkat partisipasinya meningkat. Jarak dari rumah ke sekolah yang awalnya relatif jauh, kini dengan berdirinya gedung sekolah baru menjadi semakin dekat. Sementara itu, untuk fasilitas jenjang pendidikan SMP hanya terdapat di 21 distrik dengan distrik yang tidak memiliki pendidikan SMP adalah Distrik Biscoop, Masyeta, dan Moskona Timur. Fasilitas untuk jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat di 11 distrik yaitu Distrik Bintuni sebanyak 5 unit, Distrik Sumuri dan Tomu (masing-masing 2 unit), Distrik Kaitaro, Tembuni, Kamundan, Meyado, Moskona Barat, dan Merdey (masing-masing 1 unit).

Angka Kelulusan

Ujian nasional untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA ditujukan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut berarti bahwa kelulusan dalam ujian nasional secara kasar dapat menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di suatu wilayah telah memenuhi kualitas nasional. Selama periode 2012-2017, angka kelulusan untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan perbaikan dengan angka kelulusan selama 4 tahun terakhir telah mencapai 100 persen untuk semua jenjang pendidikan. Hanya pada tahun 2016 dan 2017 pada capaian kelulusan di SMP/MTS adalah 97,21 persen dan 99,45 persen serta pada tahun 2017 capaian kelulusan di SMA/SMK sebesar 99,46 persen.

Tabel 2.32 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan (persen), 2012-2017

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
2012	99,81	96,10	93,05
2013	99,62	99,74	100,00
2014	100,00	100,00	100,00
2015	100,00	100,00	100,00
2016	100,00	97,21	100,00
2017	100,00	99,45	99,46

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 (diolah)

Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan keaksaraan merupakan program pendidikan dalam rangka memberantas penduduk buta aksara supaya menjadi melek aksara (huruf). Seseorang dikatakan melek huruf jika orang tersebut mampu membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Pendidikan keaksaraan berkaitan dengan kinerja pendidikan dasar bagi kelompok usia sekolah. Kegiatan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kelompok buta aksara baru baik sebagai akibat adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak terlayani pendidikan dasar, maupun anak putus sekolah pendidikan dasar. Selain pada pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan juga diperuntukkan bagi orang dewasa (*adult education*) untuk penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas). Indikator-indikator yang biasa dijadikan ukuran keberhasilan program pendidikan keaksaraan diantaranya angka melek huruf, dan pendidikan yang ditamatkan penduduk.

Program pemberantasan buta aksara di Kabupaten Teluk Bintuni selama lima tahun terakhir cukup menunjukkan perubahan yang signifikan. Penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf selama lima tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan dari sebesar 85,68 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 97,33 persen pada tahun 2017. Dengan kata lain hanya tinggal 2,67 persen penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yang masih buta aksara. Belum seluruhnya penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yang melek huruf diduga karena

didominasi oleh kelompok tersulit (*hardrock*) dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

Tabel 2.33 Jumlah Peserta Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	2.979	31	1,04
2011	2.979	50	1,68
2012	2.929	525	17,92
2013	2.826	103	3,64
2014	2.801	24	0,86
2015	2.540	261	10,28
2016	2.379	120	5,04
2017	1.229	100	8,14

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Pendidikan keaksaraan yang umumnya diberikan dalam kelompok belajar sulit untuk menjangkau penduduk buta aksara di Kabupaten Teluk Bintuni yang sebagian besar wilayahnya sulit dijangkau dengan tempat tinggalnya secara umum menyebar. Kelompok tersulit lain adalah masyarakat yang belum memahami manfaat kemampuan keaksaraan sebagai kemampuan dasar untuk memperoleh nilai tambah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam meningkatkan produktivitas mereka. Data peserta program keaksaraan fungsional dalam 5 tahun terakhir semakin menegaskan bahwa tingkat buta aksara di Kabupaten Teluk Bintuni cukup sulit untuk diberantas. Persentase realisasi peserta program keaksaraan fungsional selama periode 2010-2017 relatif masih kecil dengan persentase realisasi tertinggi hanya sebesar 17,92 persen pada tahun

2012, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya sebesar 0,86 persen.

2.1.3.2. Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik.

Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan. Salah satu cara adalah dengan mengaktifkan kembali fungsi posyandu. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.34 Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2009-2017

2009	-	15	87	2	10
2010	-	15	90	2	14
2011	1	20	118	1	11
2012	1	20	118	1	20
2013	1	20	127	3	20
2014	1	20	134	3	20
2015	1	24	134	3	20
2016	1	24	150	3	20
2017	1	24	150	3	18

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Jenis fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah rumah sakit, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan, dan polindes/poskeskam. Hingga tahun 2017, jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 1 unit yang mulai beroperasi dari tahun 2011. Untuk puskesmas, jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 15 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 24 unit pada tahun 2017. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas kesehatan yang dapat menjangkau pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat sampai tingkat distrik. Selain rumah sakit dan puskesmas, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyediakan fasilitas posyandu yang jumlahnya mengalami peningkatan dari sebanyak 87 unit pada tahun 2009 menjadi sebanyak 150 unit pada tahun 2017. Sementara itu, klinik kesehatan juga bertambah dari sebanyak 2 unit (2009) menjadi sebanyak 3 unit (2017). Selain fasilitas kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga menggalakkan polindes/poskeskam dimana jumlahnya pada tahun 2015 sebanyak 20 unit dan turun menjadi 18 pada tahun 2017.

Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri atas tenaga medis dan tenaga non medis yang bekerja di Puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Tenaga medis yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni diantaranya adalah dokter, perawat,

bidan, dan apoteker. Jumlah dokter di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 adalah sebanyak 40 orang yang terdiri atas dokter ahli sebanyak 5 orang, dokter umum sebanyak 32 orang, dan dokter gigi sebanyak 3 orang. Jika dirinci menurut unit kerja, jumlah dokter yang bekerja di Puskesmas sebanyak 20 orang, rumah sakit sebanyak 17 orang, dan Dinas Kesehatan sebanyak 3 orang. Jumlah perawat selama periode 2012-2015 mengalami peningkatan dari sebanyak 212 orang pada tahun 2012 menjadi sebanyak 257 orang pada tahun 2015. Jumlah bidan pada tahun 2015 adalah sebanyak 135 orang dimana bidan yang ditempatkan di Puskesmas sebanyak 119 orang, rumah sakit sebanyak 14 orang, dan Dinas Kesehatan sebanyak 2 orang. Rincian mengenai jumlah tenaga kesehatan menurut unit kerja ditampilkan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.35 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

No.	Unit Kerja	Tenaga Medis				Tenaga Nonmedis			
		Dokter	Perawat	Bidan	Apoteker	Ahli Gizi	Teknisi Medis	Sanitasi	Kesehatan Masyarakat
1.	Puskesmas	20	174	119	2	12	12	16	16
2.	Rumah Sakit	17	75	14	9	2	9	9	8
3.	Dinas Kesehatan	3	8	2	3	1	-	1	8
Total		40	257	135	14	15	21	26	32

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

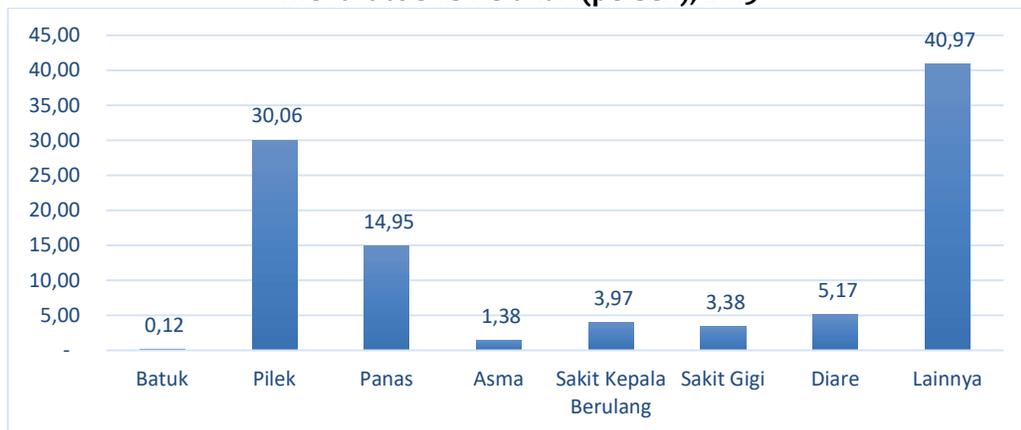
Jenis tenaga nonmedis di Kabupaten Teluk Bintuni adalah ahli gizi, teknisi medis, sanitasi, dan kesehatan masyarakat. Jumlah ahli gizi di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 adalah sebanyak 15 orang yang ditempatkan di Puskesmas sebanyak 12 orang, rumah sakit sebanyak 2 orang, dan Dinas Kesehatan sebanyak 1 orang. Sementara itu, jumlah teknisi medis di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 21 orang, tenaga sanitasi sebanyak 26 orang, dan ahli kesehatan masyarakat sebanyak 32 orang.

Keluhan Kesehatan

Indikator keluhan kesehatan menunjukkan proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Banyaknya keluhan akibat masalah kesehatan ini digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada masyarakat dimana masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan yang dialami semakin sedikit.

Menurut BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2016), terdapat sebesar 30,06 persen penduduk yang memiliki keluhan kesehatan pilek di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015. Jenis keluhan kesehatan lain yang paling banyak dirasakan penduduk adalah panas (14,95 persen), diare (5,17 persen), dan sakit kepala berulang (3,97 persen). Keluhan kesehatan lainnya yang dihadapi penduduk adalah batuk, asma, dan sakit gigi.

Gambar 2.12 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Keluhan (persen), 2015



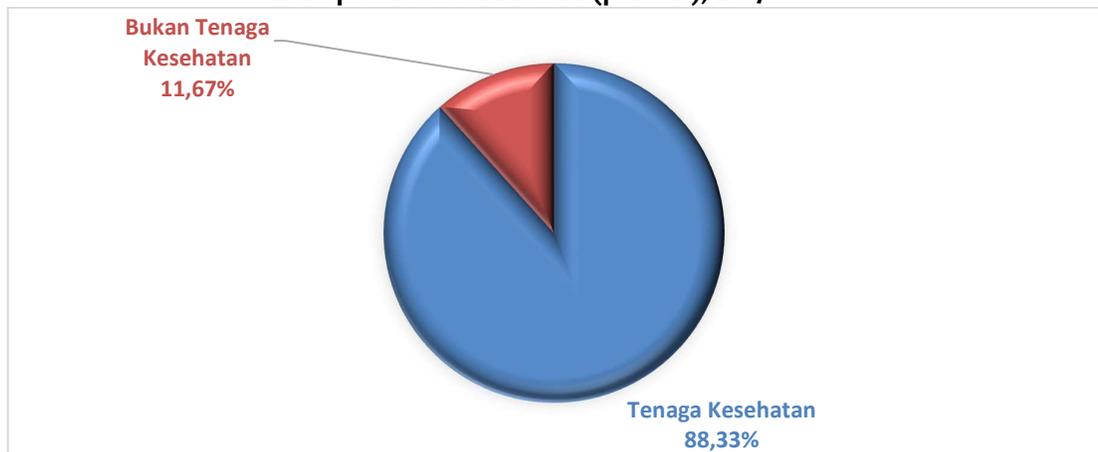
Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

Penolong Kelahiran

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain di

antaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, keluarga atau lainnya. Penolong kelahiran tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi saja, namun juga angka kematian ibu sebagai risiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara kemungkinan keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam risiko besar sebuah kelahiran.

Gambar 2.13 Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Teluk Bintuni (persen), 2017



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 (diolah)

Pada tahun 2017, jumlah persalinan yang dibantu tenaga medis adalah sebanyak 1.196 kasus dan persalinan yang dibantu tenaga non medis sebanyak 158 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa peran tenaga medis dalam melakukan bantuan persalinan bayi di Kabupaten Teluk Bintuni telah cukup optimal. Jika persentase tenaga non medis dalam proses persalinan semakin besar, maka hal tersebut bisa mengurangi tingkat kasus kematian ibu dan bayi. Setelah proses persalinan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyediakan pelayanan pasca persalinan yang meliputi pemberian vitamin A, kunjungan nifas I, kunjungan nifas

II, dan kunjungan nifas III. Pada tahun 2015, ibu melahirkan yang mengakses layanan pemberian vitamin A sebanyak 1.307 orang, kunjungan nifas I sebanyak 1.332 orang, dan kunjungan nifas II dan III masing-masing sebanyak 1.331 orang.

Imunisasi Balita

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi yang diberikan pada balita di antaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Jumlah balita yang melakukan imunisasi BCG pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.204 balita, DPT I sebanyak 1.340 balita, DPT II sebanyak 1.242 balita, DPT III sebanyak 1.200 balita, Polio I sebanyak 1.255 balita, Polio II sebanyak 1.386 balita, Polio III sebanyak 1.295 balita, Polio IV sebanyak 1.269 balita, Hepatitis B I sebanyak 1.340 balita, Hepatitis B II sebanyak 1.242 balita, Hepatitis B III sebanyak 1.200 balita, dan campak sebanyak 1.122 balita.

Tabel 2.36 Jumlah Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2017

Imunisasi	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
Tahun 2015	1.204	3.782	5.205	1.122	3.782
Tahun 2016	1.362	4.384	5.540	1.582	4.384
Tahun 2017	1.332	3.715	4.982	1.829	3.715

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016, 2017 dan 2018.

2.1.3.3. Pekerjaan Umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam

menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kondisi Jalan

Pembangunan jalan merupakan salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan membuka aksesibilitas antara wilayah dalam Kabupaten Teluk Bintuni maupun antar wilayah di Provinsi Papua Barat. Jalan merupakan salah satu urat nadi yang mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam periode 2011-2014, panjang jaringan jalan di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan ruas jalan dari sepanjang 1.292,60 km pada tahun 2011 menjadi sepanjang 1.059,93 km. Walaupun mengalami penurunan jaringan jalan, namun dari sisi kualitas jalan justru mengalami peningkatan. Sebagai contoh, jalan dengan permukaan aspal pada tahun 2011 hanya sepanjang 48,78 km kemudian meningkat sepanjang 80,01 km pada tahun 2014. Jika dirinci menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2014, jalan dengan permukaan cor di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sepanjang 31,99 km, kemudian jalan dengan jenis permukaan kerikil adalah sepanjang 273,13 km, dan jalan dengan permukaan tanah sepanjang 514,65 km. Sementara itu, jalan dengan jenis permukaan selain yang telah disebutkan di atas adalah sepanjang 160,15 km.

Tabel 2.37 Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2011-2017

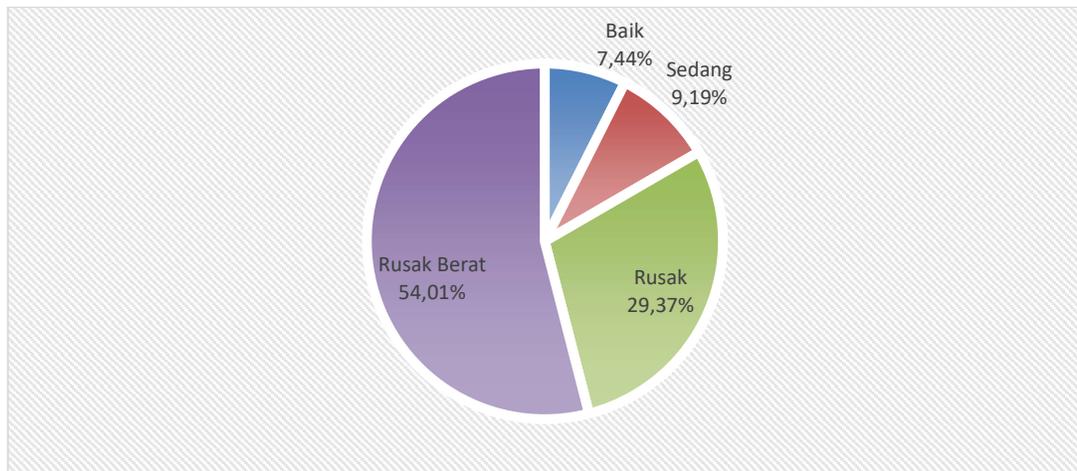
Tahun	Diaspal	Cor	Kerikil	Tanah	Tidak Dirinci	Jumlah
2011	48,78	9,55	277,69	403,40	553,18	1.292,60
2012	53,73	13,35	298,69	420,41	536,18	1.322,36
2013	76,33	19,80	311,79	431,01	520,83	1.359,76
2014	80,01	31,99	273,13	514,65	160,15	1.059,93
2017	139,22	-	803,93	545,21	-	1.488,36

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 dan 2018

Pada tahun 2014, jaringan jalan di Kabupaten Teluk Bintuni yang berada dalam kondisi baik adalah sepanjang 79,10 km. Jalan dengan kondisi baik mengalami

peningkatan dari sebelumnya tahun 2011 hanya sepanjang 58,34 km. Panjang jalan dengan kondisi sedang pada tahun 2014 adalah sepanjang 97,64 km, jalan dalam kondisi rusak sepanjang 312,15 km, dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 574,04 km.

Gambar 2.14 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2017



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 (diolah)

2.1.3.4. Perumahan

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Perumahan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2015), sebagian besar luas lantai rumah di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas lantai > 20 m² dengan persentase pada tahun 2014 sebesar 93,60 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai >20 m² mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 93,81 persen. Kualitas rumah juga makin membaik dilihat dari persentase rumah yang menggunakan lantai bukan tanah walaupun persentasenya mengalami penurunan. Pada tahun 2013, persentase rumah yang menggunakan lantai bukan tanah sebesar 98,23 persen, dan pada tahun 2014 persentasenya menurun menjadi sebesar 96,68 persen. Dari sisi jenis dinding, persentase rumah yang menggunakan dinding permanen selalu meningkat setiap tahun dari sebesar 14,44 persen pada tahun 2012 menjadi sebesar 17,27 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.38 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan, 2012-2014

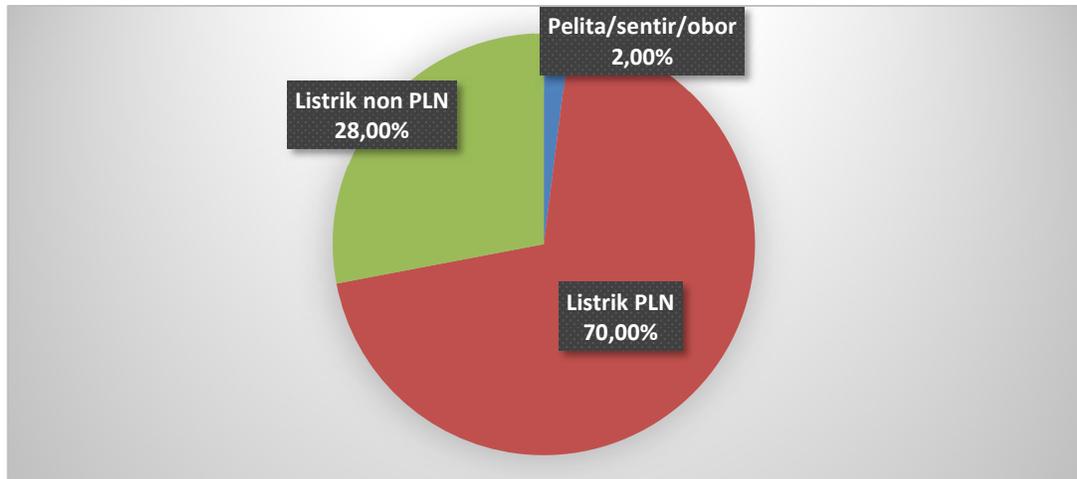
Uraian	2012	2013	2014
Luas lantai > 20 m ²	93,81	93,81	93,60
Lantai bukan tanah	97,94	98,23	96,68
Dinding permanen	14,44	15,20	17,27

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

Sumber Penerangan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2015), sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utamanya dimana persentasenya pada tahun 2014 adalah sebesar 70 persen. Sedangkan yang menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan utamanya adalah sebesar 28 persen dan yang menggunakan pelita/sentir/obor sebagai sumber penerangan hanya sebesar 2 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan listrik telah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Bintuni.

Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2018 (diolah)

Sumber Air Minum

Fasilitas air minum bersih adalah faktor yang sangat menentukan, karena air minum selalu dikonsumsi oleh masyarakat tiap harinya. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup air bersih, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya. Dalam publikasi Statistik Kesra BPS disebutkan bahwa yang dimaksud air bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat.

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni adalah air sungai, sumur terlindung, mata air terlindung, sumur tak terlindung, sumur bor/pompa, air hujan, air kemasan, dan lainnya. Air hujan merupakan sumber air minum utama bagi sebagian besar penduduk Kabupaten Teluk Bintuni.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air hujan pada tahun 2014 adalah sebesar 29,28 persen. Rumah tangga yang sumber air minumnya menggunakan sumur terlindung dan sumur bor/pompa masing-masing adalah sebesar 18,74 dan 14,66 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur tak terlindung sebagai sumber air minum adalah sebesar 3,74 persen, mata air terlindung sebesar 1,02 persen, air sungai sebesar 2,62 persen, air kemasan sebesar 3,12 persen, dan sumber lainnya sebesar 0,04 persen.

Tabel 2.39 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Air untuk Minum, 2014

Sumur terlindung	18,74
Sumur tak terlindung	3,74
Mata air terlindung	1,02
Sungai	2,62
Sumur borpompa	14,66
Air hujan	29,28
Air kemasan	3,12
Lainnya	0,04

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sistem pembuangan kotoran/tinja manusia juga sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit khususnya penyakit saluran pencernaan. Berdasarkan fasilitas tempat buang air besar pada tahun 2014, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki tempat buang air besar sendiri dengan persentase sebesar 61,36 persen, sedangkan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar adalah sebesar 8,93 persen. Menurut jenis klosetnya, jenis leher angsa merupakan jenis kloset yang paling banyak digunakan rumah tangga dengan persentase sebesar 85 persen. Sementara yang menggunakan jenis kloset plengsengan sebesar 10 persen dan yang menggunakan jenis kloset lainnya sebesar 5 persen.

Tabel 2.40 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset, 2014

Uraian	Persentase (%)
Leher angsa	85,00
Plengsengan	10,00
Lainnya	5,00
Jumlah	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

2.1.3.5. Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal penataan ruang telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012-2032. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni berisi mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang baik dari sisi struktur ruang maupun pola ruang. Dalam rencana mengenai struktur ruang, terdapat rencana pengembangan sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi (darat, laut, dan udara), rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan, rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, pengembangan sistem prasarana permukiman dan pengelolaan lingkungan, dan rencana pengembangan sarana wilayah (pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, dan kebudayaan dan rekreasi).

Sementara itu, untuk rencana pola ruang Kabupaten Teluk Bintuni terdiri atas rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung berisi mengenai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam, sedangkan rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri atas klasifikasi kawasan budidaya, kriteria kawasan budidaya, dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Dalam RTRW, juga ditetapkan mengenai kawasan strategis di Kabupaten Teluk Bintuni yang menjelaskan mengenai kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten (strategis pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi dan daya

lingkungan hidup). Lebih lanjut, RTRW juga menjelaskan mengenai arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Teluk Bintuni.

2.1.3.6. Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016-2036 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dengan berpedoman pada RPJPN serta memperhatikan RPJMN. RPJPD Kabupaten Teluk Bintuni merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati. Tahapan pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Teluk Bintuni dibagi ke dalam 4 tahap yaitu RPJMD I (2016-2021), RPJMD II (2021-2026), RPJMD III (2027-2031), dan RPJMD IV (2031-2036).

Bersamaan dengan disusunnya RPJPD Kabupaten Teluk Bintuni, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap I. RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai (a) Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD dan (b) Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD. Selama periode 2011-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan

Bupati (Perbup). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2011-2016 juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD.

2.1.3.7. Perhubungan

Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lain. Masyarakat memerlukan alat transportasi darat untuk memenuhi kebutuhan mobilitas antar kampung, ke ibukota distrik, ibukota kabupaten, ataupun ibukota provinsi. Untuk mobilitas antar distrik, penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan transportasi darat jika wilayah yang akan dituju telah terhubung dengan jaringan jalan. Infrastruktur wilayah terutama jaringan jalan dan transportasi lainnya menunjukkan adanya keterkaitan kuat dengan wilayah tetangga, yaitu Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi.

Dalam RTRW Kabupaten Teluk Bintuni, jaringan jalan arteri primer meliputi ruas jalan batas Kabupaten Sorong - Teluk Bintuni; ruas jalan batas Kabupaten Manokwari - Teluk Bintuni; ruas jalan batas Kabupaten Teluk Wondama - Teluk Bintuni; ruas jalan Kukurkek - Ayawasi - batas Kabupaten Manokwari; dan ruas jalan Manimeri - Bintuni - Tembuni - Aranday - Mayado - Moskona Barat. Sedangkan jaringan jalan kolektor primer adalah ruas jalan Moskona Barat - Moskona Selatan - Moskona Utara; ruas jalan Mayado - Aranday; ruas jalan Distrik Farfuwar - Distrik Kitaro; dan ruas jalan Distrik Kitaro - Distrik Kuri. Rencana jaringan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah: ruas jalan Bintuni - Horna; ruas jalan Aranday - Bintuni; ruas jalan Aranday - Meyado - ke Tembuni; ruas jalan Merdey - Jagiro, Moskona Utara - Moskona Barat; ruas jalan Saengga Tanah Merah (LNG Tangguh) Tofui - Babo - Fruata; ruas jalan Fruwata - Mandiwa; dan ruas jalan Mandiwa - Idoor.

Dengan terus berkembangnya jaringan jalan maupun peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Teluk Bintuni baik yang menghubungkan antar distrik maupun ke wilayah kabupaten/kota sekitar, maka aktivitas ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni melalui penggunaan transportasi darat akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Pada dasarnya terminal berfungsi sebagai tempat persinggahan kendaraan/angkutan umum yang juga berfungsi mengatur pergerakan orang dan barang. Jaringan prasarana lalu lintas di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut: (1) terminal penumpang tipe B terdapat di Distrik Bintuni Barat, Tembuni, dan Farfuwar; dan (2) terminal penumpang tipe C terdapat di Distrik Meyado, Merdey, Jagiro, Moskona Barat, dan Aranday.

Transportasi laut mempunyai peranan sangat penting pada perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. Sebagian besar mobilitas orang dan barang di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni masih menggunakan moda transportasi laut. Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu pelabuhan umum terdapat di Distrik Bintuni Barat, Distrik Manimeri, Distrik Babo, Distrik Aranday, Distrik Wariagar, Distrik Tomu (Sebyar), Distrik Kamundan, Distrik Kaitaro, Distrik Kuri dan Distrik Tofoi (Sumuri). Sementara itu, alur pelayaran yaitu berupa alur pelayaran lokal, terdiri atas: Bintuni - Babo; dan Bintuni – pusat kegiatan lain di Kabupaten Teluk Bintuni. Selama periode 2010-2015, jumlah kunjungan kapal di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami peningkatan dari sebanyak 491 unit kapal pada tahun 2010 menjadi sebanyak 152 unit kapal pada tahun 2015.

Tabel 2.41 Jumlah dan Penumpang Kapal di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunjungan Kapal	491	681	651	676	368	152
Penumpang Datang	6.603	8.912	1.620	3.484	4.041	8.814
Penumpang Pergi	7.060	6.714	1.129	2.403	1.992	5.685
Jumlah	13.663	15.626	2.749	5.887	6.033	14.499

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Berbeda dengan kunjungan kapal yang mengalami penurunan cukup signifikan, jumlah penumpang kapal selama periode tersebut justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah penumpang kapal adalah sebanyak 13.663 penumpang, kemudian meningkat menjadi sebanyak 15.626 penumpang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012, jumlah penumpang berkurang secara signifikan hingga hanya menjadi sebanyak 2.749 penumpang, namun dalam 3 tahun terakhir jumlah penumpang kapal mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2015 menjadi sebanyak 14.499 penumpang.

Transportasi udara yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat 2 jenis bandara yaitu bandara regional dan lokal. Bandara regional di Distrik Bintuni Barat dan Babo, sedangkan bandara lokal di Distrik Meyado, Merdey, Moskona Barat, Moskona Timur, Moskona Utara, Moskona Selatan, Jagiro, Masyeta, Dataran Beimes (Horna), dan Farfuwar. Jalur penerbangan komersial melayani : Bintuni – Manokwari, Bintuni – Sorong, Bintuni – Fak-fak. Angkutan udara menjadi salah satu alternatif mobilitas barang dan penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni mengingat kondisi geografis Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berupa hutan yang luas. Untuk mobilisasi penduduk yang membutuhkan kecepatan di tingkat Provinsi Papua Barat maupun nasional, penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan transportasi udara melalui Bandara Bintuni dan Babo.

Tabel 2.42 Jumlah dan Penumpang Pesawat di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunjungan Kapal	1.018	1.456	3.815	4.010	3.988	4.040
Penumpang Datang	4.750	5.536	25.659	29.937	29.104	30.899
Penumpang Pergi	3.523	6.275	27.152	32.906	33.632	34.125
Jumlah	8.273	11.811	52.811	62.843	62.736	65.024

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Selama periode 2010-2015 jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami peningkatan yang signifikan dari hanya sebanyak 509 keberangkatan dan kedatangan pada tahun 2010 menjadi sebanyak

2.022 keberangkatan dan 2.018 kedatangan pada tahun 2015. Peningkatan kunjungan pesawat di Kabupaten Teluk Bintuni juga disertai peningkatan jumlah penumpang pesawat yang signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, jumlah penumpang pesawat di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 8.273 penumpang (4.750 penumpang datang dan 3.523 penumpang pergi) dan pada tahun 2015 jumlah penumpang keseluruhan meningkat menjadi sebanyak 65.024 penumpang (30.899 penumpang datang dan 34.125 penumpang pergi).

2.1.3.8. Lingkungan Hidup

Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni adalah paling sedikit 30 persen dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20 persen dan RTH privat 10 persen. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Proporsi 30 persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota/ kawasan perkotaan. Adapun beberapa Distrik yang termasuk kawasan perkotaan dan harus memenuhi proporsi 30 persen dari luas wilayahnya, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 19.086,48 ha yang tersebar di 24 Distrik. Dari luasan wilayah perkotaan tersebut yang termasuk ruang terbuka hijau kota adalah 30 persen yaitu seluas 5.725,94 ha yang tersebar di 24 Distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 persen dan privat 10 persen yang disediakan dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya,

sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi RTH di kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, maka pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Selain menetapkan kawasan ruang terbuka hijau, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menetapkan kawasan cagar alam di Kabupaten Teluk Bintuni. Cagar Alam Teluk Bintuni ditetapkan dengan pengukuhan terakhir dengan SK Menhut No. 891/Kpts-II/1999 dengan luasan 124.850 Ha. Kawasan cagar alam yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat dua kawasan cagar alam yaitu (a) kawasan Cagar Alam Teluk Bintuni yang berada di sekitar Distrik Wamesa dan (b) Kawasan Cagar Alam Wagura Kote yang berada di sekitar Distrik Babo.

2.1.3.9. Pertanian

Pola kepemilikan lahan di Provinsi Papua Barat khususnya Kabupaten Teluk Bintuni terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau *ondoafi*. Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Tanah *milik*, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu.
- Tanah *milik dengan hak pakai*, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seijin kepala adat untuk digarap sesuai dengan perjanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya tanah milik dan tanah milik dengan hak pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal ini dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih

berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Di samping itu juga, mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, Tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

2.1.3.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yang berkaitan dengan hak warga sipil (*citizen right*) untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Pada tahun 2011, banyaknya surat nikah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 330 surat yang diterbitkan untuk penduduk di 18 distrik dengan surat nikah terbanyak berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 222 surat. Jumlah surat nikah yang dikeluarkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 258 surat, kemudian berkurang menjadi sebanyak 190 surat pada tahun 2013, dan pada tahun 2015, jumlah surat nikah yang dikeluarkan adalah sebanyak 310 surat. Dari 310 surat nikah tersebut, 165 surat dikeluarkan untuk penduduk di Distrik Bintuni, 99 surat nikah untuk Distrik Aranday, dan 46 surat nikah untuk Distrik Aroba.

Tabel 2.43 Banyaknya Surat Nikah Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Distrik	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Farfurwar	5	-	2	-	-
2.	Babo	62	58	1	-	-
3.	Sumuri	2	11	17	-	-
4.	Aroba	-	1	2	61	46
5.	Kaitaro	-	-	3	-	-
6.	Kuri	2	-	3	-	-
7.	Wamesa	1	-	56	-	-
8.	Bintuni	222	171	61	135	165
9.	Manimeri	17	8	12	-	-
10.	Tuhiba	3	-	3	-	-

No.	Distrik	2011	2012	2013	2014	2015
11.	Dataran Beimes	2	-	-	-	-
12.	Tembuni	1	-	2	-	-
13.	Aranday	-	2	-	14	99
14.	Tomu	1	-	-	-	-
15.	Kamundan	-	-	-	-	-
16.	Weriagar	1	-	-	-	-
17.	Moskona Selatan	3	-	2	-	-
18.	Meyado	1	2	10	-	-
19.	Moskona Barat	1	-	1	-	-
20.	Merdey	-	2	11	-	-
21.	Biscoop	1	-	3	-	-
22.	Masyeta	1	-	1	-	-
23.	Moskona Utara	4	1	-	-	-
24.	Moskona Timur	-	2	-	-	-
Jumlah		330	258	190	210	310

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Selain menerbitkan surat nikah untuk penduduk, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menerbitkan akte kelahiran. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah mengantisipasi ketersediaan informasi kependudukan yang berkualitas untuk keperluan penyusunan laporan kependudukan setiap tahunnya, mengingat penambahan penduduk yang meningkat setiap tahun baik karena kelahiran maupun migrasi. Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2010 adalah sebanyak 2.905 akte yang tersebar di seluruh distrik. Pada tahun 2013, jumlah akte kelahiran yang diterbitkan adalah sebanyak 2.918 akte. Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2013 paling banyak berada di Distrik Bintuni dengan jumlah sebanyak 1.296 akte.

Tabel 2.44 Banyaknya Akte Kelahiran Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2017-2021

No.	Distrik	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Farfurwar	22	35	26	-	...
2.	Babo	136	139	161	21	...
3.	Sumuri	236	381	299	17	...
4.	Aroba	52	60	94	-	...
5.	Kaitaro	43	45	41	-	...
6.	Kuri	29	17	15	6	...
7.	Wamesa	94	41	82	-	...
8.	Bintuni	1.182	1.264	1.389	553	...
9.	Manimeri	331	367	375	351	...
10.	Tuhiba	32	59	42	21	...
11.	Dataran Beimes	25	34	18	-	...
12.	Tembuni	40	28	30	14	...
13.	Aranday	207	34	51	2	...
14.	Tomu	71	90	44	-	...
15.	Kamundan	11	41	325	67	...
16.	Weriagar	55	40	69	-	...
17.	Moskona Selatan	59	54	32	-	...
18.	Meyado	46	70	80	25	...
19.	Moskona Barat	15	32	14	-	...
20.	Merdey	26	23	17	5	...
21.	Biscoop	13	20	22	-	...
22.	Masyeta	17	28	10	-	...
23.	Moskona Utara	24	26	37	-	...
24.	Moskona Timur	24	14	18	-	...
Jumlah		2.790	1.643	3.291	1.082	...

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2022

Kartu keluarga merupakan salah satu dokumen prasyarat yang diperlukan bagi penduduk untuk mengakses layanan formal yang diberikan oleh pemerintah. Selama periode 2010-2017, jumlah kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 20.930 KK. Pada tahun 2010, jumlah kartu keluarga yang diterbitkan adalah sebanyak 3.819 KK, kemudian meningkat menjadi sebanyak 7.153 KK pada tahun 2011, dan pada tahun 2013,

jumlah kartu yang diterbitkan sebanyak 3.676 KK. Dengan banyaknya penduduk yang bermukim di Distrik Bintuni, maka jumlah kartu keluarga yang diterbitkan pun paling banyak berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 10.959 KK, disusul Distrik Manimeri sebanyak 3.355 KK, dan Distrik Sumuri sebanyak 2.000 KK.

Tabel 2.45 Banyaknya Kartu Keluarga Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017

No.	Distrik	2010	2011	2012	2013	2017
1.	Farfurwar	4	386	26	1	11
2.	Babo	25	76	95	32	73
3.	Sumuri	83	400	899	618	395
4.	Aroba	92	115	97	107	120
5.	Kaitaro	72	30	36	17	30
6.	Kuri	277	32	32	11	17
7.	Wamesa	113	81	12	50	38
8.	Bintuni	1.894	3.834	3.416	1.815	1.807
9.	Manimeri	373	1.361	1.020	601	347
10.	Tuhiba	75	21	60	91	31
11.	Dataran Beimes	8	45	27	47	19
12.	Tembuni	25	38	85	25	22
13.	Aranday	85	15	37	14	38
14.	Tomu	70	120	147	83	53
15.	Kamundan	142	155	5	23	10
16.	Weriagar	85	261	38	44	40
17.	Moskona Selatan	56	37	28	13	30
18.	Meyado	170	29	60	22	58
19.	Moskona Barat	11	26	31	4	12
20.	Merdey	11	18	45	5	53
21.	Biscoop	3	2	29	10	19
22.	Masyeta	1	5	10	6	24
23.	Moskona Utara	106	39	19	13	14
24.	Moskona Timur	38	27	28	24	25
Jumlah		3.819	7.153	6.282	3.676	3.286

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Terkait dengan pencatatan administrasi penduduk, hingga akhir tahun 2013, jumlah KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni adalah

sebanyak 33.306 KTP. Selain peran aktif pemerintah melalui sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP yang belum cukup memadai. Kendala yang terjadi di lapangan ketika perekaman e-KTP adalah medan yang dilalui sangat berat dengan biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Bahkan jika sampai ke wilayah kampung, masyarakat setempat tidak pernah ada karena mereka sedang mencari makan di hutan. Mempelajari masalah dan kendala yang terjadi di lapangan tersebut, Dukcapil Kabupaten Teluk Bintuni harus mempunyai strategi khusus untuk peningkatan jumlah perekaman e-KTP yaitu ketika sedang ada event pemerintah dimana masyarakat berkumpul maka petugas perekaman akan membawa alat perekaman dan melakukan perekaman e-KTP atau Dukcapil menempatkan petugas di rumah sakit.

Tabel 2.46 Banyaknya Kartu Tanda Penduduk Yang Dikeluarkan Menurut Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017

No.	Distrik	2010	2011	2012	2013	2017
1.	Farfurwar	364	61	19	11	69
2.	Babo	764	90	66	67	114
3.	Sumuri	1.786	201	200	86	316
4.	Aroba	931	29	21	38	158
5.	Kaitaro	42	110	163	40	38
6.	Kuri	146	117	24	9	32
7.	Wamesa	241	27	25	24	58
8.	Bintuni	13.508	1.225	1.604	1.996	2.394
9.	Manimeri	2.797	390	371	442	565
10.	Tuhiba	432	13	49	31	45
11.	Dataran Beimes	101	74	90	36	15
12.	Tembuni	235	50	27	46	52
13.	Aranday	220	11	15	21	79
14.	Tomu	658	35	47	34	118
15.	Kamundan	313	11	7	2	30
16.	Weriagar	329	36	16	42	60
17.	Moskona Selatan	135	46	25	22	83
18.	Meyado	435	46	28	34	71
19.	Moskona Barat	137	22	56	57	25
20.	Merdey	140	33	14	18	29
21.	Biscoop	204	16	18	47	19

No.	Distrik	2010	2011	2012	2013	2017
22.	Masyeta	129	27	7	2	21
23.	Moskona Utara	99	71	26	46	26
24.	Moskona Timur	157	30	151	12	44
Jumlah		24.303	2.771	3.069	3.163	4.462

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

2.1.3.11. Keluarga Berencana

Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membatasi angka pertumbuhan penduduk. Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga pada umumnya serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran.

Klinik KB

Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membatasi angka pertumbuhan penduduk. Selama periode 2012-2015, jumlah PPKBD di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan dari sebanyak 46 PPKBD pada tahun 2012 menjadi hanya sebanyak 26 PPKBD pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah klinik KB di Kabupaten Teluk Bintuni justru mengalami peningkatan dari sebanyak 38 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 48 unit pada tahun 2015. Dari 48 unit klinik KB tersebut, 44 unit klinik KB dikelola oleh Dinas Kesehatan, sedangkan 4 klinik KB lainnya dikelola oleh pihak swasta. Jika dirinci menurut perseberannya, seluruh distrik di Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki PPKBD dan klinik KB.

Tabel 2.47 Perkembangan PPKBD dan Klinik KB di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015

Uraian	2012	2013	2014	2015
PPKBD	46	26	26	26
Klinik KB	38	31	48	48

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Akseptor Aktif dan Baru

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor aktif di Kabupaten Teluk Bintuni adalah IUD, pil, suntikan, kondom, dan susuk. Selama periode 2012-2015, jumlah akseptor aktif di Kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif walaupun dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah akseptor aktif di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 6.298 akseptor, kemudian meningkat menjadi sebanyak 8.880 akseptor pada tahun 2014, namun pada tahun 2015, jumlah akseptor aktif mengalami penurunan menjadi sebanyak 8.810 akseptor. Peningkatan jumlah akseptor tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah cukup berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya keluarga berencana.

Tabel 2.48 Perkembangan Jumlah Akseptor Aktif di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015

Tahun	Akseptor
2012	6.298
2013	7.718
2014	8.880
2015	8.810

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015, jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor aktif adalah suntikan dengan jumlah sebanyak 7.231 akseptor, alat kontrasepsi selanjutnya yang paling banyak digunakan adalah susuk yaitu sebanyak 897 akseptor. Jumlah akseptor yang menggunakan kontrasepsi IUD sebanyak 256 akseptor, pil sebanyak 254 akseptor, dan kondom sebanyak 202 akseptor. Akseptor aktif di Kabupaten Teluk Bintuni tersebar di seluruh distrik dengan distrik yang memiliki jumlah akseptor aktif terbanyak adalah Distrik Bintuni yaitu sebanyak 4.344 akseptor dan Distrik Manimeri sebanyak 2.076 akseptor. Alat kontrasepsi IUD hanya digunakan oleh akseptor aktif di 22 dengan Distrik Bintuni dan Manimeri memiliki akseptor IUD sebanyak 127 dan 38 akseptor, sedangkan distrik yang tidak memiliki akseptor IUD adalah Distrik Dataran Beimes dan

Aranday. Alat kontrasepsi pil digunakan akseptor di 17 distrik dengan akseptor terbanyak berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 98 akseptor, disusul oleh Distrik Manimeri sebanyak 70 akseptor. Suntikan sebagai jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor aktif tersebar di seluruh distrik dengan akseptor terbanyak yang menggunakan suntikan juga berada di Distrik Bintuni dan Manimeri yaitu masing-masing sebanyak 3.775 dan 1.795 akseptor. Kondom digunakan di 5 distrik yaitu Distrik Bintuni (164 akseptor), Manimeri (28 akseptor), Aroba (5 akseptor), Sumuri (3 akseptor), dan Aranday (2 akseptor). Sementara itu, susuk digunakan di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel 2.49 Jumlah Akseptor Aktif Menurut Pemakaian Kontrasepsi, 2015

Jenis Kontrasepsi	Jumlah	Persentase (%)
IUD	256	2,90
Pil	254	2,87
Suntikan	7.231	81,80
Kondom	202	2,29
Susuk	897	10,15

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

Walaupun telah terjadi peningkatan akseptor aktif, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus menggalakkan pemakaian alat kontrasepsi kepada penduduk untuk menekan pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 2015, tercatat jumlah akseptor bertambah sebanyak 1.207 akseptor. Distrik yang memiliki jumlah akseptor baru terbanyak adalah Distrik Bintuni (503 akseptor), Sumuri (76 akseptor), dan Tomu (69 akseptor). Jenis kontrasepsi yang digunakan oleh akseptor baru pada tahun 2015 terdiri atas suntikan sebanyak 479 akseptor, pil sebanyak 207 akseptor, kondom sebanyak 107 akseptor, susuk sebanyak 269 akseptor, IUD sebanyak 74 akseptor, dan jenis lainnya sebanyak 73 akseptor.

Tabel 2.50 Jumlah Akseptor Baru Menurut Distrik dan Alat Kontrasepsi, 2015

No.	Distrik	IUD	Pil	Suntikan	Kondom	Susuk	Lainnya	Jumlah
1.	Farfurwar	-	5	8	-	2	-	15

No.	Distrik	IUD	Pil	Suntikan	Kondom	Susuk	Lainnya	Jumlah
2.	Babo	2	18	5	15	9	-	49
3.	Sumuri	3	9	36	5	23	-	76
4.	Aroba	2	14	12	3	2	-	33
5.	Kaitaro	-	5	19	-	1	-	25
6.	Kuri	-	6	24	-	2	-	32
7.	Wamesa	-	7	28	-	18	-	53
8.	Bintuni	50	52	120	82	129	70	503
9.	Manimeri	10	12	21	-	20	3	66
10.	Tuhiba	1	6	7	-	11	-	25
11.	Dataran Beimes	-	2	3	-	-	-	5
12.	Tembuni	1	8	30	-	3	-	42
13.	Aranday	-	15	22	2	2	-	41
14.	Tomu	-	6	55	-	8	-	69
15.	Kamundan	-	8	22	-	1	-	31
16.	Weriagar	-	10	31	-	6	-	47
17.	Moskona Selatan	-	2	9	-	3	-	14
18.	Meyado	5	12	21	-	20	-	58
19.	Moskona Barat	-	1	-	-	3	-	4
20.	Merdey	-	2	5	-	2	-	9
21.	Biscoop	-	1	1	-	1	-	3
22.	Masyeta	-	2	-	-	1	-	3
23.	Moskona Utara	-	2	-	-	1	-	3
24.	Moskona Timur	-	2	-	-	1	-	3
Jumlah		74	207	479	107	269	73	1.209

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Pasangan Usia Subur

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2011-2015 cenderung fluktuatif walaupun sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah pasangan usia subur adalah sebanyak 10.096 PUS, kemudian meningkat menjadi sebanyak 14.272 akseptor pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 berkurang menjadi sebanyak 10.545 PUS. Jika dirinci menurut distrik pada

tahun 2015, maka distrik yang memiliki PUS tertinggi adalah Distrik Bintuni yaitu sebanyak 2.780 pasangan, diikuti Distrik Manimeri sebanyak 1.766 pasangan, dan Distrik Aroba sebanyak 978 pasangan. Jika jumlah akseptor dibandingkan dengan per 100 PUS, rasio tertinggi berada Distrik Wamesa yaitu sebesar 300, diikuti Distrik Tembuni sebesar 235,65, dan Distrik Bintuni sebesar 158,71. Sementara itu, tiga distrik dengan rasio terendah adalah Distrik Biscoop (4,78), Farfurwar (6,05), dan Dataran Beimes (8,20).

Tabel 2.51 Jumlah PUS dan Akseptor Aktif Menurut Distrik, 2015

No.	Distrik	PUS	Akseptor Aktif	Jumlah Peserta Per 100 PUS
1.	Farfurwar	595	36	6,05
2.	Babo	209	45	21,53
3.	Sumuri	712	117	16,43
4.	Aroba	978	538	55,01
5.	Kaitaro	169	50	29,59
6.	Kuri	170	54	31,76
7.	Wamesa	108	324	300,00
8.	Bintuni	2.780	4.412	158,71
9.	Manimeri	1.766	2.078	117,67
10.	Tuhiba	114	148	129,82
11.	Dataran Beimes	122	10	8,20
12.	Tembuni	115	271	235,65
13.	Aranday	191	186	97,38
14.	Tomu	287	135	47,04
15.	Kamundan	171	47	27,49
16.	Weriagar	262	184	70,23
17.	Moskona Selatan	112	21	18,75
18.	Meyado	905	123	13,59
19.	Moskona Barat	121	15	12,40
20.	Merdey	132	26	19,70
21.	Biscoop	209	10	4,78
22.	Masyeta	15	19	126,67
23.	Moskona Utara	123	13	10,57
24.	Moskona Timur	179	18	10,06
Jumlah		10.545	8.880	84,21

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.3.12. Sosial

Pembangunan bidang sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumberdaya manusia di bidang sosial yang sebaik-baiknya serta menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, pada gerak langkahnya senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka perkembangannya penyandang masalah kesejahteraan sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer.

Perlindungan dan tingkat kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, dan bencana sosial. Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terisolasi.

Penyandang Masalah Sosial

Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni yang menderita tuna rungu pada tahun 2015 adalah sebanyak 13 orang, tuna rung/wicara sebanyak 9 orang, dan tuna daksa sebanyak 28 orang. Penyandang masalah sosial di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dibagi ke dalam 4 golongan yaitu anak terlantar, lansia/jompo, wanita rawan sosial ekonomi, dan penyandang cacat. Jumlah anak terlantar di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2012-2015 cenderung meningkat dari sebanyak 720 orang pada tahun 2012 menjadi sebanyak 914 orang pada tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada lansia/jompo yang jumlahnya meningkat dari sebanyak 244 orang

pada tahun 2012 menjadi sebanyak 708 orang pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah wanita yang rawan secara sosial ekonomi bertambah dari sebanyak 80 orang pada tahun 2012 menjadi sebanyak 523 orang pada tahun 2015.

Tabel 2.52 Banyaknya Penyandang Masalah Sosial Menurut Jenis dan Distrik, 2015

No.	Distrik	Anak Terlantar	Lansia /Jompo	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Penyandang Cacat	Jumlah
1.	Farfurwar	45	15	26	11	97
2.	Babo	74	85	31	4	194
3.	Sumuri	101	62	64	11	238
4.	Aroba	50	21	29	6	106
5.	Kaitaro	-	17	8	5	30
6.	Kuri	-	21	-	5	26
7.	Wamesa	2	31	5	4	42
8.	Bintuni	50	61	80	101	292
9.	Manimeri	16	-	-	27	43
10.	Tuhiba	5	15	10	14	44
11.	Dataran Beimes	27	19	17	13	76
12.	Tembuni	16	22	11	14	63
13.	Aranday	44	28	30	10	112
14.	Tomu	76	51	42	7	176
15.	Kamundan	-	-	-	-	-
16.	Weriagar	-	13	18	3	34
17.	Moskona Selatan	50	24	13	11	98
18.	Meyado	41	59	24	10	134
19.	Moskona Barat	24	32	24	8	88
20.	Merdey	26	12	18	5	61
21.	Biscoop	37	22	11	16	86
22.	Masyeta	31	15	16	15	77
23.	Moskona Utara	101	59	46	14	220
24.	Moskona Timur	98	24	-	25	147
Jumlah		914	708	523	339	2.484

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Jika dirinci menurut distrik pada tahun 2015, penyandang masalah sosial terbanyak di Kabupaten Teluk Bintuni berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 292 kasus,

diikuti Distrik Sumuri sebanyak 238 kasus, dan Moskona Utara sebanyak 220 kasus. Permasalahan anak terlantar paling banyak berada di Distrik Sumuri dan Moskona Utara yaitu masing-masing sebanyak 101 kasus, sedangkan untuk kasus jompo/lansia paling banyak berada di Distrik Babo yaitu sebanyak 85 orang. Sementara itu, kasus wanita rawan sosial ekonomi tersebar di 20 distrik dengan kasus terbanyak berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 80 kasus.

Agama dan Kepercayaan

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa karena agama mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni memeluk berbagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Pada tahun 2015, persentase penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yang memeluk agama Islam adalah sebesar 36,74 persen, Kristen Protestan sebesar 34,67 persen, Katholik sebesar 28,51 persen, Hindu sebesar 0,04 persen, Budha sebesar 0,03 persen, dan Konhngucu sebesar 0,01 persen. Fasilitas tempat peribadatan yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni baik yang dibantu oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat adalah masjid, gereja protestan, gereja katolik. Jumlah masjid di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 72 unit, gereja Protestan sebanyak 171 unit, dan gereja Katolik sebanyak 30 unit.

Tabel 2.53 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Agama, 2021

Agama	Jumlah
Islam	39.920
Kristen	22.680
Katholik	17.400
Hindu	47

Budha	19
Lainnya	0

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.3.13. Ketenagakerjaan

Pembahasan mengenai aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu ulasan utama bagi pengambilan kebijakan-kebijakan ekonomi, karena aspek ketenagakerjaan merupakan aspek pokok dalam pembahasan kesejahteraan penduduk. Data ketenagakerjaan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, dan tentu saja sangat erat kaitannya dengan tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berbasis investasi mengakibatkan tidak adanya penyerapan tenaga kerja baru.

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan tenaga kerja dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Pertama, apakah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, apakah profil penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan penduduk muda. Jika suatu daerah memiliki struktur penduduknya didominasi usia muda, maka akan semakin banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja dan perlunya kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketiga, struktur ekonomi yang cenderung bukan *labour intensive* dan tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai membuat usaha penciptaan lapangan kerja baru semakin sulit dan kompleks.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2010, TPAK Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 75,40 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 69,96 persen pada tahun 2012, dan meningkat menjadi 71,12 persen pada tahun 2013. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015 yang dikumpulkan BPS setiap triwulan, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai level tertinggi yaitu sebesar 75,77 persen. Sedangkan 24,60 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 2.54 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017

Tahun	TPAK
2010	75,40
2011	73,70
2012	69,96
2013	71,12
2014	69,69
2015	75,77
2016	75,77
2017	92,38

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2015 sebesar 87,81 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 59,74 persen. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Teluk Bintuni adalah kaum laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Teluk Bintuni dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 2.55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, 2015-2017

Uraian	TPAK	
	2015	2017
Laki-laki	87,81	91,55
Perempuan	59,74	94,43
TPAK	75,77	92,38

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2010-2015, TPT Kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010, angka TPT di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 7 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 8,11 persen pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 menurun menjadi sebesar 6,10 persen. Angka TPT pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 6,22 persen dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi sebesar 8,25 persen.

Tabel 2.56 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2017

Tahun	TPT
2010	7,00
2011	8,11
2012	6,10
2013	6,22
2014	8,25
2015	6,87
2016	6,87
2017	7,62

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

TPT Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 adalah sebesar 6,87 persen, di mana perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 4,79 dan 11,72 persen. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah. Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni sendiri jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaannya banyak terserap pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dan sektor pertanian, perkebunan, perburuan dan kehutanan.

Tabel 2.57 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Teluk Bintuni, 2017

Uraian	TPT
Laki-laki	8,45
Perempuan	5,57
TPT	7,62

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Tingkat Kesempatan Kerja

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Mengingat data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan dengan banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari persentase penduduk yang bekerja dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia. Selama periode 2010-2015, tingkat kesempatan kerja penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan stagnan. Pada tahun 2010, tingkat kesempatan kerja penduduk adalah sebesar 93 persen dan pada tahun 2015 nilainya meningkat tipis menjadi sebesar 93,13 persen.

Tabel 2.58 Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2015

Tahun	TPT
2010	93,00
2011	91,89
2012	93,90
2013	93,78
2014	91,75
2015	93,13

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Dalam hal ini, seseorang dikategorikan bekerja apabila dia melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu porsi penduduk yang termasuk angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja. TKK Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 mencapai 93,13 persen. Tingginya kesempatan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni disebabkan karena sektor pertanian yang menjadi salah lapangan usaha utama penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi tanpa adanya persyaratan ketrampilan atau pendidikan khusus. Jika dilihat dari sisi gender, dapat dilihat bahwa TKK laki-laki dengan TKK perempuan nilainya tidak berbeda terlalu jauh, yaitu masing-masing sebesar 95,61 dan 88,28 persen. Hal ini menegaskan bahwa dalam hal ketenagakerjaan partisipasi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan seimbang.

Tabel 2.59 Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

Uraian	TKK
Laki-laki	95,61
Perempuan	88,28
TPT	93,13

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.3.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Jumlah Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin

banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Pada tahun 2015, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 7 unit koperasi. Jenis koperasi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah KSP yang berjumlah 2 unit dan koperasi serba usaha sebanyak 5 unit. Jika dibandingkan tahun 2014, terdapat peningkatan jumlah koperasi aktif dari sebelumnya sebanyak 4 unit. Dengan masih minimnya koperasi aktif di Kabupaten Teluk Bintuni, maka pemerintah daerah hendaknya kembali menggalakkan koperasi di masing-masing distrik mengingat hanya beberapa distrik saja yang memiliki koperasi diantaranya Distrik Babo (1 unit), Kaitaro (1 unit), Tomu (1 unit), Weriagar (1 unit), Moskona Selatan (2 unit), dan Moskona Barat (1 unit).

Tabel 2.60 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis, 2015

Jenis Koperasi	Jumlah
KSP	2
KSU	5
Jumlah	7

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Usaha Kecil Menengah

Jenis usaha kecil di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu usaha di bidang pengolahan pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia dan bahan bangunan, dan logam dan jasa. Secara keseluruhan, jumlah usaha kecil tersebut pada tahun 2012 adalah sebanyak 101 unit. Jumlah industri pengolahan pangan skala kecil pada tahun 2012 adalah sebanyak 21 unit, industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 36 unit, industri logam dan jasa sebanyak 35 unit, industri sandang dan kulit sebanyak 8 unit, dan industri kerajinan umum sebanyak 1 unit.

Tabel 2.61 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi di Sektor Industri Kecil Menurut Jenis, 2017

No.	Industri Kecil	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp)
1.	Jenis Industri Kecil	21	24	1.275.035.000
2.	Pengolahan Pangan	8	19	76.205.000
3.	Sandang dan Kulit	1	3	4.000.000
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	36	57	262.300.000
5.	Logam dan Jasa	35	45	478.585.000
Jumlah		101	148	2.096.125.000

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018

Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri kecil tersebut pada tahun 2012 adalah sebanyak 148 orang. Jenis industri kecil yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri kecil kimia dan bahan bangunan yaitu sebanyak 57 orang, disusul industri logam dan jasa sebanyak 45 orang, dan industri pengolahan pangan sebanyak 24 orang. Sementara itu, jika dilihat dari nilai produksi, industri pengolahan pangan menyumbang nilai produksi terbesar yaitu sebesar Rp 1,28 miliar, disusul industri logam dan jasa sebesar Rp 478,59 juta, dan industri kimia dan bahan bangunan sebesar Rp 262,30 juta.

2.1.3.15. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan dari sebanyak 1.922 PNS pada tahun 2011 menjadi sebanyak 2.433 PNS pada tahun 2015. Jumlah PNS laki-laki di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.405 jiwa dan PNS perempuan berjumlah sebanyak 1.028 jiwa. Jika dirinci menurut golongan, PNS yang berada di golongan I sebanyak 72 orang, PNS golongan II sebanyak 1.180 orang, PNS golongan III sebanyak 1.064 orang, dan PNS golongan IV sebanyak 117 orang.

Tabel 2.62 Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	65	7	72
II	628	552	1.180
III	629	435	1.064
IV	83	34	117
Jumlah	1.405	1.028	2.433

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.3.16. Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bekerjasama dengan BPS Kabupaten Teluk Bintuni telah merangkum statistik Kabupaten Teluk Bintuni dalam Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka. Selama periode 2011-2016, rangkuman statistik tersebut selalu tersedia. Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka secara umum merangkum statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Buku tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Teluk Bintuni dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan pembangunan. Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyediakan Statistik Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Terkait dengan aktivitas ekonomi, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Teluk Bintuni baik menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Selama periode 2011-2015, buku-buku tersebut selalu tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kabupaten Teluk Bintuni.

Tabel 2.63 Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2016

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015	2016

1.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2017

2.1.3.17. Komunikasi dan Informatika

Layanan komunikasi tertulis melalui kantor pos di Kabupaten Teluk Bintuni berada di 2 distrik yaitu Distrik Babo dan Bintuni. Untuk layanan surat, jenis layanan yang diakses masyarakat melalui kantor pos adalah layanan jasa surat kilat dan kilat khusus. Pada tahun 2015, jumlah surat yang dikirim melalui dua kantor pos tersebut adalah sebanyak 3.514 surat yang terdiri atas layanan kilat sebanyak 32 surat dan layanan kilat khusus sebanyak 3.482 surat. Sementara jumlah surat yang diterima pada dua kantor pos tersebut pada tahun 2015 adalah sebanyak 13.723 surat yang terdiri atas layanan surat kilat sebanyak 2.810 surat dan layanan kilat khusus sebanyak 10.913 surat. Selain pelayanan surat, kantor pos di Kabupaten Teluk Bintuni juga menyediakan layanan paket pos baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah paket pos yang dikirim dengan dengan tujuan dalam negeri pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.225 paket, sedangkan paket pos yang diterima sebanyak 3.605 paket. Sementara itu, untuk layanan tujuan luar negeri, jumlah paket yang diterima pada tahun 2015 adalah sebanyak 13 paket.

Tabel 2.64 Banyaknya Surat Yang Dikirim dan Diterima, 2013-2015

Tahun	Surat Dikirim	Surat Diterima
2013	16.715	17.214
2014	198	10.755
2015	3.514	13.723

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Untuk jenis komunikasi telepon, jumlah sentral telepon di Kabupaten Teluk Bintuni berada di Distrik Bintuni dengan sentral otomatis sebanyak 1 unit dan kapasitas otomatis sebanyak 300. Kapasitas pelanggan sentral telepon tersebut pada tahun 2015 adalah sebanyak 150 pelanggan yang terdiri atas kelompok bisnis sebanyak 20 pelanggan dan kelompok residen sebanyak 130 pelanggan. Layanan komunikasi VSAT di Kabupten Teluk Bintuni pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 20 unit yang tersebar di 6 distrik yaitu Distrik Bintuni (9 unit), Manimeri (7 unit), dan Babo, Aroba, Tuhiba, dan Weriagar (masing-masing 1 unit). Untuk siaran radio di Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah sebanyak 1 siaran yang berada di Distrik Bintuni. Layanan warnet juga berada di Distrik Bintuni dengan jumlah warnet sebanyak 4 unit dan pelanggan keseluruhan sebanyak 7.536 orang.

2.1.3.18. Pertanian

Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi Kabupaten Teluk Bintuni. Di bidang ketenagakerjaan, sektor pertanian menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat. Selain itu, pentingnya sektor pertanian juga dilihat dari fungsinya sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian.

Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan talas. Luas lahan sawah di Kabupaten Teluk Bintuni dibagi ke dalam dua kelompok yaitu sawah irigasi dan tadah hujan. Luas lahan sawah irigasi teknis di Kabupaten Teluk Bintuni berada di Distrik Manimeri yaitu seluas 235 ha, sedangkan luas sawah irigasi setengah teknis berada di Distrik Tuhiba yaitu seluas 9 ha. Sawah tadah hujan di Kabupaten Teluk Bintuni berada di 3 distrik yaitu Distrik Tuhiba seluas 25 ha, Tembuni seluas 38 ha, dan Meyado seluas 10 ha. Selama periode 2011-2015, luas lahan sawah di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan mengalami penurunan.

Pada tahun 2011, luas panen sawah di Kabupaten Teluk Bintuni adalah seluas 320 ha, kemudian meningkat menjadi seluas 410 ha pada tahun 2013, namun pada tahun 2015, luasan sawah mengalami penurunan menjadi 306 ha. Dengan menurunnya luas panen sawah, produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni juga mengalami penurunan dari sebesar 1.440 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 1.063 ton pada tahun 2015. Penurunan produksi padi tersebut tentunya disebabkan adanya penurunan luas panen yang juga disertai dengan penurunan produktivitas padi. Pada tahun 2010, produktivitas lahan padi adalah sebesar 4,5 ton per ha dan pada tahun 2015 berkurang menjadi sebesar 3,47 ton per ha.

Tabel 2.65 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	320,00	1.440,00	4,50
2012	304,00	1.185,60	3,90
2013	410,00	1.626,50	3,97
2014	370,00	1.429,00	3,86
2015	306,00	1.063,00	3,47

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Jika dirinci menurut distrik pada tahun 2015, produksi padi terbesar berasal dari Distrik Manimeri yaitu sebesar 772,2 ton, diikuti Distrik Tembuni sebesar 212,8 ton, dan Tuhiba sebesar 55 ton. Distrik lain yang juga memiliki produksi padi adalah Distrik Meyado yaitu sebesar 23 ton. Untuk tanaman jagung, luas panennya juga mengalami penurunan dari seluas 104 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 50 ha pada tahun 2015. Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan produksi jagung dari sebesar 124,80 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 57 ton pada tahun 2015. Produksi jagung pada tahun 2015 terbesar di seluruh distrik dengan distrik yang menjadi produsen jagung terbesar adalah Distrik Manimeri yaitu sebesar 9 ton, disusul Distrik Bintuni sebesar 5,20 ton, dan Sumuri sebesar 4,80 ton.

Tabel 2.66 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	104,00	124,80	1,20
2012	64,00	76,80	1,20
2013	92,00	117,20	1,27
2014	60,00	78,45	1,31
2015	50,00	57,00	1,14

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Selama periode 2011-2015, luas panen kedelai di Kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, luas panen kedelai adalah seluas 29 ha, kemudian meningkat tajam menjadi seluas 116 ha pada tahun 2012, dan selama 3 tahun terakhir, luas panen kedelai tersebut mengalami penurunan setiap tahun hingga menjadi hanya seluas 27 ha pada tahun 2015. Jika luas panen mengalami penurunan, produksi kedelai dapat dikatakan mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 34,8 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 36,3 ton. Produksi kedelai tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2012 dengan produksi mencapai 174 ton. Produksi kedelai pada tahun 2015 berasal dari 5 distrik dengan produksi terbesar berasal dari Distrik Manimeri yaitu sebesar 18 ton, diikuti Distrik Tembuni sebesar 9,60 ton, dan Distrik Tuhiba sebesar 4,20 ton.

Tabel 2.67 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	29,00	34,80	1,20
2012	116,00	174,00	1,50
2013	85,00	134,00	1,58
2014	65,00	96,10	1,48
2015	27,00	36,30	1,34

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Luas panen kacang tanah di Kabupaten Teluk Bintuni juga mengalami penurunan dari luas panen tertinggi pada tahun 2011 seluas 21 ha menjadi seluas 10 ha pada tahun 2015. Penurunan luas panen tersebut juga mendorong penurunan produksi

kacang tanah dari sebesar 16,8ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 15ton pada tahun 2015. Namun dari sisi produktivitas, terjadi peningkatan produktivitas lahan dari sebesar 0,8 ton per ha pada tahun 2011 menjadi sebesar 1,5 ton per ha pada tahun 2015. Produksi kacang tanah di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 hanya berasal dari Distrik Tuhiba. Selama periode 2011-2015, luas panen kacang hijau di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan dari seluas 8 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 5 ha pada tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada produksi kacang hijau yang menurun dari sebesar 8,8ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 5,8ton pada tahun 2015. Terdapat 4 distrik yang menjadi produsen kacang hijau di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Distrik Tuhiba (2,4 ton), Manimeri (1,2 ton), Sumuri dan Meyado masing-masing sebesar 1,1 ton.

Tabel 2.68 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	21,00	16,80	0,80
2012	14,00	16,80	1,20
2013	16,00	21,40	1,34
2014	6,00	8,40	1,40
2015	10,00	15,00	1,50

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Tabel 2.69 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	8,00	8,80	1,10
2012	7,00	7,70	1,10
2013	7,00	8,20	1,17
2014	5,00	6,00	1,20
2015	5,00	5,80	1,16

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan utama di Kabupaten Teluk Bintuni jika dilihat dari sisi produksi. Luas panen ubi kayu di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan dari seluas 57 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 39

ha pada tahun 2015. Produksi ubi kayu di Kabupaten Teluk Bintuni mengikuti pola peningkatan atau penurunan luas panen, jika luas panen meningkat maka produksi juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Produksi ubi kayu pada tahun 2011 adalah sebesar 798ton dan mengalami penurunan menjadi sebesar 286 ton pada tahun 2015. Produksi ubi kayu di Kabupaten Teluk Bintuni tersebar di 23 distrik dengan produksi terbesar berada di Distrik Bintuni yaitu sebesar 45 ton, disusul Distrik Manimeri sebesar 38 ton, dan Distrik Moskona Selatan sebesar 30 ton. Sedangkan distrik yang tidak memiliki produksi ubi kayu pada tahun 2015 adalah Distrik Babo, Kuri, dan Biscoop.

Tabel 2.70 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	57,00	798,00	14,00
2012	35,00	315,00	9,00
2013	51,00	461,40	9,05
2014	35,00	295,50	8,44
2015	39,00	286,00	7,33

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Komoditas ubi jalar termasuk salah satu makanan utama pengganti beras yang sudah familiar baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat karena tanaman ubi jalar relatif mudah tumbuh pada kondisi yang beraneka ragam. Hal tersebut terlihat dimana komoditas ubi jalar diproduksi di seluruh distrik. Berbeda dengan komoditas tanaman pangan lain yang sebagian besar mengalami luas panen dan produksi, tanaman ubi jalar justru mengalami peningkatan luas panen dan produksi. Pada tahun 2011, luas panen ubi jalar adalah seluas 32 ha, kemudian meningkat tajam menjadi seluas 166 ha pada tahun 2013, namun pada tahun 2015, luas panennya mengalami penurunan menjadi seluas 74 ha. Dari sisi produksi, terjadi peningkatan produksi ubi jalar dari sebesar 288 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 549,50 ton pada tahun 2015. Distrik dengan produksi ubi jalar tertinggi adalah Distrik Sumuri

dan Tuhiba dengan produksi masing-masing sebesar 88 ton, diikuti Distrik Manimeri dengan produksi sebesar 80 ton.

Tabel 2.71 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2011	32,00	288,00	9,00
2012	34,00	187,00	5,50
2013	166,00	844,15	5,09
2014	80,00	746,00	9,33
2015	74,00	549,50	7,43

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

Luas panen talas pada tahun 2012 adalah seluas 29 ha, kemudian meningkat menjadi seluas 35 ha pada tahun 2013, dan selama 2 tahun terakhir luas panen mengalami penyusutan hingga menjadi hanya seluas 21 ha pada tahun 2015. Produksi talas pada tahun 2012 adalah sebesar 205,90 ton, kemudian meningkat hingga tahun 2014 menjadi sebesar 309 ton. Namun pada tahun 2015 ketika terjadi penurunan luas panen, produksi talas mengalami penurunan hingga level terendahnya yaitu sebesar 138 ton. Produksi talas pada tahun 2015 berasal dari 16 distrik dengan produksi terbesar berasal dari Distrik Manimeri yaitu sebesar 34 ton.

Tabel 2.72 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Talas di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2012	29,00	205,90	7,10
2013	35,00	250,20	7,15
2014	31,00	309,00	9,97
2015	21,00	138,00	6,57

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Tanaman Hortikultura

Usaha tanaman hortikultura yang dikembangkan oleh penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni sebagian besar masih dalam skala tradisional dan dilakukan dalam

rangka memenuhi kebutuhan subsistennya. Jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan penduduk meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Untuk sayuran, luas panennya selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan dari hanya seluas 183 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 529 ha pada tahun 2015. Dengan adanya peningkatan luas panen sayuran, maka produksi sayur juga mengalami peningkatan dari sebesar 175,20 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 671,20 ton pada tahun 2015.

Tabel 2.73 Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayuran di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	2011	183	175,20
2.	2012	799	921,80
3.	2013	688	1,019,40
4.	2014	650	851,80
5.	2015	529	671,20

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Jenis sayuran yang ditanam masyarakat adalah cabe rawit, kubis, petsai, kacang panjang, tomat, terong, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, dan semangka. Jika dilihat dari luas panen menurut jenis sayuran, petsai memiliki luas panen tertinggi yaitu seluas 87 ha, diikuti tomat dan bayam dengan luas panen masing-masing seluas 82 ha. Sementara itu, jika dilihat dari sisi produksi, komoditas petsai merupakan jenis sayur yang paling banyak diproduksi yaitu sebesar 129,20 ton, disusul kacang panjang sebesar 108,90 ton, tomat sebesar 99,30 ton, kangkung sebesar 88,20 ton, dan cabe rawit sebesar 82,70 ton. Kelima jenis sayuran yang paling banyak diproduksi tersebut tersebar hampir merata di seluruh distrik, sedangkan jenis sayuran yang lain hanya diproduksi di beberapa distrik. Sebagai contoh, kubis dengan produksi sebesar 20,6 ton hanya berasal dari 2 distrik yaitu Distrik Bintuni sebesar 8,4 ton dan Distrik Manimeri sebesar 12,2 ton.

Tabel 2.74 Luas Panen dan Produksi Sayuran Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

No.	Jenis Sayur	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1.	Cabe rawit	54	82,70
2.	Kubis	18	20,60
3.	Petsai	87	129,20
4.	Kacang panjang	76	108,90
5.	Tomat	82	99,30
6.	Terong	44	53,20
7.	Ketimun	45	55,50
8.	Labu siam	16	17,00
9.	Kangkung	19	88,20
10.	Bayam	82	8,20
11.	Semangka	6	8,40
Jumlah		529	671.20

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Sama seperti pada produksi sayur yang mengalami peningkatan produksi yang signifikan, produksi buah-buahan juga ikut mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, produksi seluruh buah-buahan adalah sebesar 323,40 ton kemudian meningkat menjadi sebesar 903,70 ton pada tahun 2015. Jenis tanaman buah yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni adalah mangga, durian, jeruk, pisang, papaya, nanas, alpukat, duku/langsat, jambu biji, jambu air, nangka, dan rambutan. Produksi buah terbesar di Kabupaten Teluk Bintuni adalah pisang yaitu sebesar 241,80 ton, diikuti nangka sebesar 134,20 ton, dan mangga sebesar 89,30 ton. Selain tanaman sayuran dan buah-buahan, Kabupaten Teluk Bintuni juga memproduksi tanaman obat seperti jahe, lengkuas, dan kunyit. Produksi jahe pada tahun 2015 adalah sebesar 0,22 ton, lengkuas sebesar 0,37 ton, dan kunyit sebesar 0,22 ton.

Tabel 2.75 Perkembangan Produksi Buah-buahan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Tahun	Produksi (ton)
1.	2011	323,40
2.	2012	607,20

3.	2013	982,90
4.	2014	491,10
5.	2015	903,70

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Tabel 2.76 Produksi Buah-buahan Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Jenis Buah	Produksi (ton)
1.	Mangga	89,30
2.	Durian	58,10
3.	Jeruk	21,70
4.	Pisang	241,80
5.	Pepaya	43,10
6.	Nanas	43,60
7.	Alpukat	24,60
8.	Langsat/Duku	19,30
9.	Jambu biji	59,20
10.	Jambu air	63,60
11.	Nangka	134,20
12.	Rambutan	74,30
13.	Salak	30,90
Jumlah		903,70

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni adalah kelapa, kelapa sawit, kopi, pala, dan kakao. Luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami peningkatan dari seluas 254 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 263 ha pada tahun 2015. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan produksi kelapa yang justru mengalami penurunan dari sebesar 119,50 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 44,44 ton pada tahun 2015. Produksi kelapa pada tahun 2015 berasal dari 21 distrik dimana distrik yang tidak memiliki produksi kelapa adalah Distrik Dataran Beimes, Moskona Barat, dan Moskona Timur. Produksi kelapa tertinggi pada tahun 2015 berasal dari Distrik Bintuni yaitu sebesar 5,66 ton, disusul Distrik Kaitaro sebesar 4,51 ton, dan Distrik Kuri sebesar 3,84 ton.

Tabel 2.77 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	2011	254	119,50
2.	2012	254	104,42
3.	2013	254	109,64
4.	2014	254	109,64
5.	2015	263	44,44

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Selama periode 2011-2015, luas areal perkebunan kelapa sawit mengalami sedikit peningkatan dari seluas 7.500 ha pada tahun 2011 menjadi seluas 7.508,42 ha pada tahun 2015. Jika luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan, produksi kelapa sawit justru mengalami penurunan dari sebesar 44.388,06 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 36.575,76 ton pada tahun 2015. Penurunan produksi kelapa sawit tersebut dimungkinkan karena struktur tanaman kelapa sawit di Kabupaten Teluk Bintuni sebagian besar termasuk tanaman yang belum menghasilkan atau tanaman tua/rusak sehingga dari sisi produktivitas tidak optimal. Produksi kelapa sawit di Kabupaten Teluk Bintuni hanya berasal dari Distrik Sumuri.

Tabel 2.78 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	2011	7.500,00	44.388,06
2.	2012	7.500,00	35.510,45
3.	2013	7.508,42	36.575,76
4.	2014	7.508,42	36.575,76
5.	2015	7.508,42	36.575,76

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Luas areal tanaman kopi di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2011 adalah seluas 12,73 ha, kemudian luasannya tidak mengalami perubahan hingga tahun 2014, dan pada tahun 2015, terjadi peningkatan luas areal tanaman kopi menjadi seluas 17,73 ha. Berbanding terbalik dengan luas areal tanaman yang meningkat, produksi kopi justru mengalami penurunan dari sebesar 7,12 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 5,14 ton pada tahun 2015. Luas areal tanaman kopi pada tahun 2015 hanya

berada di 9 distrik dengan distrik yang memiliki luas areal tanaman tertinggi adalah Distrik Dataran Beimes yaitu seluas 5 ha, disusul Distrik Manimeri seluas 2,78 ha, dan Bintuni seluas 1,62 ha. Namun, dalam sisi produksi, produsen kopi terbesar justru ditempati oleh Distrik Manimeri dengan produksi sebesar 1,46 ton, selanjutnya Distrik Tuhiba sebesar 1,09 ton, dan Bintuni sebesar 0,54. Distrik Dataran Beimes dengan luas areal tanaman tertinggi pada tahun 2015 tidak memiliki produksi kopi.

Tabel 2.79 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kopi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	2011	12,73	7,12
2.	2012	12,73	5,69
3.	2013	12,73	5,12
4.	2014	12,73	5,12
5.	2015	17,73	5,14

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015, luas areal tanaman pala adalah seluas 189,05 ha. Distrik yang memiliki luas areal tanaman pala tertinggi diurutkan dari yang terbesar adalah Distrik Sumuri (50 ha), Distrik Tembuni (33,41 ha), Distrik Farfurwar (33,10 ha), Distrik Bintuni (18 ha), dan Distrik Manimeri (13,96 ha). Luas areal tanaman pala di Kabupaten Teluk Bintuni berada di 17 distrik, namun distrik yang memiliki produksi pala pada tahun 2015 hanya berjumlah 15 distrik. Produksi pala tertinggi berada di Distrik Tembuni yaitu sebesar 5,22 ton, disusul Distrik Tuhiba sebesar 4,23 ton, dan Distrik Bintuni sebesar 3,29 ton. Tanaman perkebunan lainnya yang dibudidayakan masyarakat adalah tanaman kakao. Luas areal tanaman kakao selama periode 2011-2015 cenderung stagnan dimana luas areal pada tahun 2011 seluas 36,62 ha dan pada tahun 2015 berkurang sedikit menjadi seluas 36,40 ha. Penurunan luas areal juga diikuti penurunan produksi kakao dari sebesar 13,96 ton pada tahun 2011 menjadi sebesar 9,30 ton pada tahun 2015. Produsen kakao tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni dengan produksi di atas 2 ton adalah Distrik Bintuni (2,53 ton) dan Manimeri (2,46 ton).

Tabel 2.80 Perkembangan Luas Areal dan Produksi Kakao di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

No.	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	2011	36,62	13,96
2.	2012	36,40	11,20
3.	2013	36,40	8,96
4.	2014	36,40	8,96
5.	2015	36,40	9,30

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Peternakan

Ternak adalah hewan hasil domestikasi oleh manusia yang diatur segala kehidupannya (reproduksi, produksi kesehatan, pemeliharaan, dan lain-lain) oleh manusia dan dapat dimanfaatkan produk dan jasanya (daging, telur, susu, kulit, lemak, tenaga, wool, dan lain-lain) untuk kepentingan manusia. Sektor peternakan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan belum berkembang karena usaha yang dilakukan masyarakat masih dalam skala rumah tangga. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sapi potong, kambing, dan babi. Populasi sapi potong di Kabupaten Teluk Bintuni terus mengalami peningkatan dari sebanyak 1.280 ekor pada tahun 2012 menjadi sebanyak 2.115 ekor pada tahun 2015. Populasi kambing pada tahun 2012 adalah sebanyak 1.921 ekor dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebanyak 2.625 ekor. Populasi babi juga meningkat seperti pada sapi potong dan kambing dari sebanyak 2.295 ekor (2012) menjadi sebanyak 4.599 ekor (2015).

Tabel 2.81 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015

No.	Tahun	Ternak (ekor)		
		Sapi Potong	Kambing	Babi
1.	2012	1.280	1.921	2.295
2.	2013	1.321	2.064	1.770
3.	2014	2.115	2.625	4.599
4.	2015	2.115	2.625	4.599

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Pada tahun 2015, populasi sapi potong terbanyak di Kabupaten Teluk Bintuni berada di Distrik Manimeri yaitu sebanyak 85 ekor, disusul Distrik Bintuni sebanyak 865 ekor, dan Tuhiba sebanyak 177 ekor. Populasi sapi potong sendiri pada tahun 2015 berada di 8 distrik, sedangkan populasi kambing berada di 11 distrik. Sebagian besar populasi kambing di Kabupaten Teluk Bintuni berada di Distrik Manimeri, Bintuni, dan Meyado dengan populasi tersebut berturut-turut sebanyak 1.420, 575, dan 131 ekor. Sama seperti pada populasi sapi potong, populasi babi juga berada di 8 distrik dengan populasi terbesar berada di Distrik Manimeri yaitu 2.305 ekor, disusul Distrik Bintuni sebanyak 1.440 ekor.

Tabel 2.82 Populasi Ternak Menurut Distrik dan Jenis, 2015

No.	Distrik	Sapi Potong	Kambing	Babi
1.	Farfurwar	-	-	-
2.	Babo	5	123	128
3.	Sumuri	62	98	160
4.	Aroba	5	91	96
5.	Kaitaro	-	-	-
6.	Kuri	-	-	-
7.	Wamesa	-	-	-
8.	Bintuni	865	575	1.440
9.	Manimeri	885	1.420	2.305
10.	Tuhiba	177	46	223
11.	Dataran Beimes	-	-	-
12.	Tembuni	24	-	24
13.	Aranday	-	48	-
14.	Tomu	-	31	-
15.	Kamundan	-	35	-
16.	Weriagar	-	27	-
17.	Moskona Selatan	-	-	-
18.	Meyado	92	131	223
19.	Moskona Barat	-	-	-
20.	Merdey	-	-	-
21.	Biscoop	-	-	-
22.	Masyeta	-	-	-
23.	Moskona Utara	-	-	-
24.	Moskona Timur	-	-	-
Jumlah		2.115	2.625	4.599

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Selama periode 2012-2015, seluruh populasi ternak unggas di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, populasi ayam kampung adalah sebanyak 30.679 ekor, kemudian meningkat menjadi sebanyak 50.605 ekor pada tahun 2015. Populasi ayam pedaging meningkat signifikan dari hanya sebanyak 2.268 ekor pada tahun 2013 menjadi sebanyak 49.500 ekor pada tahun 2015. Sementara itu, populasi itik juga meningkat dari sebanyak 6.777 ekor (2012) menjadi sebanyak 10.066 ekor (2015).

Tabel 2.83 Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015

No.	Tahun	Ternak		
		Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik
1.	2012	30.679	-	6.777
2.	2013	31.904	2.268	7.011
3.	2014	50.605	49.500	10.066
4.	2015	50.605	49.500	10.066

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Populasi ayam kampung tersebar merata di seluruh distrik dengan sebagian besar populasi ayam kampung terbesar berada di Distrik Manimeri dan Bintuni yaitu masing-masing sebanyak 27.057 dan 16.000 ekor. Distrik lain yang memiliki populasi ayam kampung di atas 1.000 ekor adalah Distrik Babo yaitu sebanyak 1.061 ekor. Populasi ayam pedaging di Kabupaten Teluk Bintuni hanya berada di 2 distrik yaitu Distrik Bintuni sebanyak 26.000 ekor dan Distrik Manimeri sebanyak 23.500 ekor. Populasi itik di Kabupaten Teluk Bintuni tersebar di 11 distrik. Populasi itik terbesar juga berada di Distrik Manimeri dan Bintuni dengan populasi masing-masing sebanyak 6.800 dan 2.748 ekor.

Tabel 2.84 Populasi Ternak Unggas Menurut Distrik dan Jenis, 2015

No.	Distrik	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik
1.	Farfurwar	394	-	21
2.	Babo	1,061	-	115
3.	Sumuri	439	-	173
4.	Aroba	317	-	17
5.	Kaitaro	92	-	-

No.	Distrik	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik
6.	Kuri	663	-	9
7.	Wamesa	760	-	33
8.	Bintuni	16.000	26.000	2.748
9.	Manimeri	27.057	23.500	6.800
10.	Tuhiba	470	-	100
11.	Dataran Beimes	254	-	-
12.	Tembuni	116	-	-
13.	Aranday	233	-	10
14.	Tomu	256	-	-
15.	Kamundan	303	-	-
16.	Weriagar	491	-	-
17.	Moskona Selatan	114	-	-
18.	Meyado	260	-	40
19.	Moskona Barat	175	-	-
20.	Merdey	128	-	-
21.	Biscoop	57	-	-
22.	Masyeta	228	-	-
23.	Moskona Utara	412	-	-
24.	Moskona Timur	325	-	-
Jumlah		50.605	49.500	10.066

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.3.19. Kehutanan

Pembangunan sektor kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan ekologi, dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat tempatan. Oleh karena itu, potensi sektor kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Pengembangan sektor kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas, pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang, meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan beserta isinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan

berkeadilan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan dalam sistem dan manajemen pengelolaan hutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdampak negatif bahkan sudah mencapai pada taraf ancaman hari depan. Untuk itu perlu adanya peninjauan terhadap sistem dan manajemen pengelolaan hutan beserta peraturan dan pengaturan yang berlaku baik langsung maupun yang saling terkait.

Tabel 2.85 Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

No.	Jenis Hutan	Luas (ha)
1.	Hutan Lindung	153.726,78
2.	Hutan PPA	220.213,15
3.	Hutan Produksi Terbatas	595.971,32
4.	Hutan Produksi Tetap	585.469,81
5.	Hutan Produksi yang Dikonversi	549.033,62
6.	Hutan Penggunaan Lainnya	41.337,64
Jumlah		2.145.752,32

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Sebagian besar wilayah Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah hutan sehingga sektor kehutanan merupakan salah satu sektor strategis. Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 memiliki kawasan hutan seluas 2.145.752,32 ha. Dari seluruh luasan tersebut, sebagian besar luasan hutan merupakan hutan produksi. Untuk hutan produksi, luas hutan produksi terbatas pada tahun 2015 adalah seluas 595.971,32 ha, hutan produksi yang dikonversi seluas 549.033,62 ha, dan hutan produksi tetap seluas 585.469,81 ha. Sementara luas hutan lindung 153.726,78 ha, hutan PPA seluas 220.213,15, dan hutan untuk penggunaan lainnya seluas 41.337,64 ha. Produksi hasil hutan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah chip, kayu bulat, kayu gergajian, dan veneer. Selama periode 2012-2015, produksi kayu dapat dikatakan fluktuatif. Pada tahun 2012, produksi kayu adalah sebesar 36.733,96 m³, kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 275.440,74 m³, naik kembali menjadi sebesar 392.251,43 m³ pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar

297.335,69 m³. Jika dirinci menurut jenis kayu pada tahun 2015. Sebagian besar produksi kayu di Kabupaten Teluk Bintuni adalah jenis kayu bulat yaitu sebesar 209.789,38 m³, disusul chip sebesar 62.156,94 m³, veneer sebesar 15.628,58 m³, dan kayu gergajian sebesar 9.760,79 m³.

Tabel 2.86 Perkembangan Produksi Kayu di Kabupaten Teluk Bintuni, 2012-2015

Tahun	Jumlah
2012	362.733,96
2013	275.440,74
2014	392.251,43
2015	297.335,69

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.3.20. Energi dan Sumberdaya Mineral

Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena semua memerlukan listrik dari rumah tangga, instansi pemerintah, perkantoran, dan industri. Pembangkit listrik di Kabupaten Teluk Bintuni telah tersebar merata di seluruh distrik hingga tahun 2015. Jumlah PLTD di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 24 unit, PLTG sebanyak 2 unit, PLTMH sebanyak 2 unit, dan PLTS sebanyak 12 unit. Seluruh distrik di Kabupaten Teluk Bintuni telah memiliki PLTD dengan kapasitas tertinggi berada di Distrik Bintuni dan Manimeri yaitu masing-masing sebesar 11.100 KVA. PLTG di Kabupaten Teluk Bintuni hanya berada di 2 distrik yaitu di Distrik Bintuni dan Manimeri dengan kapasitas masing-masing sebesar 4.000 KVA, sedangkan PLTMH hanya berada di Wamesa dan Moskona Utara dengan kapasitas masing-masing sebesar 20 KVA. PLTS pada tahun 2015 tersebar di 12 distrik dengan kapasitas PLTS terbesar berada Wamesa yaitu sebesar 30 KVA.

Tabel 2.87 Jumlah Pembangkit Listrik di Kabupaten Teluk Bintuni (KVA), 2015

No.	Distrik	PLTD	PLTG	PLTMH	PLTS
1.	Farfurwar	15,00	-	-	-
2.	Babo	350,00	-	-	-

No.	Distrik	PLTD	PLTG	PLTMH	PLTS
3.	Sumuri	650,00	-	-	-
4.	Aroba	88,00	-	-	-
5.	Kaitaro	22,50	-	-	20,00
6.	Kuri	20,00	-	-	-
7.	Wamesa	30,00	-	20,00	30,00
8.	Bintuni	11.100,00	4.000,00	-	-
9.	Manimeri	11.100,00	4.000,00	-	5,00
10.	Tuhiba	100,00	-	-	-
11.	Dataran Beimes	22,50	-	-	10,00
12.	Tembuni	100,00	-	-	-
13.	Aranday	15,00	-	-	-
14.	Tomu	100,00	-	-	5,00
15.	Kamundan	37,50	-	-	-
16.	Weriagar	55,00	-	-	-
17.	Moskona Selatan	15,00	-	-	15,00
18.	Meyado	350,00	-	-	-
19.	Moskona Barat	15,00	-	-	20,00
20.	Merdey	100,00	-	-	20,00
21.	Biscoop	100,00	-	-	20,00
22.	Masyeta	15,00	-	-	25,00
23.	Moskona Utara	15,00	-	20,00	25,00
24.	Moskona Timur	15,00	-	-	20,00
Jumlah		24.430,50	8.000,00	40,00	215,00

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Jaringan listrik di Kabupaten Teluk Bintuni belum tersebar merata di semua distrik karena akses lokasi yang masih terisolir dan keterbatasan daya listrik. Jaringan listrik saluran udara tegangan menengah hanya berada di 4 distrik yaitu Distrik Bintuni (25 km), Manimeri (7 km), Sumuri (5 km), dan Babo (2 km). Untuk saluran udara tegangan rendah, keseluruhan panjang jaringannya adalah sepanjang 90 km dengan jaringan terpanjang berada di Distrik Bintuni yaitu sepanjang 30 km, disusul Distrik Tuhiba sepanjang 10 km, dan Distrik Sumuri sepanjang 7 km. Sementara itu, untuk penerangan jalan umum jumlahnya hingga tahun 2015 adalah sebanyak 210 unit dimana sebagian besar berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 150 unit.

Tabel 2.88 Jumlah Jaringan Listrik di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

No.	Distrik	Saluran Udara Tegangan Menengah (km)	Saluran Udara Tegangan Rendah (km)	Penerangan Jalan Umum (unit)
1.	Farfurwar	-	2,00	-
2.	Babo	2,00	5,50	-
3.	Sumuri	5,00	7,00	10,00
4.	Aroba	-	2,50	-
5.	Kaitaro	-	2,00	-
6.	Kuri	-	3,00	-
7.	Wamesa	-	-	-
8.	Bintuni	35,00	30,00	150,00
9.	Manimeri	7,00	8,00	20,00
10.	Tuhiba	-	10,00	10,00
11.	Dataran Beimes	-	3,00	-
12.	Tembuni	-	-	-
13.	Aranday	-	-	-
14.	Tomu	-	2,00	-
15.	Kamundan	-	-	-
16.	Weriagar	-	3,00	-
17.	Moskona Selatan	-	-	-
18.	Meyado	-	6,00	10,00
19.	Moskona Barat	-	-	-
20.	Merdey	-	3,00	5,00
21.	Biscoop	-	3,00	5,00
22.	Masyeta	-	-	-
23.	Moskona Utara	-	-	20,00
24.	Moskona Timur	-	-	-
Jumlah		49,00	90,00	230,00

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

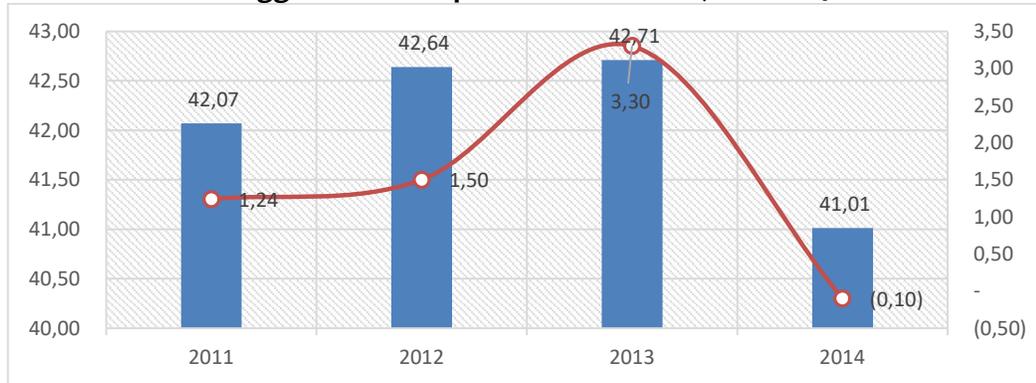
Sumber Daya Mineral

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Teluk Bintuni terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas: kawasan peruntukan pertambangan batubara yang terletak di Distrik Aroba, Babo, Bintuni, Biscoop,

Dataran Beimes, Fafurwar, Kaitaro, Manimeri, Masyeta, Merdey, Meyado, Moskona Barat, Moskona Selatan, Moskona Timur, Moskona Utara, Sumuri, Tembuni, Tuhiba, Wamesa. Sedangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral logam terletak di Distrik Moskona Utara, Moskona Barat, Moskona Timur, Masyeta, Merdey dan Biscoop. Kawasan peruntukan pertambangan mineral radioaktif terletak di Distrik Wamesa dan Kuri, dan kawasan peruntukan pertambangan batuan dan mineral bukan logam tersebar di Distrik Aranday, Aroba, Babo, Bintuni, Biscoop, Dataran Beimes, Fafurwar, Kaitaro, Kamundan, Kuri, Manimeri, Masyeta, Merdey, Meyado, Moskona Barat, Moskona Selatan, Moskona Timur, Moskona Utara, Sumuri, Tembuni, Tomu, Tuhiba, Wamesa, Weriagar. Sementara itu, kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di Distrik Aranday, Aroba, Babo, Bintuni, Biscoop, Dataran Beimes, Fafurwar, Kaitaro, Kamundan, Kuri, Manimeri, Masyeta, Merdey, Meyado, Moskona Barat, Moskona Selatan, Moskona Timur, Moskona Utara, Sumuri, Tembuni, Tomu, Tuhiba, Wamesa, Weriagar dan perairan laut Teluk Bintuni.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Teluk Bintuni. Pentingnya sektor pertambangan dan penggalian juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian yang mencapai 41,01 persen pada tahun 2014. Potensi sumberdaya mineral yang melimpah juga menjadi pendorong kontribusi sektor industri pengolahan yang sebagian besar merupakan industri olahan gas di lapangan Tangguh yang dikelola oleh BP Tangguh. Sumbangan industri pengolahan sendiri pada tahun 2014 adalah sebesar 51,40 persen. Pada tahun 2011, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 1,24 persen, kemudian meningkat hingga tahun 2013 menjadi sebesar 3,30 persen, namun pada tahun 2014 ketika terjadi penurunan harga komoditas pertambangan, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen.

Gambar 2.16 Persentase Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2014



Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2016 (diolah)

2.1.3.21. Pariwisata

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki kekayaan alam berupa hutan pegunungan yang luas dimana terdapat banyak sungai di dalamnya. Selain keindahan alam, budaya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni juga merupakan salah satu pesona wisata yang ada. Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan menjadi *leading* sektor di Kabupaten Teluk Bintuni pada masa mendatang. Saat ini sektor pariwisata belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian di Kabupaten Teluk Bintuni. Secara makro sektor pariwisata merupakan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui: penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta secara simultan dapat mengaktifkan sektor-sektor produksi lain, sehingga pariwisata sering disebut lokomotif perekonomian.

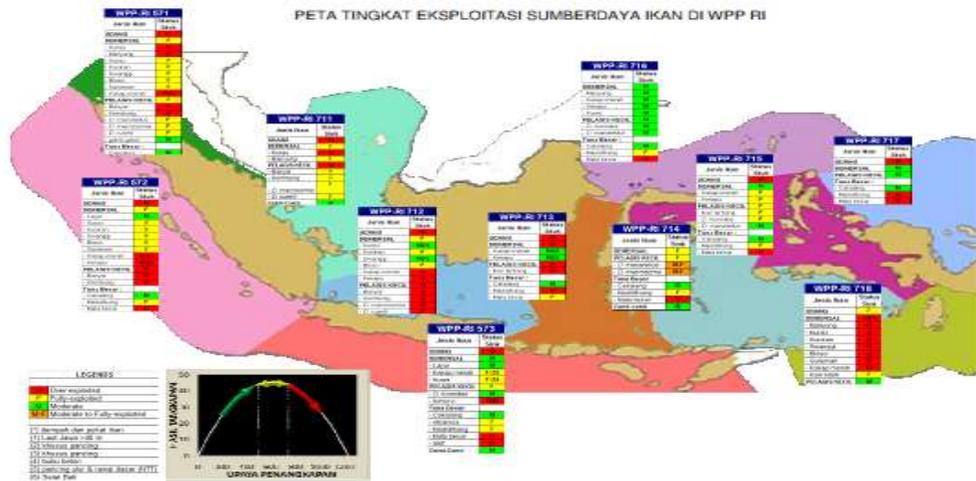
Obyek wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya berupa wisata alam, untuk itu perlu kewaspadaan dalam pengembangannya dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Taman terbuka Kabupaten Teluk Bintuni, Monumen Tujuh Suku, Rajawali, dan Tuarai adalah beberapa tempat favorit warga Teluk Bintuni untuk berekreasi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Meskipun minim fasilitas, ketiga tempat tersebut dirasa

cukup mampu memberikan suasana baru bagi warga guna melepas kepe-natan dan mencari hiburan bersama keluarga. Pada tahun 2010, jumlah hotel di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 36 unit dengan jumlah kamar sebanyak 300 buah. Kelas hotel di Kabupaten Teluk Bintuni adalah hotel melati sebanyak 1 unit (35 kamar) dan penginapan sebanyak 35 unit (265 kamar).

2.1.3.22. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi baik untuk perikanan budidaya maupun tangkap. Di bidang perikanan budidaya, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi yang besar dengan wilayahnya yang banyak dilewati sungai besar dan danau yang cukup besar. Sedangkan untuk perikanan tangkap laut, Kabupaten Teluk Bintuni dapat mengandalkan potensi sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 715) yaitu Teluk Tomini-Laut Seram. Terkait dengan potensi sumberdaya perikanan di laut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Keputusan Menteri (KEPMEN) Nomor 45 Tahun 2011 telah memetakan potensi sumberdaya ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Total potensi sumberdaya ikan (SDI) di WPP 715 adalah sebesar 595,6 ribu ton per tahun terdiri atas potensi ikan pelagis besar sebesar 106,5 ribu ton per tahun, ikan pelagis kecil sebesar 379,4 ribu ton per tahun, ikan demersal sebesar 88,8 ribu ton per tahun, udang penaeid sebesar 900 ton per tahun, ikan karang konsumsi sebesar 12,5 ton per tahun, lobster sebesar 300 ton per tahun, dan cumi-cumi sebesar 7,1 ribu ton per tahun.

Gambar 2.17 Peta Tingkat Eksploitasi Sumberdaya Ikan di WPP RI



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2011

Untuk WPP-NRI 715, jika diasumsikan nelayan yang berbasis di Kabupaten Teluk Bintuni mampu memanfaatkan 1 persen dari total potensi sumberdaya ikan, maka diperoleh potensi produksi sekitar 5.956 ton per tahun. Produksi perikanan Kabupaten Teluk Bintuni masih jauh dari potensi produksi yang ada di mana total produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 hanya sebesar 620,4 ton. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan misalnya keterbatasan armada kapal dan alat penangkapan, serta terbatasnya modal usaha yang dimiliki nelayan sehingga tidak dapat mengembangkan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Teluk Bintuni. Jika dilihat dari produksi per jenis ikan, komoditas perikanan yang menjadi penyumbang terbesar produksi di Kabupaten Teluk Bintuni adalah udang. Seperti dikutip dari Teropong News (2016), produksi udang segar di wilayah Teluk Bintuni telah menembus pasar ekspor ke negara Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Selain udang, komoditas perikanan yang berpotensi untuk ekspor adalah lobster, kepiting, dan kakap merah. Namun produksi komoditas perikanan non-udang tersebut masih bersifat industri rumah tangga dan belum ada yang diekspor dimana akses perdagangannya hanya antar daerah di Provinsi Papua Barat.

Keberhasilan pembangunan di bidang perikanan tidak hanya dilihat dari sumbangan sektor tersebut terhadap PDRB, tetapi harus juga melihat pelaku usaha di bidang perikanan. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung pengembangan sektor perikanan, hal lain yang mendukung adalah permintaan pasar luar negeri atas komoditas perikanan terus meningkat setiap tahun. Walaupun demikian, kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, dimana Kabupaten Teluk Bintuni belum bisa mengirim produksi dalam skala besar karena produksi yang tidak menentu, belum optimalnya pengelolaan kawasan peruntukan perikanan, serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat secara signifikan. Hal ini dimungkinkan karena usaha perikanan yang dijalankan oleh masyarakat saat ini belum sepenuhnya mengarah pada sebuah sistem minabisnis terpadu yang didorong oleh inovasi-inovasi terkini.

Tabel 2.89 Perkembangan Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2013-2015

No.	Jenis Ikan	2013	2014	2015
1.	Kuwe	66,70	65,00	63,80
2.	Bawal hitam	1,90	1,70	1,90
3.	Kakap putih	45,00	73,00	50,40
4.	Belanak	28,00	23,00	26,50
5.	Kembung	97,80	98,10	81,20
6.	Tenggiri	96,00	97,90	95,00
7.	Pari	18,00	9,00	11,00
8.	Kakap hitam	35,00	57,00	40,20
9.	Udang	297,50	200,00	234,70
10.	Kepiting	42,00	29,00	15,70
Jumlah		727,90	653,70	620,40

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Jumlah rumah tangga perikanan laut di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 adalah sebanyak 2.225 RT yang tersebar di 12 distrik. Jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak pada tahun 2015 berada di Distrik Weriagar yaitu sebanyak 705 RT, disusul Distrik Bintuni sebanyak 674 RT, dan Distrik Aroba

sebanyak 237 RT. Produksi perikanan di Kabupaten Teluk Bintuni berasal dari kegiatan perikanan tangkap laut. Produksi perikanan tangkap laut selama periode 2013-2015 mengalami penurunan setiap tahun dari sebesar 727,90ton pada tahun 2013 menjadi sebesar 620,400ton pada tahun 2015. Penurunan produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2014 adalah sebesar 10,19 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,09 persen.

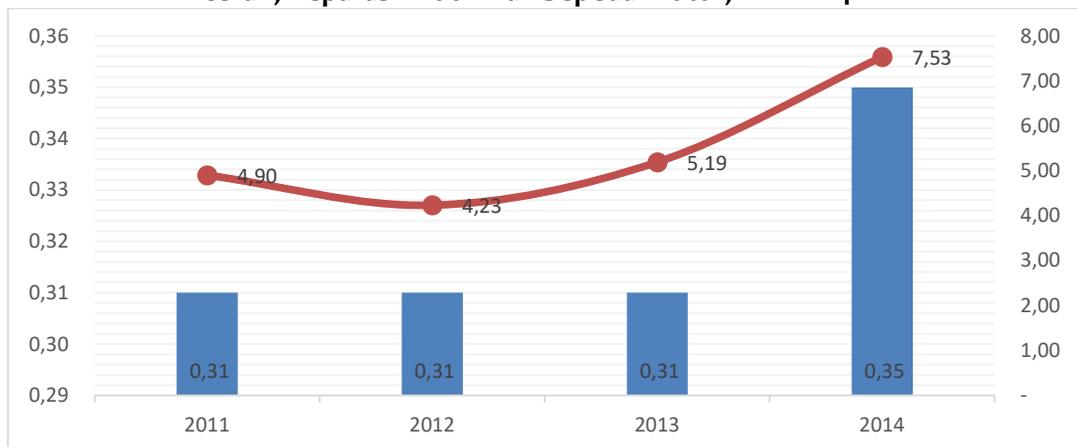
Jika dilihat berdasarkan produksi per jenis ikan pada tahun 2015, terdapat 10 jenis komoditas perikanan yang menjadi tangkapan utama nelayan di Kabupaten Teluk Bintuni. Komoditas perikanan yang paling banyak diproduksi pada tahun 2015 adalah udang yaitu sebesar 234,70 ton, disusul tenggiri sebesar 95 ton, kembung sebesar 81,20 ton, kuwe sebesar 63,80 ton, dan kakap putih sebesar 50,40 ton. Distrik yang memiliki produksi terbesar pada tahun 2015 adalah Distrik Aroba yaitu sebesar 75,60 ton.

2.1.3.23. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni relatif masih kecil walaupun terjadi peningkatan kontribusi dari sebesar 0,31 persen pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,36 persen pada tahun 2014. Namun dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor selalu tumbuh positif dan terus meningkat selama periode 2011-2014. Rata-rata pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor selama periode 2011-2014 adalah sebesar 5,46 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,53 persen. Jumlah unit perdagangan besar di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami peningkatan dari sebanyak 31 unit (2012) menjadi sebanyak 49 unit (2012). Sebagian pelaku usaha perdagangan besar di Kabupaten Teluk Bintuni terletak di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 42 unit, sedangkan distrik lainnya seperti Distrik Babo hanya sebanyak 3 unit, Manimeri sebanyak 2 unit, dan masing-masing 1 unit pada Distrik Aroba dan

Moskona Barat. Jumlah pedagang menengah juga mengalami peningkatan dari sebanyak 96 unit (2011) menjadi sebanyak 129 unit (2012). Seperti pada perdagangan besar, jumlah pedagang menengah yang paling banyak juga berada di Distrik Bintuni yaitu sebanyak 104 unit. Sementara jumlah pedagang kecil meningkat dari sebanyak 83 unit pada tahun 2011 menjadi sebanyak 188 unit pada tahun 2012.

Gambar 2.18 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, 2011-2014



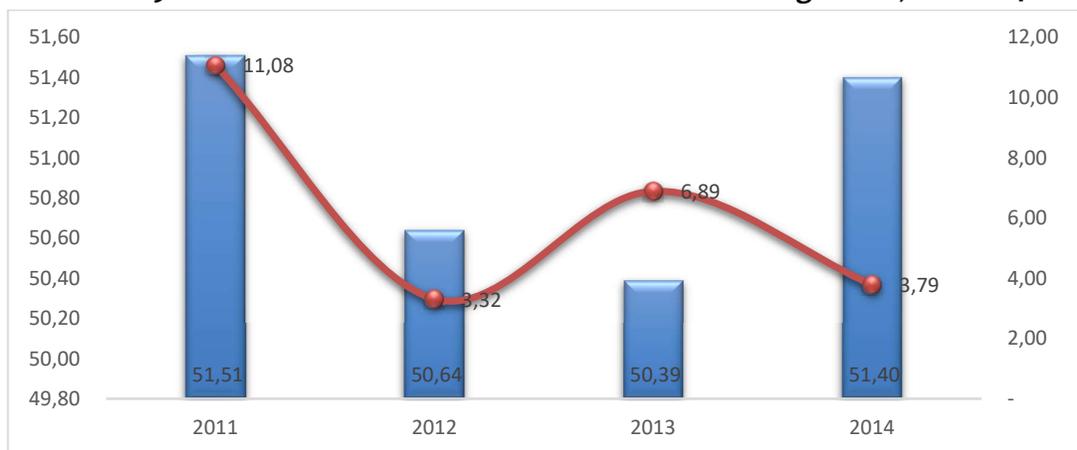
Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

2.1.3.24. Industri

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling dominan dan memiliki prospek yang sangat baik dalam perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. Pada tahun 2011, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian adalah sebesar 51,51 persen, kemudian pada tahun 2012-dan 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 50,39 persen pada tahun 2013. Kontribusi sektor ini kemudian meningkat kembali menjadi 51,40 persen pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2011-2014 adalah sebesar 6,27 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 11,08 persen.

Seperti diketahui, proyek pengilangan gas alam cair Tangguh yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan penyumbang terbesar terhadap nilai PDRB Kabupaten Teluk Bintuni. Besarnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sektor industri pengolahan pada tahun 2014 sebesar Rp 11,77 triliun. Menurut Direktori Perusahaan, pada tahun 2015 selain industri pengolahan gas alam cair (LNG) BP Tangguh, di Kabupaten Teluk Bintuni juga terdapat 6 perusahaan kehutanan dan 4 perusahaan industri kehutanan. Selain itu, terdapat 2 perusahaan industri perikanan (satu perusahaan sementara tidak aktif) dan 1 industri perkebunan.

Gambar 2.19 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, 2011-2014



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi. Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2014. Pada tahun 2010, total konsumsi rumah tangga riil di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar Rp 553,40 miliar dan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 662,84 miliar. Rata-rata pertumbuhan total konsumsi rumah tangga selama periode tersebut adalah sebesar 4,62 persen per tahun. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2014 adalah sebesar 3,17 persen. Rata-rata konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 47,38 juta (2010) menjadi sebesar Rp 51,56 juta (2014). Pertumbuhan konsumsi per rumah tangga selama periode tersebut adalah sebesar 2,14 persen. Jika dilihat dari rata-rata konsumsi per kapita/tahun, terdapat peningkatan nilai dari sebesar Rp 10,56 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 11,44 juta pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan konsumsi per kapita pada periode 2011-2014 adalah sebesar 2,04 persen per tahun.

Tabel 2.90 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	553,40	587,61	630,17	679,73	727,27
ADHK (Miliar Rp)	553,40	574,93	604,46	634,21	662,84
Proporsi terhadap PDRB	3,02	2,99	3,05	3,02	3,17
Rata-rata Konsumsi per RT/tahun (Ribuan Rp)					
ADHB	47.384,2 2	49.057,4 9	51.345,99	54.114,26	56.570,3 8
ADHK	47.384,2 2	47.998,4 4	49.251,61	50.490,0 2	51.558,81
Rata-rata Konsumsi per kapita/tahun (Ribuan Rp)					
ADHB	10.556,6 4	10.842,72	11.219,57	12.009,99	12.556,00
ADHK	10.556,6 4	10.608,65	10.761,92	11.205,63	11.443,67
Pertumbuhan (%)					
Total Konsumsi RT	-	3,89	5,14	4,92	4,52
Per RT	-	1,30	2,61	2,51	2,12
Per kapita	-	0,49	1,44	4,12	2,12

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2016

2.1.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan

Melihat perkembangan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2010-2014, terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan terus mengalami penurunan dari sebesar 56,09 persen pada tahun 2010 menjadi sebesar 54,42 persen pada tahun 2014. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pakaian dan alas kaki pada tahun 2014 sebesar 2,32 persen, konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 13,82 persen, kesehatan dan pendidikan sebesar 5,46 persen, transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya sebesar 12,54 persen, hotel dan restoran sebesar 4,15 persen, dan konsumsi lainnya sebesar 7,10 persen.

Tabel 2.91 Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan, 2011-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Pangan	56,09	55,52	55,42	55,09	54,42

Konsumsi non Pangan	43,91	44,48	44,58	44,91	45,58
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

2.1.4.3. Produktivitas Total Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kabupaten Teluk Bintuni terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari produktivitas total daerah yang menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tiga sektor ekonomi yang dominan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sektor industri pengolahan, disusul oleh sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (PDRB AHB) di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode tahun 2010-2014.

Tabel 2.92 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2010-2014

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	579.458,20	586.305,50	611.166,20	658.904,90	721.574,70
B	Pertambangan dan Penggalian	7.899.061,70	8.277.606,30	8.804.273,40	9.622.501,60	9.394.649,40
C	Industri Pengolahan	9.283.651,50	10.134.790,60	10.455.619,10	11.351.319,40	11.775.157,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	201,60	197,50	228,30	209,70	256,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	467,20	474,10	482,10	493,30	506,90
F	Konstruksi	201.976,80	239.208,00	260.285,40	317.573,10	354.244,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	57.576,70	61.105,70	64.983,00	70.597,10	79.129,10
H	Transportasi dan Pergudangan	17.932,00	21.002,80	25.476,20	30.922,40	37.032,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.246,30	4.577,50	5.167,30	5.627,60	6.325,90
J	Informasi dan Komunikasi	6.231,00	6.307,00	6.744,10	7.175,20	7.964,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.237,40	22.078,70	25.774,30	29.910,70	33.259,90
L	Real Estate	17.181,60	18.662,70	20.819,80	24.070,70	28.622,70
M,N	Jasa Perusahaan	651,10	683,80	731,70	782,30	860,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	209.071,70	251.451,60	311.142,10	348.463,70	397.597,80

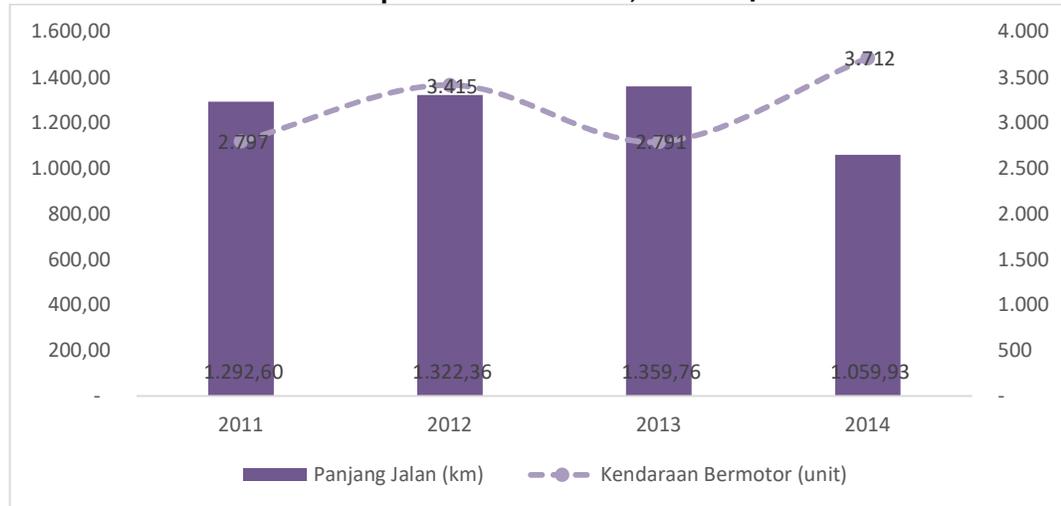
	dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	35.433,20	37.668,30	39.435,30	45.632,70	54.371,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.402,10	11.802,00	12.782,20	13.501,60	14.899,40
R,S,T, U	Jasa lainnya	670,50	719,40	772,10	851,10	916,20
PDRB		18.344.450,60	19.674.641,50	20.645.882,60	22.528.537,10	22.907.367,20

Sumber: BPS Kabupaten Teluk Bintuni, 2016

2.1.4.4. Sarana Transportasi

Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun sosialnya.

Gambar 2.20 Perkembangan Jaringan Jalan dan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2014



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016 (diolah)

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, panjang jalan di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2011-2014, panjang jaringan jalan mengalami penurunan dari sepanjang 1.293,60 km pada tahun 2011 menjadi sepanjang 1.059,93. Walaupun mengalami penurunan jaringan jalan, tetapi dari sisi kualitas jalan terjadi peningkatan jaringan jalan dalam kondisi baik dari hanya sepanjang 58,34 km (2011) menjadi sepanjang 79,10 km (2015). Sementara itu, dari sisi jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Teluk Bintuni juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari sebanyak 2.797 unit pada tahun 2011 menjadi sebanyak 3.712 unit pada tahun 2014.

Jumlah kendaraan bermotor yang cenderung terus meningkat merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Dengan terus digalakkannya pembangunan jalan trans Papua oleh pemerintah pusat, maka aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni akan meningkat baik aksesibilitas dalam kabupaten maupun trans kabupaten sehingga aktivitas perekonomian mengalami peningkatan. Dilihat dari jenisnya, sebagian besar

kendaraan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sepeda motor roda 2 dan 3 yaitu sebanyak 3.091 kendaraan, disusul kendaraan jenis pick up dan sejenisnya sebanyak 235 kendaraan, dan bus sebanyak 158 kendaraan. Jumlah kendaraan yang berplat nomor hitam pada tahun 2014 adalah sebanyak 3.183 kendaraan, plat kuning sebanyak 29 kendaraan, dan plat merah sebanyak 500 kendaraan.

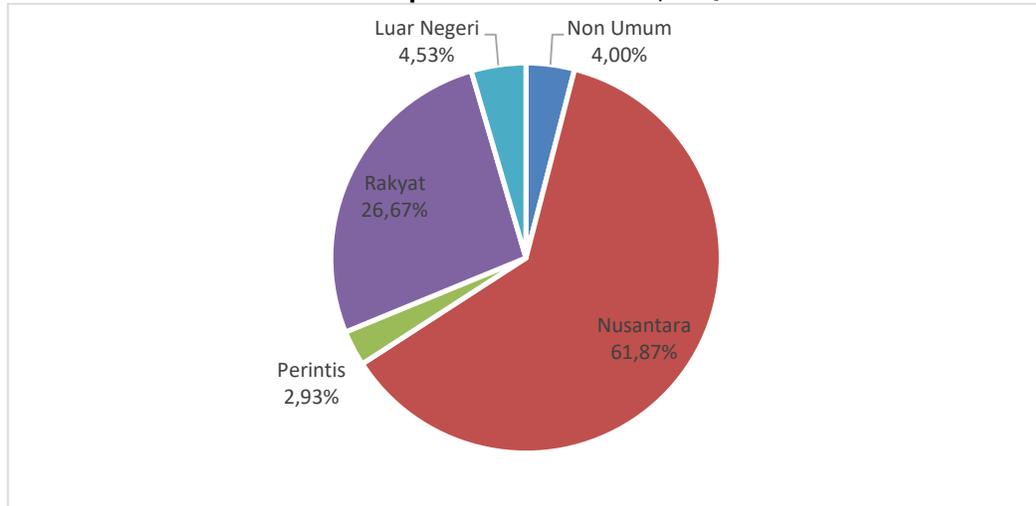
Tabel 2.93 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Kabupaten Teluk Bintuni, 2014

Jenis Kendaraan	Jumlah
Jeep	24
Mini Bus	161
Micro Bus	19
Bus	158
Pick up dan Sejenisnya	235
Truk	24
Sepeda Motor 2 dan 3	3.091
Jumlah	3.712

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Angkutan laut merupakan salah satu sarana transportasi utama yang digunakan oleh penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni baik untuk pergerakan manusia atau barang. Pentingnya sarana transportasi laut dikarenakan wilayah geografis Kabupaten Teluk Bintuni yang dipisahkan oleh sungai dan laut. Kunjungan kapal di pelabuhan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat perekonomian suatu daerah. Selama periode 2011-2014, jumlah kunjungan kapal di pelabuhan mengalami penurunan dari sebanyak 787 unit kapal pada tahun 2011 menjadi sebanyak 376 kapal pada tahun 2014. Jika dirinci menurut jenis pelayaran yang masuk ke Pelabuhan Teluk Bintuni, 15 kapal termasuk dalam pelayaran non umum, 232 unit kapal pelayaran nusantara, 11 unit pelayaran kapal perintis, 100 unit pelayaran kapal rakyat, dan 17 unit pelayaran luar negeri. Jumlah penumpang kapal yang datang (debarkasi) pada tahun 2014 adalah sebanyak 4.041 orang, sedangkan penumpang yang berangkat (embarkasi) sebanyak 1.992 orang.

Gambar 2.21 Persentase Jumlah Kunjungan Kapal Menurut Jenis Pelayaran di Kabupaten Teluk Bintuni, 2017



Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2018 (diolah)

Sarana transportasi udara di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan akses jalur transportasi yang menghubungkan antar daerah terpencil dan antar kabupaten/kota yaitu Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.994 unit pesawat melakukan pendaratan (landing) dan lepas landas (take off) di Bandar Udara Bintuni dan Babo. Total frekuensi kedatangan maupun keberangkatan pesawat pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,55 persen bila dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014 tercatat frekuensi kunjungan pesawat di Bandar Udara Babo sebanyak 1.244 unit pesawat, lebih tinggi jika dibandingkan frekuensi kunjungan pesawat di dengan Bandar Udara Bintuni hanya sebanyak 750 unit pesawat, hal ini disebabkan karena lapangan udara di Bandar Udara Babo dapat didarati oleh pesawat tipe Dornier yang melayani penerbangan khusus karyawan LNG Tangguh sehingga semakin besar kapasitas penumpang maka semakin tinggi pula frekuensi kunjungan pesawat.

Pada tahun 2014 tercatat jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara mengalami peningkatan dibandingkan dengan arus penumpang pada tahun 2013. Tercatat di tahun 2014 jumlah penumpang keberangkatan (embarkasi)

sebanyak 33.632 orang penumpang dan penumpang datang (debarkasi) sebanyak 29.104 orang. Jika dilihat dari pertumbuhannya, pada tahun 2014 jumlah penumpang keberangkatan (embarkasi) naik sebesar 2,21 persen dan penumpang datang (debarkasi) turun sebesar 2,78 persen dibandingkan dengan arus penumpang pada tahun 2013.

Tabel 2.94 Jumlah Barang, Bagasi, dan Pos Paket yang Dibongkar dan Dimuat, 2011-2014

Tahun	Barang		Bagasi		Pos Paket	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
2011	-	-	100.474	110.456	-	-
2012	265.709	32.804	273.289	258.985	19.984	23.707
2013	198.701	107.548	287.061	289.858	13.467	12.136
2014	226.903	38.218	263.569	265.879	1.436	3.116

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Bongkar muat barang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bongkar muat barang kargo, bongkar muat barang bagasi dan bongkar muat pos/paket. Pada tahun 2014 di Bandar Udara Bintuni dan Babo tercatat ada sebanyak 226.093 kilogram barang kargo yang datang atau dibongkar dan 38.218 kilogram barang kargo yang berangkat atau dimuat; sebanyak 263.569 kilogram barang bagasi yang datang atau dibongkar dan 265.879 kilogram barang bagasi yang berangkat atau dimuat; serta sebanyak 1.436 kilogram pos/paket yang datang atau dibongkar dan 3.116 kilogram pos/paket yang berangkat atau dimuat. Terlihat bahwa jenis bongkar muat barang bagasi baik yang datang atau dibongkar maupun yang berangkat atau dimuat lebih besar jika dibandingkan dengan bongkar muat barang kargo dan pos/paket.

2.1.4.5. Fasilitas Jasa Perbankan

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Selain

memberikan kemudahan fasilitas bertransaksi dan sebagai tempat penyedia dana bagi yang membutuhkan dana kredit, perbankan juga menjadi sarana yang aman untuk bertransaksi. Perkembangan kelembagaan keuangan masih didominasi oleh lembaga keuangan pemerintah dan swasta, sedangkan lembaga keuangan masyarakat masih sangat terbatas. Pada tahun 2015, jumlah bank umum yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 15 unit yang terdiri atas 14 unit bank BUMN/BUMD dan 1 unit bank swasta. Untuk perbankan BUMN, BRI di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki 6 unit bank yang terdiri atas 1 unit kantor cabang dan 5 unit kantor kas, Bank Mandiri memiliki 1 unit cabang pembantu, sedangkan BNI memiliki 1 unit kantor kas. Sementara itu, untuk BUMD, Bank Papua memiliki 6 unit kantor yang terdiri atas 1 unit kantor cabang, 2 unit cabang pembantu, dan 3 unit kantor kas, sedangkan bank swasta yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Bank Danamon yang memiliki 1 unit kantor kas.

2.1.4.6. Ketersediaan Hotel dan Penginapan

Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Teluk Bintuni, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan merupakan prasyarat utama untuk mendukung hal tersebut. Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2010 adalah sebanyak 36 hotel dengan kapasitas keseluruhan 300 kamar. Kelas hotel di Kabupaten Teluk Bintuni adalah hotel melati sebanyak 1 unit (35 kamar) dan penginapan sebanyak 35 unit (265 kamar).

2.1.4.7. Ketersediaan Listrik

Pembangkit listrik di Kabupaten Teluk Bintuni telah tersebar merata di seluruh distrik hingga tahun 2015. Jumlah PLTD di Kabupaten Teluk Bintuni adalah

sebanyak 24 unit, PLTG sebanyak 2 unit, PLTMH sebanyak 2 unit, dan PLTS sebanyak 12 unit. Jika pelanggan listrik dirinci menurut bulan pada tahun 2015, jumlah pelanggan listrik setiap bulannya meningkat dari bulan Januari sebanyak 6.874 pelanggan menjadi sebanyak 8.570 pelanggan pada bulan Desember. Dengan adanya kenaikan jumlah pelanggan tersebut, daya terpasang juga ikut mengalami peningkatan dari sebesar 8.443.300 VA pada bulan Januari menjadi sebesar 10.556.600 VA pada bulan Desember. Jika dilihat dari jumlah energi terjual, walaupun secara umum mengalami peningkatan, tetapi jumlahnya tiap bulan cenderung fluktuatif. Energi terjual tertinggi pada tahun 2015 tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 1.309.084 KWH, sedangkan energi terjual terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 829.596 KWH.

Tabel 2.95 Jumlah Pelanggan Listrik, Daya Terpasang dan Energi Terjual, 2015

Bulan	Pelanggan	Daya Terpasang (VA)	Energi Terjual (KWH)
Januari	6.874	8.443.300	867.248
Februari	6.914	8.533.000	885.920
Maret	7.016	8.727.750	829.596
April	7.052	8.811.400	886.294
Mei	7.112	8.889.350	1.039.007
Juni	7.295	9.165.450	1.146.487
Juli	7.320	9.209.100	974.369
Agustus	7.442	9.489.150	1.153.412
September	7.534	9.594.050	1.046.163
Oktober	7.912	9.870.400	1.309.084
November	7.982	10.095.000	1.235.214
Desember	8.570	10.556.000	1.191.591

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Dengan meratanya pembangkit listrik dan peningkatan jumlah pelanggan, maka rasio elektrifikasi di Kabupaten Teluk Bintuni secara umum dapat disimpulkan mengalami peningkatan. Jumlah KK secara keseluruhan di Kabupaten Teluk Bintuni yang telah berlistrik adalah sebanyak 10.943 KK, sedangkan yang belum berlistrik sebanyak 4.554 KK. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Teluk Bintuni hingga

tahun 2015 adalah sebesar 70,61 persen. Jika dirinci menurut distrik, rasio elektrifikasi tertinggi pada tahun 2015 berada di Distrik Bintuni yang mencapai 92,46 persen, disusul Distrik Meyado sebesar 82,71 persen, dan Distrik Tuhiba sebesar 81,67 persen. Sedangkan distrik yang memiliki rasio elektrifikasi terendah adalah Distrik Moskona Timur yaitu sebesar 16,20 persen.

Tabel 2.96 Jumlah KK, KK Berlistrik, KK Belum berlistrik, dan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2015

No.	Distrik	Jumlah KK	KK Berlistrik	KK Belum Berlistrik	Rasio Elektrifikasi
1.	Farfurwar	195	85	110	43,59
2.	Babo	576	325	251	56,42
3.	Sumuri	1,486	850	636	57,20
4.	Aroba	650	196	454	30,15
5.	Kaitaro	176	95	81	53,98
6.	Kuri	201	87	114	43,28
7.	Wamesa	211	89	122	42,18
8.	Bintuni	7.517	6.950	567	92,46
9.	Manimeri	1.250	505	745	40,40
10.	Tuhiba	251	205	46	81,67
11.	Dataran Beimes	151	100	51	66,23
12.	Tembuni	203	120	83	59,11
13.	Aranday	238	150	88	63,03
14.	Tomu	436	285	151	65,37
15.	Kamundan	110	75	35	68,18
16.	Weriagar	245	74	171	30,20
17.	Moskona Selatan	143	75	68	52,45
18.	Meyado	266	220	46	82,71
19.	Moskona Barat	106	55	51	51,89
20.	Merdey	218	117	101	53,67
21.	Biscoop	221	120	101	54,30
22.	Masyeta	101	65	36	64,36
23.	Moskona Utara	243	50	193	20,58
24.	Moskona Timur	303	50	253	16,50
Jumlah		15.497	10.943	4.554	70,61

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.4.8. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

2.1.4.9. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di suatu wilayah akan mempengaruhi iklim investasi di wilayah tersebut. Dengan tingkat kriminalitas yang rendah pada suatu wilayah, maka akan tercipta iklim investasi yang kondusif mengingat dengan kondisi keamanan yang terjamin maka investor akan lebih tenang dalam menanamkan modalnya terutama terkait dengan investasi jangka panjang pada sektor riil. Selain itu, dengan rendahnya kriminalitas, maka ketidakpastian dalam berusaha dapat diminimalkan karena terawasinya pungutan liar yang sangat memberatkan bagi investor. Selama periode 2011-2014, angka kriminalitas di Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam kategori yang rendah. Pada tahun 2011, angka kriminalitas di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 0,19 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 0,10 persen pada tahun 2012 dan 2013, selanjutnya angka kriminalitas pada tahun 2014 adalah sebesar 0,19 persen. Jumlah perkara pidana yang diterima pihak kepolisian pada tahun 2010 adalah sebanyak 102 kasus, kemudian berkurang menjadi sebanyak 57 kasus pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 jumlah perkara pidana yang diterima sebanyak 112 kasus.

Tabel 2.97 Angka Kriminalitas di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2014

Tahun	Penduduk	Perkara Pidana (kasus)	Angka Kriminalitas (%)
2011	54.194	102	0,19
2012	56.167	58	0,10
2013	56.597	57	0,10
2014	57.922	112	0,19

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

2.1.4.10. Pajak dan Retribusi Daerah

Pungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Teluk Bintuni didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah yang diberlakukan di Kabupaten Teluk Bintuni hingga tahun 2015 adalah sebanyak 9 jenis pajak yaitu (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan/pengolahan bahan galian Golongan C, (7) pajak air bawah tanah, (8) pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan (9) PBB pedesaan dan perkotaan. Sedangkan jenis retribusi daerah yang dikenakan di Kabupaten Teluk Bintuni meliputi 15 jenis retribusi. Rincian mengenai jenis retribusi daerah tersebut adalah (1) retribusi pelayanan kesehatan (Puskesmas), (2) retribusi pelayanan kesehatan (RSUD), (3) retribusi pelayanan kesehatan tempat pelayanan kesehatan lainnya, (4) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, (5) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, (6) retribusi pelayanan pasar dan kios, (7) retribusi PKB-mobil barang/beban (pick up), (8) retribusi pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi, (9) retribusi penjualan produksi usaha daerah, (10) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (11) retribusi izin mendirikan bangunan, (12) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, (13) retribusi izin gangguan/keramaian, (14) retribusi izin usaha perikanan, dan (15) retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

2.1.4.11. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi aspek daya saing daerah Kabupaten Teluk Bintuni

terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja, tingkat ketergantungan penduduk, dan kapasitas aparatur pemerintahan.

Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja baik di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Teluk Bintuni (2015), sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni memiliki pendidikan yang rendah (wajib belajar 9 tahun). Persentase angkatan kerja yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 1,22 persen, tidak/belum tamat SD sebesar 13,03 persen, dan lulusan SD sebesar 18,75 persen. Sementara persentase angkatan kerja yang memiliki pendidikan perguruan tinggi hanya sebesar 13,39 persen. Angkatan kerja yang memiliki pendidikan SMP sebesar 17,29 persen, SMA/SMK sebesar 31,81 persen, dan diploma sebesar 4,50 persen.

Tabel 2.98 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2015

Tingkat Pendidikan	2015
Tidak/Belum Pernah Sekolah	376
Tidak/Belum Tamat SD	4.002
SD/MI	5.758
SMP/MTS	5.308
SMA/SMK/MA	9.767
Diploma	1.383

Tingkat Pendidikan	2015
S1/S2/S3 (Universitas)	4.110
Jumlah	30.704
Rasio Tenaga Kerja (S1/S2/S3)	13,39

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat membandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumberdaya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Hingga tahun 2015, jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 2.433 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2011 yang berjumlah 1.922 orang. Tingkat pendidikan aparatur pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan masih kurang baik dimana sebagian besar aparatur pemerintah memiliki pendidikan SMA/Diploma I yaitu sebesar 43,75 persen. Aparatur sipil negara yang memiliki pendidikan

Diploma IV/S1 sebesar 33,74 persen, pendidikan S2 sebesar 2,10 persen, dan pendidikan S3 sebesar 0,08 persen.

Tabel 2.99 Jumlah ASN di Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Tingkat Pendidikan, 2015

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
SD/MI	41
SMP/MTS	37
SMA/Diploma I	1.060
Diploma II/Diploma III	421
Diploma IV/S1	821
S2	51
S3	2
Jumlah	2.433

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi

beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2011-2015 dapat dikatakan mengalami penurunan. Pada tahun 2011, rasio ketergantungan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 54,00 persen, kemudian meningkat menjadi 55,05 persen pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013, rasionya menurun menjadi 50,55 persen, dan menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 49,93 persen. Nilai rasio ketergantungan Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2015 sebesar 49,35 persen. Hal ini berarti bahwa diantara 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 49 penduduk usia belum produktif 0-14 tahun dan usia tidak produktif 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan baik karena nilainya masih di bawah 62,33 persen karena beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif rendah.

Tabel 2.100 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2011-2015

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015
Belum Produktif	18.425	19.405	18.363	18.610	18.840
Produktif	35.190	36.224	37.593	38.632	39.635
Tidak Produktif	579	538	641	680	721
Jumlah	0,54	0,55	0,51	0,50	0,49
<i>Dependency Ratio</i>	54,00	55,05	50,55	49,93	49,35

Sumber: Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka, 2016

Terkait dengan IPM, penurunan angka ketergantungan akan memberi keluasaan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya

akan berpengaruh terhadap naiknya angka IPM, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justeru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya bisa jadi sering terjadi tindakan kriminalitas.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara bertahap mencakup:

- a. Penetapan Kinerja merupakan rencana tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018. Penetapan kinerja sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja sasaran yang mendukung masing-masing sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, ringkasan tingkat pencapaian misi dan sasaran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2018 sebesar 90,33 dengan katagori “Sangat Berhasil”, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.101
Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

N O	MISI	CAPAIAN	SASARA N	CAPAIA N	Indikator IKU	CAPAIAN		
		(%)		(%)			(%)	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Trampil dan Berdaya Saing	84,84	Sasaran 1	79,50	Indikator	1	100,00	
					Indikator	2	89,76	
					Indikator	3	90,48	
					Indikator	4	96,12	
					Indikator	5	100,00	
					Indikator	6	98,93	
					Indikator	7	96,33	
					Indikator	8	94,98	
					Indikator	9	37,50	
					Indikator	10	40,00	
			Indikator	11	-			
				Sasaran 2	92,50	Indikator	1	100,00
						Indikator	2	100,00
				Sasaran 3	92,50	Indikator	1	99,80
			Indikator	2	99,99			
			Indikator	4	99,98			
			Indikator	5	99,99			

N O	MISI	CAPAIAN (%)	SASARA N	CAPAIA N (%)	Indikator	CAPAIAN	
					IKU	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
					Indikator	6	100,00
					Indikator	8	100,00
					Indikator	9	100,00
					Indikator	10	100,00
					Indikator	11	100,00
					Indikator	12	100,00
			Sasaran 4	88,75	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	80,00
					Indikator	3	100,00
					Indikator	4	100,00
			Sasaran 5	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
2	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang terfokus pada wilayah ter-isolir, kurang berkembang, wilayah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah rentan bencana alam, kampung-kampung, kawasan pegunungan dan rawa-rawa	85,00	Sasaran 1	68,75	Indikator	1	62,69
					Indikator	2	100,00
					Indikator	3	100,00
					Indikator	4	50,00
			Sasaran 2	77,50	Indikator	1	80,00
					Indikator	2	83,33
			Sasaran 3	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
					Indikator	3	100,00
			Sasaran 4	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
					Indikator	3	100,00
			Sasaran 5	85,00	Indikator	1	85,00
					Indikator	2	80,00
					Indikator	3	75,00

N O	MISI	CAPAIAN (%)	SASARA N	CAPAIA N (%)	Indikator		CAPAIAN (%)
					IKU		
1	2	3	4	5	6	7	
					Indikator	4	100,00
			Sasaran 6	60,00	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	40,00
3	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih dan Melayani	83,13	Sasaran 1	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
					Indikator	3	100,00
					Indikator	4	-
					Indikator	5	100,00
			Sasaran 2	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
			Sasaran 3	45,00	Indikator	1	25,55
					Indikator	2	65,00
			Sasaran 4	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
			Sasaran 5	70,32	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
					Indikator	3	32,67
			Sasaran 6	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	1	100,00
			Sasaran 7	92,50	Indikator	1	100,00
			Sasaran 8	60,00	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	0,00
			Sasaran 9	92,50	Indikator	1	100,00
			Sasaran 10	92,50	Indikator	1	100,00
			Sasaran 11	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	0,00

NO	MISI	CAPAIAN (%)	SASARAN	CAPAIAN (%)	Indikator IKU	CAPAIAN (%)				
						3	7			
1	2	3	4	5	6	7	7			
					Indikator	3	100,00			
			Sasaran 12	92,50	Indikator	1	100,00			
			Sasaran 13	92,50	Indikator	1	100,00			
4	Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Konservasi Secara Berkelanjutan	85,23	Sasaran 1	92,50	Indikator	1	100,00			
			Sasaran 2	79,17	Indikator	1	-			
					Indikator	2	100,00			
					Indikator	3	75,61			
					Indikator	4	97,87			
					Indikator	5	100,00			
					Indikator	6	100,00			
			Sasaran 3	92,50	Indikator	1	100,00			
					Indikator	2	100,00			
			Sasaran 4	92,50	Indikator	1	100,00			
Indikator	2	100,00								
5	Mewujudkan Pembangunan Yang Terfokus kepada masyarakat, yaitu masyarakat miskin serta rentan kemiskinan, masyarakat ter-isolir dan masyarakat penyandang problem sosial	88,21	Sasaran 1	85,00	Indikator	1	66,67			
					Indikator	2	100,00			
					Indikator	3	100,00			
					Indikator	4	100,00			
			Sasaran 2	92,50	Indikator	1	100,00			
					Indikator	2	100,00			
					Indikator	3	100,00			
			6	Mewujudkan Percepatan Kapasitas Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Andalan	83,54	Sasaran 1	92,50	Indikator	1	95,88
								Indikator	2	0,00
								Indikator	3	100,00
Sasaran 2	92,50	Indikator				1	89,29			

N O	MISI	CAPAIAN (%)	SASARA N	CAPAIAN N (%)	Indikator	CAPAIAN	
					IKU	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	
					Indikator	2	100,00
					Indikator	3	100,00
			Sasaran 3	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	0,00
			Sasaran 4	85,00	Indikator	1	80,18
					Indikator	2	93,13
			Sasaran 5	92,50	Indikator	1	100,00
					Indikator	2	100,00
			Sasaran 6	92,50	Indikator	1	100,00

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis dihitung berdasarkan penjumlahan nilai pencapaian IKU dibagi dengan jumlah IKU. Hal ini dilakukan untuk menghindari *distorsi* perhitungan capaian kinerja sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni didukung oleh satuan kerja di bawahnya untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan.

Pengembangan Sistem AKIP akan terus kami laksanakan dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis telah ditetapkan 6 Misi, 7 Tujuan, 36 Sasaran Strategis, dan 105 Indikator Utama tahun 2018, kegiatan tersebut di atas untuk mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Periode Tahun 2016-2021.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan anggaran belanja dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp 1.735.915.156.780,31 dengan realisasi belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.382.925.243.452,00 atau 79,67% (angka sementara). Rendahnya penyerapan anggaran sebesar 79,67% masih bersifat sementara, hal ini disebabkan proses inputing SPJ ke SIMDA sedang berlangsung.

Capaian atas 6 Misi, 7 Tujuan, 36 Sasaran Strategis, dan 105 Indikator Utama, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
VISI											
TERWUJUDNYA KABUPATEN TELUK BINTUNI MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING											
MISI KE-I											
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, TRAMPIL DAN BERDAYA SAING											
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan	1. Peningkatan Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Dasar	130.604.371.206,00	106.675.540.020,00	81,68	1	Angka melek huruf	Persen	94,78	97,62	100,00
						2	Rata-rata Lama Sekolah	Rasio	8,30	7,45	89,76

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
	, Kesehatan, dan Kualitas Pembinaan Generasi Muda dan Masyarakat Teluk Bintuni	Dan Menengah				3	APM PAUD	Rasio	63,00	57,00	90,48
						4	APM SD	Rasio	95,32	91,62	96,12
						5	APM SMP	Rasio	67,32	82,26	100,00
						6	Angka Putus Sekolah SD	Persen	0,071	1,07	98,93
						7	Angka Putus Sekolah SMP	Persen	0,015	3,67	96,33
						8	Cakupan Guru yang memenuhi kualifikasi D.IV/SI	Orang	856	813,00	94,98
						9	Cakupan SD Terakreditasi A	Persen	8	3	37,50
						10	Cakupan SMP Terakreditasi A	Persen	5	2	40,00
						11	Jumlah Sekolah Kejuruan Berbasis Keuangan daerah yang	Unit	-	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
						dikembangkan					
		Capaian Kinerja Sasaran 1.1	130.604.371.206,00	106.675.540.020,00	81,68		Berhasil			79,50	
		1. Meningkatkan budaya dan Minat baca masyarakat	3.840.909.000,00	2.463.207.600,00	64,13	1	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan per tahun	Orang		2.210,00	100,00
						2	Cakupan Distrik yang memiliki perpustakaan umum	Persen		12,50	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 1.2	3.840.909.000,00	2.463.207.600,00	64,13		Sangat Berhasil			92,50	
		1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar Secara Merata Dan Terpenuhinya Kecukupan Gizi	135.297.020.493,00	114.492.594.174,00	84,62	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	59,60	59,48	99,80
						2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	(100 o/pd dk)	351/100.00 KH	0,002	99,99
						3	Angka Kematian Bayi	(100 o/pd dk)	15.65/1.00 KH	0,016	99,98

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
		Masyarakat				4	Angka Kematian Balita	(1000/pd dk)	-	0,003	99,99
						5	Cakupan Kampung UCI	Persen	100,00	100,00	100,00
						6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	90,00	100,00	100,00
						7	Prosentase Kasus Gizi Buruk Yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00
						8	Cakupan Temuan Penyakit Malaria Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00
						9	Cakupan Temuan HIV/AIDS tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
						10	Masyarakat Miskin Yang Terlayani Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00
						11	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Terlayani Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00
						12	Prosentase SPM Kesehatan Yang Sudah Terpenuhi	Persen	55,00	100,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 1.3	135.297.020.493,00	114.492.594.174,00	84,62		Sangat Berhasil				92,50
		1. Meningkatkan prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	1.837.750.000,00	1.077.928.000,00	58,65	1	Jumlah cabang olahraga berprestasi di tingkat Papua Barat ataupun nasional	Jumlah	4	6,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
						2	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	Jumlah	10	8,00	80,00
						3	Jumlah Organisasi Olah Raga Yang Aktif	Jumlah	7	7,00	100,00
						4	Jumlah Wirausahawan Muda Yang Dibina	Orang	2	2,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 1.4	1.837.750.000,00	1.077.928.000,00	58,65		Sangat Berhasil				88,75
		1.5 Peningkatan Keikutsertaan Dan Dukungan Pada Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kehidupa	17.895.344.013,00	10.949.751.638,00	61,19	1	Rasio akseptor KB	Rasio	87	98,62	100,00
						2	Cakupan Pelayanan KB	Persen	65,00	100,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
		n Keluarga										
		Capaian Kinerja Kinerja 1.5	17.895.3 44.013,0 0	10.949.7 51.638,0 0	61,1 9		Sangat Berhasil			92,50		
		CAPAIAN KINERJA MISI - I	289.475. 394.712, 00	235.659. 021.432, 00	81, 41		BERHASIL			84,84		
MISI KE-II												
MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG TERFOKUS PADA WILAYAH TER-ISOLIR,												
KURANG BERKEMBANG, WILAYAH PERBATASAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL,												
WILAYAH RENTAN BENCANA ALAM, KAMPUNG-KAMPUNG, KAWASAN PEGUNUNGAN DAN RAWA-RAWA												
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Publik	2.1	Meningkatnya Interkoneksi Infrastruktur Antar Distrik, Antar Kampung, dan Antar Kawasan	660.555.350.762,25	543.507.265.323,32	82,28	1	Prosentase Jalan dengan kondisi baik	Persen	82,10	51,47	62,69
							2	Persentase Jembatan dengan kondisi baik	Persen	82,10	82,10	100,00
							3	Prosentase Irigasi dengan kondisi baik	Persen	15,00	15,00	100,00
							4	Cakupan wilayah perkotaan	Persen	20,00	10,00	50,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
						n yang telah memiliki sistem sanitasi yang baik					
		Capaian Kinerja Sasaran 2.1	660.555.350.762,25	543.507.265.323,32	82,28		Berhasil			68,75	
		2. Meningkatkan kualitas Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	114.548.446.433,00	75.920.878.327,00	66,28	1	Cakupan Distrik yang telah memiliki RDRT	Persen	10,00	8,00	80,00
						2	Prosentase terbangunnya wilayah ibukota baru Kabupaten Teluk Bintuni	Persen	30,00	25,00	83,33
		Capaian Kinerja Sasaran 2.2	114.548.446.433,00	75.920.878.327,00	66,28		Berhasil			77,50	
		2.3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan perhubungan	41.146.551.996,96	37.601.171.999,00	91,38	1	Cakupan Penyelesaian Pelabuhan Babo sebagai Pelabuhan	Persen	30,00	30,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR				
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian
			(Rp)	(Rp)						
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
		gan antar distrik				an Peti Kemas dan Pelabuhan Samudra				
						2 Cakupan Penyelesaian Pembangunan Bandara Meyado	Persen	30,00	30,00	100,00
						3 Cakupan wilayah kampung yang telah terakses oleh pelayanan transportasi umum	Persen	8,00	8,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 2.3	41.146.551.996,96	37.601.171.999,00	91,38		Sangat Berhasil			92,50
	2.4	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan telekomunikasi	19.057.359.981,00	14.717.432.000,00	77,23	1 Cakupan distrik yang telah terlayani pelayanan	Persen	10,00	10,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR				
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian
			(Rp)	(Rp)						
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
						telekomunikasi seluler				
						2 Cakupan distrik yang telah dapat mengakses internet	Persen	10,00	10,00	100,00
						3 Terselenggaranya pelayanan informasi pada situs web Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni www.telukbintunikab.go.id	Ya/Tidak	Ya	Ya	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 2.4	19.057.359.981,00	14.717.432.000,00	77,23		Sangat Berhasil			92,50
		2.5 Meningkatkan layanan kebutuhan	33.821.589.972,00	29.978.090.000,00	88,64	1 Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	20,00	15,00	85,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
		n dasar perumahan dan kawasan permukiman				2	Cakupan Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	80,00	20,00	80,00
						3	Cakupan Rumah Tangga yang sudah terakses dengan air bersih	Persen	15,00	25,00	75,00
						4	Jumlah rumah tangga penerima program bantuan restorasi	RT	48,00	48,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 2.5	33.821.589.972,00	29.978.090.000,00	88,64		Berhasil				85,00
		2.6 Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Energi	5.379.000.000,00	4.591.500.000,00	85,36	1	Tingkat elektrifikasi	Persen	80,00	84,15	100,00
						2	Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas	Unit	5,00	2,00	40,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
		Capaian Kinerja Sasaran 2.2.6	5.379.000.000,00	4.591.500.000,00	85,36		Cukup Berhasil			60,00	
		CAPAIAN KINERJA MISI - II	874.508.299.145,21	706.316.337.649,32	80,77		BERHAIL			85,00	
MISI KE-III											
MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, BERSIH DAN MELAYANI											
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	3.1 Meningkatkan tertib administrasi, profesionalisme, dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	170.904.635.357,64	153.736.478.930,48	89,95	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Skor	C	C	100,00
						2	Tersusnya LPPD tepat waktu dan berkualitas	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,00
						3	Tersusnya LKPJ tepat waktu dan berkualitas	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,00
						4	Jumlah Pelayanan dasar yang sudah menerapkan SPM	Jenis	-	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
						5	Persepsi Masyarakat Bintuni terhadap tata kelola pelayanan publik melalui Indeks Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Bintuni	Persepsi	Meningkat	Meningkat	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 3.1	170.904.635.357,64	153.736.478.930,48	89,95		Sangat Berhasil				92,50	
		3.2	Meningkatnya kualitas legislasi penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	29.827.525.000,00	23.996.418.680,00	80,45	1	Jumlah Perda yang ditetapkan per tahun	Jumlah	10	10,00	100,00
						2	Keputusan DPRD yang diputuskan	Jumlah	16	24,00	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 3.2	29.827.525.000,00	23.996.418.680,00	80,45		Sangat Berhasil				92,50	

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
		3.3	Optimalnya pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	12.807.284.083,00	11.164.270.963,00	87,17	1	Cakupan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persen	75,00	19,16	25,55
						2	Prosentase OPD yang mendapat nilai >CC hasil penilaian Inspektorat	Persen	40,00	26,00	65,00	
			Capaian Kinerja Sasaran 3.3	12.807.284.083,00	11.164.270.963,00	87,17		Tidak Berhasil				45,00
		3.4	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	28.533.337.000,00	15.721.037.247,00	55,10	1	Prosentase Program RPJMD terhadap RKPD	Persen	100,00	100,00	100,00
						2	Cakupan SKPD yang sudah menyusun Restra dan Renja secara tertib	Persen	100,00	100,00	100,00	

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
		Capaian Kinerja Sasaran 3.4	28.533.337.000,00	15.721.037.247,00	55,10		Sangat Berhasil				92,50
	3.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	122.453.792.205,00	95.117.365.888,00	77,68	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00
						2	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan daerah	Persen	3,75	10,93	100,00
						3	Tingkat Pertumbuhan PAD	Persen	3	0,98	32,67
		Capaian Kinerja Sasaran 3.5	122.453.792.205,00	95.117.365.888,00	77,68		Cukup Berhasil				70,83
	3.6	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	16.750.874.131,50	6.722.636.630,00	40,13	1	Proentase Capaian aparatur yang telah memiliki kemampuan teknis yang disyaratkan	Persen	60,00	60,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
						(Diklatpim)						
						2	Prosentase jabatan terisi oleh PNS sesuai dengan keahliannya	Persen	100,00	100,00	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 3.6	16.750.874.131,50	6.722.636.630,00	40,13		Sangat Berhasil				92,50	
		3.7	Meningkatnya pelayanan umum di tingkat Distrik dan Kampung	12.225.419.003,00	6.052.863.998,00	49,51	1	Jumlah distrik dengan layanan terpadu	Jumlah	20	24,00	100,00
			Capaian Kinerja Sasaran 3.7	12.225.419.003,00	6.052.863.998,00	49,51		Sangat Berhasil				92,50
		3.8	Meningkatna pengelolaan arsip Pemerintah Daerah yang Baku, Tertib, Rapi dan Handal	1.410.885.000,00	443.185.000,00	31,41	1	Prosentase arsip daerah yang tertata dengan baik	Persen	20,00	20,00	100,00
							2	Cakupan arsip daerah yang telah	Persen	5,00	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
						terdigital					
		Capaian Kinerja Sasaran 3.8	1.410.885.000,00	443.185.000,00	31,41		Cukup Berhasil				60,00
		3.9 Meningkatkan tertib administrasi pertanahan sampai dengan di tingkat kampung	10.907.291.781,00	9.268.691.484,00	84,98	1 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan daerah	Persen	5,00	100,00	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 3.9	10.907.291.781,00	9.268.691.484,00	84,98		Sangat Berhasil				92,50
		3.10 Optimalnya penggunaan data statistik dalam pengambilan kebijakan	6.309.386.000,00	1.854.596.711,00	29,39	1 Jumlah dokumen data statistik dasar yang diterbitkan setiap tahun	Dokumen	5,00	100,00	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 3.10	6.309.386.000,00	1.854.596.711,00	29,39		Sangat Berhasil				92,50
		3.11 Meningkatkan kondusifitas daerah yang berkaitan	28.408.688.000,00	22.005.348.691,00	77,46	1 Cakupan penanganan kejadian yang mengga	Persen	100,00	100,00	100,00	

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
		dengan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				1	nggu trantibum				
						2	Jumlah petugas Satpol PP	Orang	-	-	-
						3	Cakupan rasio petugas linmas di kabupaten	Persen	40,00	40,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 3.11	28.408.688.000,00	22.005.348.691,00	77,46		Sangat Berhasil				92,50
		3.12 Meningkatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana	5.558.529.300,00	3.391.796.351,00	61,02	1	Indek Risiko Bencana	Indek	160	160,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 3.12	5.558.529.300,00	3.391.796.351,00	61,02		Sangat Berhasil				92,50
		3.13 Meningkatkan Tertib Administr	9.917.209.053,00	4.838.606.600,00	48,79	1	Cakupan Kepemilikan e-KTP	Persen	80,00	90,21	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
		asi Penduduk sampai dengan ditingkat Kampung										
		Capaian Kinerja Sasaran 3.13	9.917.20 9.053,00	4.838.60 6.600,00	48, 79		Sangat Berhasil			92,50		
		CAPAIAN KINERJA MISI - III	456.014. 855.914,1 4	354.313.2 97.173,4 8	77, 70		BERHASIL			83,13		
MISI KE-IV												
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN KONSERVASI SECARA BERKELANJUTAN												
4	Meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan	4.1	Meningkatnya Meningkatkan keamanan dan distribusi pangan di wilayah Teluk Bintuni	5.489.42 2.000,00	5.189.06 5.151,00	94, 53	1	Jumlah daerah rawan pangan (jumlah kampung rawan pangan)	Kampung	60,0 0	70,0 0	100,0 0
		Capaian Kinerja Sasaran 4.1	5.489.42 2.000,00	5.189.06 5.151,00	94, 53		Sangat Berhasil			92,50		
		4.2	Meningkatnya produktivitas	38.296.4 45.412,6 7	26.517.4 33.585,0 0	69, 24	1	Nilai Tukar Petani	Nilai	102, 00	-	-

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
	lingkungan	tas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian				2	Jumlah petani yang dilatih dalam bidang budidaya pertanian dan perkebunan	Kelompok	50,00	50,00	100,00
						3	Jumlah total produksi perikanan	Ton/Tahun	835,99	632,10	75,61
						4	Konsumsi ikan (kg/kapta/thn)	Kg/Kapta/Thn	47,00	46,00	97,87
						5	Prosentase kampung yang menerapkan pengelolaan sampah ramah lingkungan	Persen	20,00	20,00	100,00
						6	Jumlah Perda yang diundan	Perda	2,00	2,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR				
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian
			(Rp)	(Rp)						
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
						gkan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan				
		Capaian Kinerja Sasaran 4.2	38.296.445.412,67	26.517.433.585,00	69,24		Berhasil			79,17
		4.3 Optimalna pemanfaatan sumber daya kehutanan, Lingkungan Hidup	9.174.891.276,29	5.770.795.000,00	62,90	1 Cakupan fasilitas penanganan kasus kehutanan	Persen	100,00	100,00	100,00
						2 Jumlah Masyarakat di sekitar hutan yang diberdayakan	KK	48,00	48,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 4.2	9.174.891.276,29	5.770.795.000,00	62,90	Sangat Berhasil			92,50	
		4.4 Meningkatkan pengelolaan potensi	1.923.814.200,00	1.737.355.000,00	90,31	1 Tingkat elektrifikasi	Persen	75,00	84,15	100,00
						2 Cakupan fasilitas	Persen	100,00	100,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
		energi dan sumberdaya alam bagi pembangunan daerah				kasus pertambahan						
		Capaian Kinerja Sasaran 4.4	1.923.814.200,00	1.737.355.000,00	90,31		Sangat Berhasil			92,50		
		CAPAIAN KINERJA MISI - IV	54.884.572.888,96	39.214.648.736,00	71,45		SANGAT BERHASIL			85,23		
MISI KE-V												
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG TERFOKUS KEPADA MASYARAKAT, YAITU MASYARAKAT MISKIN												
SERTA RENTAN KEMISKINAN, MASYARAKAT TER-ISOLIR DAN MASYARAKAT PENYANDANG PROBLEM SOSIAL												
5	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	5.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat menuju kampung dan masyarakat berketahanan sosial	334.500.000,00	334.500.000,00	100,00	1	Prosentase jumlah organisasi dan lembaga kampung yang dibangun dan aktif	Lembag a	15,00	10,00	66,67
							2	Prosentase Aparat Pemerintahan yang sudah	Persen/K mp	40,00	40,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
							mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas					
						3	Jumlah Kampung yang sudah menyusun APBD Kampung	Persen/Kmp	40,00	40,00	100,00	
						4	Jumlah Kelompok Ekonomi Kampung yang terbentuk dan dibina	Kelompok	10,00	10,00	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 5.1	334.500.000,00	334.500.000,00	100,00		Berhasil				85,00	
		5.2	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di	17.169.222.000,00	13.521.766.698,00	78,76	1	Cakupan penanganan PMKS	Persen	100,00	100,00	100,00
							2	Rasio KDRT dan Penyeles	Rasio	100,00	100,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
		Teluk Bintuni				3	aian Pengaduan Perlindungan dan Anak dari Tindak Kekerasan					
						3	Prosentase kader perempuan jabatan publik dan politik	Persen	15,00	20,80	100,00	
		Capaian Kinerja Sasaran 5.2	17.169.222.000,00	13.521.766.698,00	78,76		Sangat Berhasil				92,50	
		CAPAIAN KINERJA MISI - V	17.503.722.000,00	13.856.266.698,00	79,16		SANGAT BERHASIL				88,21	
MISI KE-VI												
MEWUJUDKAN PERCEPATAN KAPASITAS EKONOMI DAERAH BERBASIS SEKTOR ANDALAN												
6.1	Meningkatkan Struktur Ekonomi Daerah	6.1.1	Meningkatkan daya saing investasi daerah	29.845.256.120,00	22.715.636.294,00	76,11	1	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rupiah	17,00	16,30	95,88
							2	Nilai CRS	Rupiah	-	-	-
							3	Lama waktu	Hari	10,00	10,00	100,00

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
	h yang berdasarkan potensi unggulan						pemrosesan perijinan investasi					
		Capaian Kinerja Sasaran 6.1.1	29.845.256.120,00	22.715.636.294,00	76,11		Sangat Berhasil				92,50	
		6.1.2	Meningkatnya ekonomi kerakyatan berbasis industri kreatif dan potensi daerah	415.215.000,00	367.715.000,00	88,56	1	Prosentase koperasi aktif	Persen	16,00	14,29	89,29
							2	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Persen	20,00	20,00	100,00
							3	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	Pasar	3,00	3,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 6.1.2	415.215.000,00	367.715.000,00	88,56		Cukup Berhasil				92,50	
	6.1.3	Meningkatnya pengembangan industri pengolahan potensi unggulan daerah	1.377.900.000,00	1.374.010.000,00	99,72	1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	Persen	8,50	8,50	100,00	
						2	Jumlah Industri Kecil yang	Unit		-		

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
						dibina daerah					
		Capaian Kinerja Sasaran 6.1.3	1.377.900.000,00	1.374.010.000,00	99,72		Sangat Berhasil				92,50
		6.1.4 Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	9.756.391.000,00	7.119.760.470,00	72,98	1	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	94,50	75,77	80,18
						2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,50	6,87	93,13
		Capaian Kinerja Sasaran 6.1.4	9.756.391.000,00	7.119.760.470,00	72,98		Berhasil				85,00
6.2	Mewujudkan potensi budaya lokal sebagai daya dukung pemb	6.2.1 Meningkatkan daya saing sektor pariwisata terpadu	282.400.000,00	282.400.000,00	100,00	1	Jumlah kunjungan wisata	Orang	150,00	150,00	100,00
						2	Jumlah ODTW baru yang akan dikembangkan	ODTW	1,00	1,00	100,00
		Capaian Kinerja Sasaran 6.2.1	282.400.000,00	282.400.000,00	100,00		Sangat Berhasil				92,50

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR						
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian		
			(Rp)	(Rp)								
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11		
	angutan strategis pariwisata	6.2.2	Meningkatnya Potensi dan Daya Dukung Seni Budaya Daerah	1.851.150.000,00	1.706.150.000,00	92,17	1	Jumlah even seni budaya tingkat regional dan nasional terselenggara	Event	2,00	2,00	100,00
			Capaian Kinerja Sasaran 6.2.2	1.851.150.000,00	1.706.150.000,00	92,17		Sangat Berhasil			92,50	
			CAPAIAN KINERJA MISI - VI	43.528.312.120,00	33.565.671.764,00	77,11		BERHASIL			83,54	
7	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pengelolaan	7.1	Terselenggaranya Program Dukungan Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan bagi Kepala Daerah	-	-		1	Persepsi kepuasan pegawai pemerintah daerah terhadap pelayanan kepegawaian	Skala liker t 1-10		6,63	Sedang
							2	Persepsi Kepuasan Pegawai Pemerintah Daerah atas	Skala liker t 1-10		7,16	Baik

NO	TUJUAN	SASARAN	ANGGARAN			INDIKATOR					
			TARGET	REALISASI	%	Uraian	Satuan	Target	Real	Capaian	
			(Rp)	(Rp)							
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	
	Keuangan Daerah										
						3	Persepsi kepuasan pegawai Pemerintah Daerah terhadap pelayanan sarpras (umum)	Skala liker t 1-10		6,56	Sedang
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017			1.735.915.156.780,31	1.382.925.243.452,80	79,67	CAPAIAN MISI I SD. VI TAHUN 2017				90,33	

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2017.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari

solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang kewenangan di Kabupaten Teluk Bintuni dapat diidentifikasi pada sub bagian berikut ini.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Bidang Pendidikan

- Masih terdapat sekitar 5,72 persen penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- Belum optimalnya angka partisipasi pendidikan (APK, APM dan APS) di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, rata rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 adalah sebesar 7,44 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP;

- Belum memadainya serta meratanya ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan dasar serta menengah terutama di wilayah distrik dan kampung;
- Belum memadainya jumlah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia tenaga pengajar untuk pendidikan dasar dan menengah;
- Banyak tenaga pengajar yang kurang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan masih sering meninggalkan tugasnya karena tidak bersedia menetap di lokasi tugasnya serta sering pergi ke kota dalam waktu yang relatif cukup lama. Kondisi ini mengakibatkan ada sebagian guru yang menanggung beban tugas melebihi porsi yang sebenarnya seperti harus mengajar lebih dari satu kelas pada waktu yang bersamaan;
- Belum berkembangnya program bidang pendidikan kejuruan yang terkait dengan keunggulan potensi daerah, khususnya di bidang perikanan dan kelautan, pariwisata dan pertanian.

Urusan Bidang Kesehatan

- Belum meratanya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat terutama di wilayah distrik dan kampung yang disebabkan oleh sulitnya transportasi;
- Belum memadainya ketersediaan fasilitas dasar kesehatan terutama di wilayah kampung dan distrik;
- Belum memadainya Ketersediaan dan kapasitas SDM tenaga medis dan para medis di wilayah kampung dan distrik;
- Peran tenaga medis dalam melakukan bantuan persalinan bayi belum cukup optimal, hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kelahiran yang dibantu oleh tenaga non medis;

- Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat;
- Cukup tingginya ancaman penyakit menular yang berkembang;
- Masih tingginya angka kesakitan pada masyarakat;
- Belum memadainya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- Belum memadainya upaya kesehatan lingkungan.

Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Masih cukup banyaknya ruas ruas jalan dalam kondisi rusak, tercatat pada tahun 2014, sebanyak 54 persen ruas jalan mengalami kerusakan parah dan hanya 17 persen jalan dalam kondisi baik;
- Belum memadainya persediaan air bersih untuk dikonsumsi rumah tangga, data BPS 2014 menunjukkan bahwa Air hujan merupakan sumber air minum utama bagi sebagian besar penduduk;
- Belum memadainya kondisi sanitasi dan prasarana pengairan lainnya telah mengakibatkan rendahnya produktifitas lingkungan;
- Masih kurangnya infrastruktur irigasi yang mampu menjangkau wilayah wilayah pertanian masyarakat;
- Belum memadainya penataan wilayah perkotaan Bintuni sebagai pusat Pemerintahan;
- Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah tentang struktur dan Pola tata ruang wilayah;
- Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang wilayah.

Urusan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapatnya daerah-daerah permukiman kumuh yang belum tertata dengan baik;
- Masih banyaknya jumlah penduduk yang belum memiliki rumah yang layak untuk ditempati;
- Mulai tumbuh pemukiman padat dan kumuh di sekitar pasar atau lokasi perniagaan dan tepi perairan;
- Belum memadainya dukungan utilitas wilayah permukiman, seperti listrik, air minum dan persampahan;
- Pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup.

Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

- Masih belum optimalnya tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu;
- Masih adanya potensi dan gangguan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara;
- Adanya potensi bencana yang mengancam ketentraman hidup masyarakat;
- Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat;
- Belum memadainya dukungan dan partisipasi dari berbagai kelompok dan kalangan masyarakat dalam menggalang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Belum memadainya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;

- Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Belum optimalnya penyiapan Mitigasi Bencana bagi daerah-daerah yang memiliki kerawanan bencana.

Urusan Bidang Sosial

- Jumlah penduduk yang masih cukup tinggi yang berada dalam kondisi pada garis kemiskinan;
- Masih cukup tingginya ketimpangan ekonomi antar golongan dan wilayah;
- Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;
- Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan pada masyarakat adat terpencil dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
- Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan social.

2.3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Bidang Tenaga Kerja

- Masih cukup tingginya tingkat pengangguran, BPS mencatat pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai sebesar 6,87 persen dari jumlah angkatan kerja;
- Relatif belum terintegrasinya perkembangan sektor investasi daerah terhadap penyerapan tenaga kerja lokal;
- Belum memadainya kemampuan dan keterampilan tenaga kerja terutama penduduk asli Kabupaten Teluk Bintuni.

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

- Belum terlaksananya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Masih belum munculnya inisiatif pembentukan organisasi dan lembaga yang berperan dalam bidang perlindungan Perempuan dan Anak;
- Masih adanya kasus Bayi dan BALITA yang kurang gizi;
- Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Masih adanya beberapa Buta Aksara Perempuan yang tersebar di kampung – kampung;
- Kurangnya pemahaman tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Hak Hidup Anak.

Urusan Bidang Pangan

- Belum memadainya ketersediaan data dan peta daerah rawan pangan;
- Belum adanya regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan bupati yang disusun untuk peningkatan ketahanan pangan;
- Belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga penyuluh pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan;
- Belum adanya data yang akurat terkait kelembagaan kelompok–kelompok pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di wilayah kabupaten Teluk Bintuni;
- Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan di Kabupaten Teluk Bintuni lintas sektoral;
- Belum optimalnya distribusi pangan antar wilayah di kabupaten Teluk Bintuni;
- Belum berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang ketahanan pangan.

Urusan Bidang Pertanahan

- Cukup tingginya konflik kepentingan pertanahan;
- Kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang hak atas kepemilikan tanah;
- Belum berkembangnya satu pola kemitraan yang saling menguntungkan diantara pemilik tanah lokal dengan investor dalam pengembangan sektor usaha tertentu.

Urusan Bidang Lingkungan Hidup

- Adanya ancaman perubahan iklim;
- Mulai tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan dibidang lingkungan hidup;
- Belum optimalnya pemantauan kualitas lingkungan;
- Sumber daya aparatur yang relatif masih terbatas kuantitas dan kualitasnya.

Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Cukup tingginya migrasi penduduk luar daerah/pendatang ke Kabupaten Teluk Bintuni seiring dengan perkembangan berbagai sektor ekonomi daerah;
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang;
- Belum tertatanya Administrasi Kependudukan secara baik;

- Belum tertatanya data-data kependudukan secara baik dan benar.

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Masih terdapatnya kampung-kampung terisolasi karena keterbatasan telekomunikasi dan kesulitan aksesibilitas transportasi;
- Belum optimalnya pengembangan kebijakan level Kabupaten yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa;
- Belum optimalnya pembentukan perangkat dan organisasi pemerintahan kampung;
- Belum memadainya administrasi pelayanan pemerintahan kampung;
- Rendahnya kapasitas SDM Pemerintahan kampung (Kepala Kampung, perangkat kampung dan BAMUSKAM) dalam melaksanakan tugas dan peran dan fungsinya sesuai dengan UU Desa;
- Rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan lainnya terhadap UU Desa dan turunannya;
- Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur kampung;
- Belum memadainya taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat Kampung.

Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam Ber KB;
- Masih cukup banyaknya angka kelahiran yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan yang terlatih;
- Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat;
- Belum memadainya jumlah dan kualitas Tenaga Pelayanan dan Penyuluhan KB.

Urusan Bidang Perhubungan

- Belum terkoneksinya wilayah Teluk Bintuni dengan jaringan transportasi yang memadai. Berdasarkan data BPS tahun 2015, Angkutan kota dan pedesaan di Kabupaten Teluk Bintuni jumlahnya sangat terbatas, hanya berjumlah 19 kendaraan angkutan umum (berplat kuning). Kondisi tersebut menjadikan warga bergantung kepada ojek kendaraan roda dua yang membuat biaya tinggi;
- Aksesibilitas yang belum merata, masih banyak distrik-distrik dan kampung-kampung yang belum terjangkau oleh layanan transportasi;
- Belum memadainya moda transportasi darat, laut dan udara untuk keluar masuk wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan udara (bandara);
- Belum memadainya fasilitas keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen transportasi.

Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Masih rendahnya cakupan pelayanan telekomunikasi seluler dan internet di wilayah Distrik-distrik, Kampung-kampung termasuk di wilayah perkotaan;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan website www.telukbintunikab.go.id dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika;

- Belum optimalnya monitoring, pemeliharaan dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi.

Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Rendahnya daya saing UMKM dan Koperasi, karena kualitas SDM yang rendah dalam pengelolaan manajemen, kelembagaan, pemasaran, dan penguasaan teknologi informasi;
- Belum optimalnya pelaksanaan CSR untuk peningkatan kapasitas Koperasi dan UMKM;
- Belum optimalnya upaya pembinaan koperasi dan UMKM;
- Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi terhadap sumber daya produktif yang meliputi tiga aspek penting, yaitu modal kerja, informasi dan pasar;
- Masih belum berkembangnya usaha-usaha kecil yang memanfaatkan potensi unggulan daerah.

Urusan Bidang Penanaman Modal

- Belum adanya *grand design* pengembangan investasi daerah yang berbasis pada pengembangan potensi ekonomi daerah;
- Belum optimalnya upaya promosi investasi pada investor domestik maupun asing;
- Belum memadainya Infrastruktur daerah sehingga belum menarik minat investasi;
- Masih lemahnya Daya Saing Daerah.

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

- Belum memadainya prestasi dan budaya olahraga di kalangan pemuda;

- Belum memadainya sarana dan prasarana pengembangan kegiatan kepemudaaan dan olahraga;
- Belum tergarapnya potensi dan partisipasi pemuda dalam percepatan pembangunan;
- Adanya kecenderungan budaya luar yang mempengaruhi moral para pemuda.

Urusan Bidang Statistik

- Belum optimalnya ketersediaan data data statistik pembangunan daerah;
- Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah, sehingga seringkali terjadi perbedaan data antara data BPS dan data yang dimiliki oleh SKPD;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pendataan dan statistik daerah.

Urusan Bidang Kebudayaan

- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dalam upaya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan;
- Belum adanya identifikasi, inventarisasi dan grand design pelestarian budaya asli Teluk Bintuni;
- Masih rendahnya pengelolaan situs sejarah dan kepurbakalaan Teluk Bintuni;
- Belum ditetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan kekayaan budaya Teluk Bintuni;
- Belum tertatanya situs-situs sejarah Teluk Bintuni;
- Rendahnya pembinaan kelompok seni dan tari;

- Perlunya penyelenggaraan even dan kegiatan seni budaya untuk mendukung pelestarian budaya Teluk Bintuni.

Urusan Bidang Perpustakaan

- Belum tersedianya fasilitas perpustakaan umum bagi masyarakat, baik di pusat kabupaten maupun di distrik-distrik serta kampung;
- Belum tumbuhnya minat dan budaya baca siswa dan masyarakat Teluk Bintuni pada umumnya;

Urusan Bidang Kearsipan

- Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mendokumentasikan berbagai kekayaan arsip daerah;
- Belum tertatanya arsip daerah.

2.3.3. Urusan Pilihan

Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Rendahnya pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan;
- Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dimiliki oleh nelayan;
- Semakin meluasnya kerusakan pantai;
- Rendahnya SDM nelayan dan pembudidaya serta pengelolah hasil perikanan;
- Kurangnya kelembagaan kelompok usaha perikanan;
- Terbatasnya pembiayaan permodalan usaha dari pihak perbankan;
- Masih rendahnya kesadaran hukum dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan.

Urusan Bidang Pariwisata

- Belum optimalnya Pengembangan destinasi dan objek pariwisata;
- Masih rendahnya kuantitas kunjungan wisatawan;
- Tidak memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata;
- Masyarakat belum memahami dengan baik tentang pengembangan pariwisata;
- Belum tersedianya fasilitas penunjang;
- Sumber daya manusia/aparatur yang terbatas.

Urusan Bidang Pertanian

- Skala usaha pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat yang masih subsisten;
- Belum memadainya kapasitas SDM aparatur dan Petani;
- Belum memadainya kuantitas dan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, peternakan dan perkebunan;
- Belum berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- Kurang memadainya sarana, prasarana dan teknologi produksi pertanian, peternakan dan perkebunan;
- Belum memadainya upaya pengembangan komoditas perkebunan untuk menopang mata pencaharian masyarakat.

Urusan Bidang Kehutanan

- Masih belum optimalnya upaya konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya;

- Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

- Masih rendahnya pemenuhan listrik bagi masyarakat yang ditandai dengan rendahnya tingkat elektrifikasi;
- Penggunaan energi listrik menggunakan energi baru dan terbarukan masih rendah, padahal peluang penggunaannya bervariasi mulai dari tenaga surya, mikro hidro maupun angin;
- Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan terhadap peraturan dan perundang-undangan di sektor energy dan sumber daya mineral.

Urusan Bidang Perdagangan

- Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktek-praktek perdagangan yang tidak seha;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan terutama di wilayah distrik dan kampung-kampung, seperti pasar tradisional, tempat penjualan ikan dan sebagainya;
- Belum tumbuhnya inisiatif berusaha dalam bidang perdagangan pada penduduk lokal Teluk Bintuni.

Urusan Bidang Perindustrian

- Pengembangan industri unggulan berbasis kekuatan lokal masih belum dikelola secara optimal, dan belum ditentukannya produk-produk unggulan yang akan dikembangkan sebagai produk khas Teluk Bintun;
- Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal;

- Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

3.1.1.1. Perkembangan PDRB

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Teluk Bintuni pada tahun 2022 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan perdagangan setelah pulih pasca pandemi Covid-19 dua tahun berturut-turut sebelumnya. Nilai PDRB Teluk Bintuni atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2022 mencapai 25,56 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 25,05 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,02 persen, menandakan telah berlangsungnya pemulihan ekonomi setelah tahun 2021 sebelumnya tumbuh minus 2,30 akibat pandemi Covid-19 yang melanda. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 11,24 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 14 mengalami pertumbuhan yang positif dan 3 sisanya bernilai negatif.

Empat belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif antara lain: lapangan usaha Listrik dan Gas sebesar 8,70 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 4,65 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,57 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,56 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,68 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,87 persen, dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 3,55 persen.

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018—2022

Lapangan Usaha/ Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	4,53	3,14	-4,89	1,28	-4,04
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	2,80	-1,48	2,18	-2,88	0,87
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,48	-1,32	1,32	-2,82	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	7,35	8,88	9,55	18,72	8,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	2,48	4,25	2,62	3,55	0,68
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	15,10	210,90	-4,36	2,90	-4,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	8,47	6,64	3,83	2,12	8,56
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	5,49	5,27	-22,06	-9,68	11,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	5,40	6,89	-12,37	3,87	8,20
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	7,68	9,85	7,68	5,52	4,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	1,94	9,03	31,18	-4,86	-2,40
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	8,25	7,97	-0,17	3,73	4,19
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	5,49	4,90	-3,16	1,03	3,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	6,12	4,82	-0,46	0,11	8,74
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,70	5,95	-5,51	1,44	5,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,55	5,87	9,53	13,43	5,57
R,S, T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	5,18	4,88	-0,51	12,96	3,10
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,25	3,41	1,06	-2,30	2,02

*Angka sementara / *Preliminary figures***Angka sangat sementara / *Very preliminary figures*

Sumber: PDRB Kab. Teluk Bintuni, 2023

3.1.1.2. Sumbangan Sektoral

PDRB kabupaten Teluk Bintuni lima tahun terakhir (2018-2022) didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Kedua lapangan usaha tersebut menyumbang mencapai 86,37 persen dari total PDRB Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2022. Lapangan usaha lainnya seperti pertanian, dan konstruksi rata-rata hanya menyumbang 3% dari total PDRB kabupaten Teluk Bintuni. Kontribusi atau share lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap PDRB kabupaten Teluk Bintuni rata-rata per tahun mencapai 50% selama lima tahun terakhir, sementara lapangan usaha pertambangan dan penggalian rata-rata berkontribusi 38,52% per tahun. Ketidakmerataan distribusi PDRB kabupaten Teluk Bintuni sampai saat ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah ke depan untuk menumbuhkan dan mengembangkannya yang diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Selama lima tahun terakhir, periode 2018-2022 sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni mengalami perubahan cukup signifikan, terutama pergeseran struktur ekonomi yang semula didominasi sektor industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian, sejak empat tahun terakhir (2019-2022) sektor konstruksi dan sektor pemerintahan telah menunjukkan peningkatan kontribusi cukup signifikan. Sektor konstruksi dan sektor pemerintahan di tahun 2022 masing-masing memberikan kontribusi 7,16 persen dan 2,25 persen, atau meningkat tajam bila dibanding kontribusi mereka di tahun 2016 yang masih sebesar 2,02 persen dan 2,10 persen.

Tabel 2.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Teluk Bintuni Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2018	2019	2020	2021*	2022**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	3,14	3,10	3,13	3,19	2,81	
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	38,57	36,17	36,68	36,57	35,81	
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	52,04	48,88	48,33	48,20	50,56	
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	2,75	8,33	8,13	8,32	7,16	
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	0,43	0,45	0,48	0,49	0,50	
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	0,19	0,20	0,15	0,13	0,13	
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	0,15	0,15	0,20	0,20	0,18	
L Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	2,15	2,14	2,29	2,28	2,25	
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	0,07	0,07	0,08	0,10	0,09	
R,S, T,U Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

*Angka sementara / Preliminary figures

**Anaka sanaat sementara / Very preliminary figures

Sumber: BPS. PDRB Kab. Teluk Bintuni, 2023

3.1.1.3. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Teluk Bintuni atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 459,63 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 482,42 juta rupiah. Sejak guncangan ekonomi yang melanda dunia dan ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, dunia usaha mengalami tekanan cukup berat hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi dan mengakibatkan PDRB per kapita Teluk Bintuni di tahun 2020 dan 2021 turun berturut-turut menjadi 357,98 juta rupiah dan 351,02 juta rupiah. Baru mulai 2022 PDRB per kapita mulai meningkat lagi menjadi 378,76 juta rupiah.

Tabel 2.3. Nilai PDRB (ADHK/ADHK) dan PDRB Per Kapita Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018-2022

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB/ at current price	28 998,66	31 332,44	31 006,05	31 380,55	34 935,20
- ADHK/ at 2010 Constant Price	24 542,83	25 380,15	25 648,78	25 058,62	25 564,58
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta rupiah/Million rupiahs)					
- ADHB/ at current price	459,63	482,42	357,98	351,02	378,76
- ADHK/ at 2010 Constant Price	389,01	390,77	296,13	280,28	277,16
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	3,08	0,45	-24,22	-5,35	-1,11
Jumlah Penduduk (orang)/ <i>Population (People)</i>	63 091	64 949	86 614	89 418	92 236
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ <i>Population Growth (Percent)</i>	2,1	2,94	33,36	3,24	3,15

*Angka Sementara / *Preliminary figures*

**Angka Sangat Sementara / *Very preliminary figures*

3.1.1.4. Jenis dan Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Teluk Bintuni, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di

Kabupaten Teluk Bintuni sehingga pengukuran inflasi Kabupaten Teluk Bintuni mengacu pada perkembangan inflasi daerah terdekat yang diukur angka inflasinya yaitu Kabupaten Manokwari. Gambaran inflasi Kabupaten Manokwari inilah yang kemudian diasumsikan dapat mewakili inflasi di Kabupaten Teluk Bintuni karena karakteristik wilayah kedua daerah tersebut memiliki persamaan dan berbatasan langsung. Inflasi di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Provinsi Papua Barat.

Jika yang diacu sebagai inflasi Kabupaten Teluk Bintuni adalah Kabupaten Manokwari, maka Inflasi di kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, laju inflasi sebesar 1,18 persen, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,27 persen. Namun demikian, pada tahun 2018 terjadi peningkatan laju inflasi menjadi 1,37 persen. Mengalami penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 0,68 persen dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 1,3 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Papua Barat, dari tahun 2016-2020 inflasi di Provinsi Papua Barat selalu lebih rendah dibandingkan inflasi di Manokwari.

3.1.1.5. Tingkat Investasi

Investasi asing dan domestik yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Tingkat kriminalitas di suatu wilayah akan mempengaruhi iklim investasi di wilayah tersebut. Dengan tingkat kriminalitas yang rendah pada suatu wilayah, maka akan tercipta iklim investasi yang kondusif mengingat dengan kondisi keamanan yang terjamin maka investor akan lebih tenang dalam menanamkan

modalnya terutama terkait dengan investasi jangka panjang pada sektor riil. Selain itu, dengan rendahnya kriminalitas, maka ketidakpastian dalam berusaha dapat diminimalkan karena terawasinya pungutan liar yang sangat memberatkan bagi investor. Selama periode 2016-2020, angka kriminalitas di Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam kategori yang rendah.

3.1.1.6. Pengangguran

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal misalnya ketersediaan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas, dan lain-lain.

Isu penting ketenagakerjaan adalah persoalan pengangguran yakni jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang tidak memperoleh/terserap dalam lapangan pekerjaan. Kabupaten Teluk Bintuni memiliki proporsi angkatan kerja yang lebih tinggi dibanding bukan angkatan kerja. Selain itu, proporsi jumlah penduduk yang bekerja juga jauh lebih tinggi dibanding pengangguran terbuka. Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian Teluk Bintuni berlangsung dengan baik, produktivitas masyarakat pun cukup terlihat, kemandirian dan ketertiban dapat terkendali. Secara spesifik proporsi dan pertumbuhan penduduk usia kerja antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja pada kurun waktu 2011-2018.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2022

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja <i>Economically Active</i>	21 578	10 749	32 327
Bekerja/ <i>Working</i>	19 412	10 142	29 554
Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	2 166	607	2 773
Bukan Angkatan Kerja <i>Economically Inactive</i>	4 824	9 403	14 227
Sekolah/ <i>Attending School</i>	1 911	1 606	3 517
Mengurus Rumah Tangga <i>Housekeeping</i>	1 067	7 421	8 488
Lainnya/ <i>Others</i>	1 846	376	2 222
Jumlah/Total	26 402	20 152	46 554

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yang tergolong dalam kelompok penduduk angkatan kerja berjumlah 32.327 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.554 jiwa atau 91,42 persen telah terserap atau masuk di dalam dunia kerja, sementara 2.773 jiwa atau 8,58 persen masih menganggur atau belum terserap ke dalam dunia kerja. Persentase jumlah penduduk menganggur pada tahun 2020 sudah cukup

3.1.1.7. Kemiskinan

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2010-2015, garis kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami

kenaikan setiap tahun dari Rp389.419/kapita/bulan pada tahun 2010 (Juli) menjadi sebesar Rp549.390/kapita/bulan pada tahun 2015 (Desember).

Dari data BPS Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan angka kemiskinan memiliki kecenderungan yang terus menurun selama lima tahun terakhir. Hal tersebut seiring dengan beragam program pembangunan daerah yang secara berkesinambungan terus digulirkan oleh pemerintah daerah. Di bulan September 2016 tingkat kemiskinan masih pada level 34,72 persen, kemudian tahun 2018 turun pada angka 31,30 persen, dan sampai dengan September tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni telah berhasil diturunkan pada angka 29,39 persen.

Perlu diingat, walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni, namun angka tersebut masih tergolong sangat tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di tingkat nasional yang berada pada kisaran 10-11 persen. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni akan mengalami peningkatan lagi jika banyak penduduk Kabupaten Teluk Bintuni masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Teluk Bintuni masih cukup tinggi seperti dengan Kabupaten Kaimana, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan yang merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin yang terendah di Provinsi Papua Barat, dengan persentase penduduk miskin di bawah 20 persen. Secara umum, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat sebanyak 27,04 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase

penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2015-2020 terus mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan, yang artinya semakin mendekati keluar dari kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode tahun 2015-2020 Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni telah menunjukkan tren penurunan. Penurunan indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni semakin berkurang.

3.1.1.8. Ketimpangan

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain adalah rasio gini. Rasio Gini merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) *Gini Ratio* >0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) *Gini Ratio* 0,4–0,5 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) *Gini Ratio*

<0,4 yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

Selama periode 2018-2020, rasio Gini Kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio Gini Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 0,39, kemudian menurun di tahun berikutnya menjadi sebesar 0,36 pada tahun 2019, kemudian rasio Gini mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 0,39 pada tahun 2020. Angka rasio Gini sebesar 0,32 tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Teluk Bintuni masuk kategori ketidakmerataan rendah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Pandemi COVID-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih akan berlanjut pada tahun 2022. Pada saat yang sama, pemerintah akan melanjutkan agenda reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19. Upaya akselerasi pemulihan dan reformasi struktural perekonomian diarahkan untuk mendorong perekonomian kembali ke tingkat sebelum krisis dan terus tumbuh dengan lebih baik.

Seiring dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan perkiraan vaksinasi yang baru mencapai herd immunity pada awal tahun 2023, agenda pemulihan ekonomi masih menjadi bagian penting dalam rangka mencapai sasaran kerangka ekonomi makro pemerintah Indonesia di tahun 2022. Langkah kebijakan untuk memastikan terkendalinya pandemi COVID-19 masih akan menjadi prioritas. Demikian pula, bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga tetap perlu diberikan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan terutama pada sektor yang terkena dampak besar dari pandemi COVID-19.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan kembali melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022, di antaranya melalui perbaikan iklim investasi, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan langkah kebijakan yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut, tahun 2022 akan memberikan fondasi yang kuat bagi proses transformasi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah-panjang. Upaya redesign transformasi ekonomi sangat dibutuhkan, mengingat dampak pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru, yang menjadi perhatian khusus dalam penentuan sasaran pembangunan jangka menengah-panjang.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan menganalisa pola pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2022-2026 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Teluk Bintuni dalam lima tahun yang akan datang dengan basis data awal APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018-2020. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperkirakan total pendapatan daerah akan mengalami penurunan yang cukup signifikan yang terutama disebabkan oleh menurunnya harga komoditas sumber daya alam dan pertambangan di pasar internasional yang berakibat pada menurunnya pendapatan negara dari sektor migas dan pertambangan yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam.

Berdasarkan realisasi anggaran, pendapatan daerah kabupaten Teluk Bintuni lima tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.841.304 juta. Diproyeksikan pada

akhir periode RPJMD 2021-2026, pendapatan daerah akan kembali pulih menjadi sebesar Rp 2.255.462 juta. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan masih tetap berasal dari bagi hasil sumber daya alam, namun demikian pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami akselerasi seiring dengan berkembangnya sektor perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, 2022-2026 (Rp Juta)

KODE	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	r (%)
4.	Pendapatan Daerah	1.751.955,03	1.842.628,16	1.938.057,38	2.038.494,01	2.144.202,75	2.255.462,35	5,18%
4.1	Pendapatan Asli	66.714,19	68.964,55	71.297,79	73.717,00	76.225,39	78.826,31	3,39%
4.1.1	Pajak Daerah	38.394,19	39.929,95	41.527,15	43.188,24	44.915,77	46.712,40	4,00%
4.1.2	Retribusi Daerah	3.060,00	3.151,80	3.246,35	3.343,74	3.444,06	3.547,38	3,00%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	20.760,00	21.382,80	22.024,28	22.685,01	23.365,56	24.066,53	3,00%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.632.460,98	1.719.210,27	1.810.578,95	1.906.813,53	2.008.173,64	2.114.932,82	5,31%
4.2.1	Pendapatan Transfer	1.025.246,43	1.081.634,99	1.141.124,91	1.203.886,78	1.270.100,55	1.339.956,08	5,50%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar	607.214,55	637.575,28	669.454,04	702.926,74	738.073,08	774.976,74	5,00%
4.3.	Lain-lain Pendapatan	52.779,86	54.453,34	56.180,63	57.963,49	59.803,73	61.703,22	3,17%
4.3.1	Pendapatan Hibah	43.771,36	45.084,50	46.437,04	47.830,15	49.265,05	50.743,01	3,00%
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.008,50	9.368,84	9.743,59	10.133,34	10.538,67	10.960,22	4,00%
5	Belanja Daerah	2.048.419,42	2.137.736,78	2.231.073,14	2.326.418,47	2.425.952,96	2.529.864,49	4,32%
5.1	Belanja Operasi	1.329.619,49	1.388.816,04	1.450.705,61	1.515.412,56	1.583.067,04	1.653.805,29	4,46%
5.1.1	Belanja Pegawai	320.986,37	336.233,23	352.204,31	368.934,01	386.458,38	404.815,15	4,75%
5.1.2	Belanja Barang dan	782.325,80	819.486,28	858.411,88	899.186,44	941.897,80	986.637,94	4,75%
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-

B Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

5.1.5	Belanja Hibah	226.307,31	233.096,53	240.089,43	247.292,11	254.710,87	262.352,20	3,00%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	
5.2.	Belanja Modal	458.493,10	480.182,29	502.919,62	524.561,35	547.147,89	570.720,90	4,52%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.909,98	6.057,73	6.209,17	6.364,40	6.523,51	6.686,60	2,50%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.024,12	46.374,85	47.766,09	49.199,08	50.675,05	52.195,30	3,00%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan	109.975,27	115.474,04	121.247,74	126.703,89	132.405,56	138.363,81	4,75%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	288.222,08	302.633,19	317.764,85	332.064,27	347.007,16	362.622,48	4,75%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.761,64	6.964,49	7.173,43	7.388,63	7.610,29	7.838,60	3,00%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09	2.926,32	3.014,11	3,00%
5.3	Belanja Tidak Terduga	62.241,43	64.731,09	67.320,34	70.013,15	72.813,68	75.726,22	4,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	62.241,43	64.731,09	67.320,34	70.013,15	72.813,68	75.726,22	4,00%
5.4	Belanja Transfer	198.065,40	204.007,36	210.127,58	216.431,41	222.924,35	229.612,08	3,00%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	
5.4.2	Belanja Bantuan	198.065,40	204.007,36	210.127,58	216.431,41	222.924,35	229.612,08	3,00%
	Surplus/Defisit	(296.464,39)	(295.108,62)	(293.015,77)	(287.924,46)	(281.750,21)	(274.402,14)	-1,26%

KODE	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	r (%)
6	Pembiayaan Daerah	296.669,90	295.108,62	293.015,77	287.924,46	281.750,21	274.402,14	-1,28%
6.1	Penerimaan	311.669,90	310.108,62	308.015,77	302.924,46	296.750,21	289.402,14	-1,22%

6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	100.000,00	110.108,62	108.015,77	102.924,46	96.750,21	89.402,14	-0,63%
6.1.2	Pencairan Dana	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	211.669,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-1,38%
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-	-	-	-	
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	-	-	-	-	-	
6.2	Pengeluaran	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	

KODE	URAIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	r (%)
------	-------	------	------	------	------	------	------	-------

6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	205,51	-	-	-	-	0,00	

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2016– 2020

3.2.1.2. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi SiLPA tahun 2021-2026 diperkirakan rata-rata hanya sebesar Rp.101.440.239.213 per tahun atau jauh dibawah realisasi selama periode tahun 2016-2020. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini:

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan KabupatenTeluk Bintuni, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022-2026 (Rp)

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	1.952.736.781.420	2.046.073.142.974	2.141.418.466.733	2.240.952.960.389	2.344.864.492.193
PENDAPATAN DAERAH	1.842.628.163.009	1.938.057.376.081	2.038.494.008.448	2.144.202.748.880	2.255.462.351.224
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	110.108.618.411	108.015.766.893	102.924.458.284	96.750.211.509	89.402.140.968
PENDAPATAN MENGIKAT	261.491.478.155	275.873.509.454	291.046.552.473	307.054.112.860	323.942.089.067
DAK	134.567.823.145	141.969.053.418	149.777.351.356	158.015.105.681	166.705.936.493
Dana Penyesuaian	126.923.655.010	133.904.456.036	141.269.201.118	149.039.007.179	157.236.152.574
BELANJA MENGIKAT	735.190.872.314	766.531.609.820	798.927.586.079	832.739.578.288	868.031.054.911
Belanja Pegawai	336.233.227.431	352.204.305.734	368.934.010.257	386.458.375.744	404.815.148.592
Belanja Transfer	204.007.358.910	210.127.579.677	216.431.407.068	222.924.349.280	229.612.079.758
Belanja langsung terkait dengan Rutin OPD (15% dari belanja barang dan jasa + modal)	194.950.285.973	204.199.724.409	213.562.168.755	223.356.853.264	233.603.826.562
BELANJA WAJIB	389.900.571.946	408.399.448.817	427.124.337.509	446.713.706.529	467.207.653.123
Belanja Pendidikan(20% dari belanja barang dan jasa + modal)	259.933.714.631	272.266.299.211	284.749.558.340	297.809.137.686	311.471.768.749
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	129.966.857.315	136.133.149.606	142.374.779.170	148.904.568.843	155.735.884.374

Sumber: Diolah da Laporan Realisasi APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2016– 2020

3.2.1.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2021-2026 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.2 diatas.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwasaja umlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan

sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan nodal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Teluk Bintuni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta diupayakan untuk memperoleh Dana Penyesuaian Bidang Infrastruktur yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
- b) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- c) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Penggunaan dana transfer diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman dipertkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - 2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang

dibutuhkan masyarakat;

- 4) Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

f. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Penganggaran gaji tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;

- 5) Belanja pegawai sambil menunggu penetapan pagu anggaran indikatif dana perimbangan, maka pengalokasian anggaran masih menggunakan pagu anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya. Setelah dana perimbangan telah ditetapkan pemerintah, maka belanja pegawai dianggarkan dengan memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok sebesar 20% dan "accres" gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai terutama akibat adanya penerimaan pegawai baru;
- 6) Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- 7) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
- 8) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

g. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
- 2) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
- 3) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- 4) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 5) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi dan air agar mempedomani Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air yang diubah menjadi Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air;
- 6) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
- 7) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;

- 8) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat; dan
- 9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atasundangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.

h. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:

- 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) merupakan objek pemeliharaan;
- 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

i. Belanja DPRD

- 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

- 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
- 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan
- 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat

dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.

- j. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
 - 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- k. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- l. Belanja Subsidi
 - 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

- 2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

m. Bantuan Sosial

- 1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

n. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;

- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

p. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit,

ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kabupaten Teluk Bintuni selama kurun waktu tahun 2018 s.d 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018-2022
(Juta Rupiah)**

	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1.827.391	2.960.768	2.652.817	1.829.956	2.773.599
2	Belanja Daerah	1.927.552	2.357.021	2.976.360	1.965.109	2.470.728
	Surplus/Defisit	(100.161)	603.747	(323.543)	(135.153)	302.870
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	218.842	(150)	358.262	195.168	30.326
	Pengeluaran	119.419	244.523	36.000	4.943	202.940

	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
	Pembiayaan Daerah					
	Pembiayaan Netto	99.422	(244.674)	322.262	190.225	(172.614)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	(739)	359.073	(1.281)	55.072	130.256

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2018–2022

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) berfluktuasi, terkadang masih ada sisa anggaran yang sengaja direncanakan untuk digunakan pada awal-awal tahun berikutnya, seperti SIPLA tahun 2016 dan tahun 2019. Tetapi juga, beberapa kali SILPA tidak menyisakan anggaran untuk tahun berikutnya, disebabkan kebijakan defisit anggaran yang ditempuh pemerintah yang begitu besar demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak cukup mampu ditutup dari pembiayaan. Kondisi fluktuasi SIPLA disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.5 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018-2022

	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.827.391	2.960.768	2.652.817	1.829.956	2.773.599
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.927.552	2.357.021	2.976.360	1.965.109	2.470.728
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah	119.419	244.523	36.000	4.943	202.940
	Surplus/Defisit Riil	(219.580)	359.224	(359.543)	(140.096)	99.931

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA 2018–2022

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Kabupaten Teluk Bintuni mengalami defisit pada tahun 2018, 2020, dan 2021 dan mengalami surplus pada tahun 2019 dan 2022. Hal ini disebabkan komitmen pemerintah daerah yang cukup besar untuk teguh menerapkan defisit kebijakan anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan manusia di kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,

pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (satu tahun ke depan).

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagaimana Tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Membangun Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Terampil dan Berdaya Saing			
Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Teluk Bintuni	Meningkatnya pemenuhan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat Teluk Bintuni	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumber daya dan manajemen pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
			Fasilitasi layanan pendidikan inklusi
	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	Pengembangan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat kampung
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana event seni budaya di tiap distrik
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
	Meningkatnya pembangunan kepemudaan dan olahraga	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
			Meningkatkan sarana prasarana olahraga
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan SDM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			bidang kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan kampung
			Penambahan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
	Terkendalinya angka kelahiran	Penguatan Program Keluarga Sehat	Penyebarluasan program keluarga sehat sampai dengan kampung
			Fasilitasi pendampingan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat
			Fasilitasi alat kesehatan keluarga
			Penyediaan layanan konseling keluarga
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial	Penguatan dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contoh pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan life skill dan economic skill
			Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
			Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana
Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
dan anak			Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja lokal	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul
			Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah
			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan job training
			Standarisasi sarana prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi Ketenagakerjaan
Misi 2: Membangun Infrastruktur Daerah yang Terfokus pada Wilayah Terisolir, Tertinggal dan Kurang Berkembang			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	Memantapkan penyediaan infrastuktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran
			Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di wilayah strategis
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Teluk Bintuni
			Pembangunan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan dan wilayah Kabupaten Teluk Bintuni guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah
			Pengembangan peta digital ruang wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dalam mendukung kebijakan SATU DATA
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
		Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor
			Peningkatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Misi 3: Membangun Perekonomian Daerah berbasis Sektor Andalan untuk Kesejahteraan Masyarakat;			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM,	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan serta ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis kampung			
			Pengembangan kawasan agropolitan
			Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan sistem pemasaran produk agro
			Pengembangan komoditas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			unggulan peternakan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran organik
		Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan kampung
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumber daya lokal
			Peningkatan keamanan pangan
		Peningkatan produksi dan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan produksi perikanan tangkap
			Pengembangan produksi dan nilai tambah perikanan budidaya
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
			Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
Meningkatkan daya saing sektor UMKM,	Meningkatnya kontribusi	Peningkatan Fasilitas Pengembangan Usaha	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
perdagangan daerah dan industri	UMKM dalam perekonomian daerah	Kecil Menengah dan Koperasi	pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi
			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirausahawan baru
			Peningkatan Akses pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
			Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan stakeholder potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni
			Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			barang penting di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Bintuni
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
			Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas	Roadmap pengembangan potensi sektor Industri Kabupaten Teluk Bintuni
			Fasilitasi kemitraan usaha industri kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
Meningkatkan daya saing pemberdayaan masyarakat dan	meningkatnya kontribusi pariwisata sektor bagi	Peningkatan pariwisata lokal berbasis kampung	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
pariwisata daerah yang berwawasan lingkungan	perekonomian daerah	dan kawasan	
			Pengembangan Kampung Wisata & Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonektivitas antar obyek wisata
	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa/kampung	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan kampung dalam Pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi peran lembaga kampung dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi kampung
			Penguatan kapasitas pemerintahan kampung
			Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Kampung sebagai upaya meningkatkan perekonomian kampung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian kampung
			Sinergitas program pemerintah dengan kampung
Misi 4: Mengelola Sumber Daya Alam dan Investasi secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat;			
Meningkatkan daya saing investasi daerah yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan iklim kondusif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang meyerap tenaga kerja lokal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Pengembangan peta digital potensi investasi kabupaten Teluk Bintuni
			Peningkatan promosi potensi penanaman modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
			Pengendalian Pelaksanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Penanaman Modal
			Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengawasan lingkungan di tingkat distrik, seperti satgas yang didukung ketentraman dan ketertiban (trantib)
			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan, sekolah, distrik, dan kampung.
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis kampung atau distrik
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Inovatif dan Melayani;			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, profesionalitas dan penyelenggaraan	Percepatan penerapan kebijakan reformasi birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	pemerintahan di daerah		
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penguatan kapasitas perencanaan daerah
			Optimalisasi peran Dewan Riset Daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
			Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
			Pemberian reward and punishment di jajaran birokrasi
			Penataan dan penguatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			organisasi
			Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur
			Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
	Meningkatnya kualitas seluruh pelayanan publik dan informasi publik berbasis IT	Digitalisasi birokrasi, informasi dan layanan publik	Penyiapan roadmap dan masterplan digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik
			Pengembangan e-government
			Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan ekonomi digital (e-commerce)
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio
			Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik
			Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik
			Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
	Meningkatnya	Penguatan dan	Perumusan pengarusutamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	kerukunan umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	kampanye nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan Perangkat Daerah
			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di tingkat kampung
Misi 6: Mewujudkan Kabupaten Teluk Bintuni yang Damai dan Harmonis dalam Keberagaman			
Meningkatkan kondusivitas daerah	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan kerenrtaman dan ketertiban umum (trantibum)
			Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			Monitoring bersama masyarakat secara berkala
	Meningkatkan ketahanan daerah	Optimalisasi dan penguatan peran	Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	terhadap bencana	pemerintah, masyarakat, dan swasta berbasis kampung tangguh bencana	bencana ada di semua elemen
			Pengembangan kampung tangguh bencana

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pemerintah dalam rapat kerja dengan DPR, Senin 5 Juni 2023 menyampaikan target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

- pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen,
- tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen,
- tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7
- Rasio Gini 0,374-0,377,
- indeks pembangunan manusia 73,99-74,02,
- penurunan emisi gas rumah kaca 27,27,
- Nilai Tukar Petani 107-110, dan
- Nilai Tukar Nelayan 105-108.

Adapun arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah dalam RKP 2024 merumuskan strategi kebijakan sebagai berikut: pertama, bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Kedua, pemberdayaan sosial dan ekonomi yang memberikan jaminan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. Ketiga, secara parsial perluasan akses pelayanan dasar untuk membangun SDM. Untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, berdasarkan metode 2,15 USD PPP, pemerintah dituntut mengentaskan 6,7 juta jiwa penduduk miskin atau sekitar 3,35 juta jiwa per tahun. Adapun dalam mengurangi pengangguran pasca pandemi Covid-19, terdapat dua kebijakan yaitu memulihkan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan angkatan kerja yang berkualitas

dan produktif.

Di bidang Kesehatan, meski telah mengalami kinerja yang meningkat, beberapa indikator kesehatan masih menjadi permasalahan besar dalam RKP 2024, yakni imunisasi dasar lengkap, stunting balita, wasting balita, insidensi tuberkulosis, imunisasi malaria, imunisasi kusta, merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terakreditasi, dan Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar. Upaya penurunan stunting pada RKP Tahun 2024 yaitu pertama, pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga di desa. Kedua, perluasan cakupan penyediaan makanan tambahan ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus. Ketiga, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap. Keempat, penguatan kualitas data surveilans mulai dari unit pelayanan kesehatan terkecil.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan intervensi kunci pada RKP 2024. Pertama, penyediaan akses air minum jaringan perpipaan. Kedua, penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) aman. Ketiga, eliminasi buang air besar sembarangan tertutup dan terbuka. Keempat, penyediaan akses rumah layak huni. Kelima, pembinaan kepada pemda dan penyelenggara layanan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2024

Dalam Musrenbang RKPD Papua Barat Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Mei 2023 di Manokwari, tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pertama, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan sumber daya manusia.

2. Kedua, peningkatan tata Kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public.
3. Ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Keempat, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan
5. Kelima percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan menetapkan prioritas pembangunan.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP tahun 2024 diatas, pembangunan provinsi Papua Barat sebagaimana RKP tahun 2024, serta pembangunan kabupaten Teluk Bintuni tahun 2024 sesuai RPJMD 2021-2026, maka prioritas pembangunan Teluk Bintuni tahun 2024 diarahkan untuk :

Program Pro Rakyat

- 1) Melanjutkan Program Padat Karya di 28 Distrik dari 1 Milyar menjadi 2 Milyar per Distrik
- 2) Melanjutkan Program Bantuan Modal Usaha untuk pengusaha Lokal dari 5 Milyar menjadi 10 Milyar Pertahun
- 3) Membangun Perumahan Rakyat sebanyak 500 Unit bagi masyarakat pegunungan pesisir dan perkotaan
- 4) Melanjutkan Program Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah dan Kegiatan Keagamaan
- 5) Mendidik dan melatih Sumber Daya Manusia sebanyak 400 orang per tahun dengan spesifikasi Skapolding Welder, Rigger, Electrical, Mekanikal dan Pipefitter
- 6) Menyiapkan Beasiswa tambahan bagi mahasiswa mahasiswi Orang Asli Papua 7 Suku xgdan Papua Lainnya yang berprestasi

- 7) Memprogramkan bantuan beasiswa khusus bagi anak-anak Orang Asli Papua 7 suku yang berminat menjadi Dokter Penerbang Teknik Sipil Arsitektur dan Teknik Perminyakan dan Teknik Perkapalan.

Agenda Prioritas

- 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Akses dan kualitas Kesehatan
- 2) Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Ketimpangan Wilayah
- 3) Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja berbasis Pelatihan
- 4) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Andalan
- 5) Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh dan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, dan infrastruktur Sosial, Budaya dan Adat
- 7) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Inovatif dan Melayani
- 8) Mendorong Perusahaan Daerah Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjadi Agen Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan
- 9) Menciptakan Harmoni Kehidupan Masyarakat yang Damai dan Harmonis dalam Keberagaman.

Selain program prioritas di atas, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 ditujukan pada proyek-proyek utama (Major Project) sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Pelabuhan Muturi Menuntaskan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pelabuhan dan Urusan Tanah serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan jalan layang menuju lokasi Pelabuhan (11,5 Km)

- 3) Penyelesaian pengadaan tanah untuk (1) Lokasi Pelabuhan Muturi 8 Ha, (2) Brigif 25 Ha, muka 55 juta, (3) Brimob 20 Ha, uang muka 1.95 Milyar, Pengadilan Negeri 2 Ha, Pengadilan Agama 100 x 50 (1/2 Ha), Lanal 4 Ha, (4) Rest Area 8 Ha sudah bayar 750 jt, (5) Bumi Perkemahan 23 Ha, 6) Kota Baru Mandiri 32 Ha, uang muka 750 jt, dan 7) Kawasan Pengembangan SDM Terintergrasi 23 Ha, Basarnas 2 Ha, 8) Pengadaan tanah Kawasan industri 50Ha, BPN 1 Ha, Kodim 5 Ha, Kejaksaan 2 Ha, Bea cukai 1 Ha)
- 4) Land Clearing dan Penimbunan Tanah Lanal Al sp 1 Mnimeri di Kabupaten Teluk Bintuni, 1.735.850.000)
- 5) Pembangunan Pagar tanda batas tanah perkantoran Bupati sp3 manimeri 1.658 Ha dari luasan 1.075 x 1.075 M)
- 6) Pembangunan Kawasan Pendidikan terintegrasi di areal 23 Ha
- 7) Pengembangan Wisata Mangrove di Kampung Masina (Pelabuhan, rumah panggung untuk kuliner, ruang pertemuan dan panggung untuk hiburan.
- 8) Menuntaskan conectivitas di wilayah pegunungan (Mostim – Mosut)
- 9) Menuntaskan conektivitas di wilayah pesisir (Yakora – Aranday), (Km14 – Taroy), (Babo - Kasira lama – Yaru – (Yaru - Aroba – Tofoi - Saengga – Onar)
- 10) Pembangunan beberapa jembatan di ruas saengga menuju ke kampung onar
- 11) Pembangunan Pelabuhan ASDP di Sumuri dan Aranday
- 12) Pembangunan beberapa Jembatan di sepanjang jalan arteri sp1 ke kota (ada 3 titik)
- 13) Pelebaran jalan depan kehutanan lama
- 14) Pembangunan satu sisi jembatan kali tubi
- 15) Penuntasan Pembangunan Rumah Sebyar (456 Unit/77 Unit)
- 16) Pembangunan jaringan air bersih (sambungan rumah (SR) dari reservoir tanah merah
- 17) Penuntasan jembatan Mogoi - Merdey
- 18) Pembangunan Poliklinik di Perkantoran Bupati
- 19) Perpanjangan runway bandara babo (200 Meter)
- 20) Pembangunan fasilitas sisi darat Pelabuhan Babo (ruang tunggu)

- 21) Support Rencana pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Bintuni
- 22) Pembangunan Pusat Perkemahan di Rajawalli (23 Ha)
- 23) Pembangunan Sarana dan Prasana Diklat Pemda TB lokasi (exs lokasi DPRD/Kilo 9)
- 24) Pelaksanaan Diklat Prajabatan/Laksar bagi CPNS formasi 2018
- 25) Pembangunan Tugu Pemekaran Kabupaten Teluk Bintuni (diatas tanah pemerintah daerah, diatas tanah rest area 8 Ha)
- 26) Pembukaan lahan pertanian/pembangunan jalan pertanian di sp5
- 27) Kelanjutan pembangunan ruas arteri sp5 – sp3 (dua jalur)

Non Fisik :

- 1) Penuntasan RTRW Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2041
- 2) Penuntasan RPJMD 2022 - 2026
- 3) Pengentasan Kemiksinan Ekstrim (2021 – 2024)
- 4) Implementasi Renaksi KDH Pengembangan SDM (2021-2024)
- 5) Masalah kelistrikan Yanah Merah – Saengga dan tuntaskan tunggakan 1,9 M
- 6) BPJS Kesehatan
- 7) Hibah PKK, PMI, KPA, MUI, KLASIS dll
- 8) Alokasi anggaran untuk Hibah STIH dll
- 9) Kerjasama dengan STIKIP Manokwari dan UNIMUDA Sorong
- 10) Persiapan untuk pembangunan Politeknik melalui Kerjasama dengan Politeknik Kemenperin (diploma 1)
- 11) Penuntasan Masalah Perumahan Sebyar 32,4 M
- 12) Penyelesaian Dok Amdal POD I Blok Kasuri
- 13) Penyelesaian Masalah di Petroweriagar
- 14) Percepatan Pembangunan Kawasan Industri teluk Bintuni
- 15) Penyelesaian masalah tenaga Honor Pendidikan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini dipaparkan rencana kegiatan semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2024 berdasarkan Urusan kemudian Program dan Keegiatannya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan berdasarkan Urusan tersebut seperti nampak pada tabel 5.1. berikut di bawah ini:

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2024

Terlampir

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Mengacu pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan yang dijadikan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9
	Indikator Makro:						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi*)	1,48	1,9	2,32	2,74	3,16	3,58
2	Laju Inflasi*)	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2	1 s/d 2
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,1	65,65	66,416	67,182	67,949	68,715
4	Gini Ratio	0,385	0,380	0,375	0,365	0,355	0,345
5	Persentase tingkat Kemiskinan	29,29	28,00	27,57	27,00	26,59	26,00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,52	7,69	6,855	6,025	5,645	5,265
	Indikator Tujuan dan Sasaran						
1	Indeks Pendidikan (HLS)	12,31	12,35	12,41	12,47	12,48	12,49
	• Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan (Orang)	2610	2735	2810	2890	2940	3020
	• Persentase cakupan Pemanfaatan Kebudayaan local (%)	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	28,55
	• Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan (%)	48	48	48	48	48	48
2	Indeks Kesehatan (AHH)	60,85	60,87	60,89	61,00	61,02	61,04
	• Jumlah kematian Ibu	15	14	13	12	11	10
	• Jumlah Kematian Bayi	10	9	8	7	6	5
	• Angka Stunting (%)	28	27	26	24	22	20
	• Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi (%)	70,73	78,00	83,33	90,47	95,23	100
	• Angka kelahiran total/TFR	12 jiwa / 1000	12 jiwa / 1000	12 jiwa / 1000	12 jiwa / 1000	12 jiwa / 1000	12 jiwa / 1000
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	29,29	28,00	27,57	27,00	26,59	26,00
	• Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,19	86,20	86,22	86,25	86,27	86,29
	• Partisipasi angkatan kerja perempuan	10.800	+50 org				

No	Indikator Kinerja	TARGET CA PAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	• Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak terselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100
	• Indikator Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
	• Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	61,00	61,90	65,00	65,50	67,00	69,00
5	Indeks Infrastruktur Daerah	cukup	cukup	baik	baik	baik	baik
	• Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	17,83	18,05	18,80	19,10	19,45	20,50
	• Persentase kampung yang telah mendapat layanan air bersih (%)	70	70	70	75	75	80
	• Persentase drainase kota dengan kondisi baik (%)	95,40	96,53	97,10	97,50	98,20	98,35
	• Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (km)	85,50	88,90	95	100	110	120
	• Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan (%)	100	100	100	100	100	100
	• Persentase kawasan kumuh (%)	5,73	5,50	5,00	4,70	4,50	4,00
	• Rasio elektrifikasi (%)	77	77	78	78	79	79
	• Cakupan aksesibilitas antar wilayah (%)	91,67	91,67	95,83	95,83	95,83	95,83
6	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	3,50	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80
	Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pertanian (Ton)						
	• Padi	527,10	790,65	1.185,98	1.660,37	2.158,47	2.806,02
	• Jagung	87,96	105,55	126,66	151,99	182,39	218,87
	• Kacang Tanah	52,93	63,52	76,22	91,47	109,76	131,71
	• Ubi Kayu	763,50	916,20	1.099,44	1.319,33	1.583,19	1.899,83
	• Ubi Jalar	498,12	597,74	717,29	860,75	1.032,90	1.239,48
	• Talas/Keladi	417,84	501,41	601,69	722,03	866,43	1.039,72
	• Pala	9,97	11,97	14,36	17,23	20,68	24,81
	Peningkatan Populasi Komoditas Ternak (Ekor)						

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	• Sapi	3.535,20	4.242,24	5.090,96	6.108,83	7.330,59	8.796,71
	• Kambing	840,40	924,44	1.016,88	1.118,57	1.230,43	1.353,47
	• Babi	6.053,30	6.658,63	7.324,49	8.056,94	8.862,64	9.748,90
	• Ayam kampung	165.318,00	198.381,60	218.219,76	240.041,74	264.045,91	290.450,50
	• Ayam Petelur	13.530	14.883,00	16.371,30	18.008,43	19.809,27	21.790,20
	• Penguatan Cadangan Makanan (ton)	24	24	24	25	25	25
	• Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	47,99	48,03	48,16	48,32	48,38	48,39
	• Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	3,50	4,86	6,26	7,71	9,21	10,76
7	Pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan Tersier (%)	1,5	2	2,5	2,8	2,9	3
	• Pertumbuhan omzet koperasi (%)	1	1	1	1	1	1
	• Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,55
	• Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB (%)	45	46	48	48,3	48,5	49
	• Pembangunan Sarana Pariwisata	2	6	6	6	6	6
8	Nilai IDM	0,6491	0,6527	0,6563	0,6599	0,6635	0,6671
	• Persentase desa/kampung mandiri dan maju didasarkan dari IDM	2,82	4,52	6,21	7,91	9,60	11,30
9	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah (%)	0,3	0,6	1	1,5	2	2,5
	• Nilai Investasi PMDN	10,7	10,8	10,9	11,1	11,3	11,6
10	Indeks kualitas lingkungan hidup	88,17	89,00	89,05	89,10	89,15	89,20
	• Indeks air	52,60	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10
	• Indeks Udara	87,23	87,33	87,43	87,53	87,63	87,73
	• IKL	34,49	36,97	39,45	41,93	44,41	46,89
	• Persentase RTH (%)	30	30	30	30	30	30
11	Indeks Reformasi Birokrasi (level)	2	2	2	2	3	3
	• Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	• Nilai SAKIP	56,05	60	61,5	62	64	65,5

No	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	• Indeks Kepuasan Masyarakat administrasi kependudukan	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
	• Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	• Tingkat Maturitas SPIP	2	2	2	2	3	3
	• Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	• Indeks Inovasi Daerah	6,80	15	27	32	35	39
	• Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan (%)	0	100	100	100	100	100
	• Indeks Profesionalitas ASN (%)	55	60	65	70	75	80
	• Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	kurang	cukup	cukup	baik	baik	baik
	• Tingkat Pengendalian dan Penanganan Kasus SARA (%)	100	100	100	100	100	100
12	Tindak lanjut Wasdin (Kominda) (%)	100	100	100	100	100	100
	• Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda (%)	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Risiko Bencana	166,8	166,0	165,5	165,5	165,5	165,5
	• Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.	Ekonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian						
1.1.	Pertumbuhan PDRB	1,48	1,9	2,32	2,74	3,16	3,58
1.2.	PDRB Per Kapita	19.572.157,69	20.026.386,33	20.491.825,59	20.968.752,49	21.457.451,34	21.958.213,51
	Kesejahteraan Sosial						
1.	Angka Melek Huruf	99,84	99,86	99,87	99,88	99,89	99,90
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	PENDIDIKAN						
1.1	APM SD	93,70	94,00	94,50	95,10	95,00	96,00
1.2	APM SMP	69,90	70,05	71,50	72,50	73,50	74,50
1.3	Kurikulum bermuatan lokal tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Persentase Peningkatan Guru bersertifikat	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1.5	Cakupan pengendalian izin penyelenggaraan pendidikan kewenangan kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Cakupan pengembangan bahasa dan sastra lokal yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN						

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR ENERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	Cakupan Fasilitas Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)	0,48	1,6	1,4	1,5	1,4	1,522
2.2	Cakupan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah	82%	86%	88%	89%	87%	87%
2.3	Tingkat ketersediaan sistem informasi kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Persentase Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Cakupan pelayanan RSUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Persentase peningkatan Nakes yang terlatih	15%	15%	15%	15%	15%	15%
2.7	Persentase Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	41,67%	53,33%	63,33%	73,33%	80,00%	86,67%
2.8	Persentase Rencana dan Kebutuhan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM	40%	41%	42,5%	44,5%	88,0%	47,50%
2.9	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi mutu dan kompetensi	75%	77%	80%	84%	88,0%	90%
2.10	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	62,5%		75%	81%	89%	95%
2.11	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Farmasi, Alkes, dan Sertifikasi Keamanan Makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Cakupan penyediaan Farmasi, Alkes dan Alat Makan Minum Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang bersertifikat P-IRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15	Cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	50	50	50	50	50

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang bersertifikat Laik Higiene Sanitasi	0	50	50	50	50	50
2.17	Cakupan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Berstiker Pembinaan	0	50	50	50	50	50
2.18	Persentase Pemeriksaan Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti	15	90	17	28	28	28
2.19	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20	Tingkat partisipasi kesehatan masyarakat skala kampung	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2.21	Cakupan promosi kesehatan tingkat kampung	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2.22	Cakupan kelompok kesehatan masyarakat yang dibina	80%	83%	85%	88%	90%	95%
2.23	Persentase Unmet need (kebutuhan KB yang belum terpenuhi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
3.1	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder (<1000Ha) kondisi baik	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.2	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	4%	4%	4%	4%	4%	4%
3.3	Cakupan infrastruktur drainase kota	2,168 km	2,168 km	2,168 km	2,168 km	2,168 km	2,168 km
3.4	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	31,28 km	31,28 km	31,28 km	31,28 km	31,28 km	31,28 km
3.5	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman kondisi baik	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3.6	Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan yang teratur	3%	3%	3%	3%	3%	3%
3.7	Ketaatan terhadap RTRW dan Luas Wilayah Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR ENERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.8	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3.9	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	1 permukiman	1 permukiman	1 permukiman	1 permukiman	1 permukiman	1 permukiman
3.10	Persentase Penurunan kawasan kumuh	2%	2%	2%	2%	2%	2%
3.11	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.12	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.13	Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani di kawasan kumuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.14	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.15	Cakupan Perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.1	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	3%	3%	3%	3%	3%	3%
5	KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman ketertiban di wilayah distrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Persentase pembinaan wawasan kehangsaan dan ketahanan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL						
6.1	Cakupan pemberdayaan PSKS	5%	5%	5%	5%	5%	5%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR MNERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.2	Cakupan rehabilitasisosial	5%	5%	5%	5%	5%	5%
6.3	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Pelayanan Kepahlawanan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Penanganan Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	KETENAGAKERJAAN						
1.1	Cakupan Perencanaan Ketenaga Kerjaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5	Persentase Lahan Yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Persentase Peningkatan warga translok yang memiliki sertifikat pelatihan keterampilan	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1.7	Cakupan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.1	Data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Persentase Lembaga PUG yang dibentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Organisasi Masyarakat di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2.4	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibangun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR MNERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.5	Persentase kasus perlindungan perempuan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat kampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas keluarga yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Persentase Lembaga PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Persentase kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PANGAN						
3.1	Cakupan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3.3	Persentase Kampung Rawan Pangan teratasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERTANAHAN						
4.1	Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Prosentase capaian permohonan penetapan tanah ulayat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PROSENTASIPENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
5.1	Prosentase capaian penetapan permohonan pendaftaran tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	LINGKUNGAN HIDUP						

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.1	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Cakupan Penyediaan Dokumen Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (KLHS)	1 Paket Dokumen KLHS-RP/MD	0	0	0	0	1 Paket Dokumen KLHS-RP/MD
6.3	Cakupan Pengendalian Limbah B3	n/a	4 Distrik	4 Distrik	4 Distrik	4 Distrik	4 Distrik
6.4	Cakupan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan dan Perlindungan	0	0	2 kali	0	0	2 Kali
6.5	Cakupan Kader Lingkungan Hidup	0	0	0	0	7 suku	0
6.6	Persentase Aduan yang ditindaklanjuti	0	2 Kampung Persiapan Kp. Iklim, penilaian kebersihan lingkungan (kampung / Sekolah)	Pendampingan persiapan 2 Kampung Persiapan Kp. Iklim, Penilaian Kebersihan Kampung / Sekolah	Penilaian Kebersihan Kampung / Sekolah	Penilaian Kebersihan Kampung / Sekolah	Penilaian Kebersihan Kampung / Sekolah
6.7	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan
6.8	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	0 KM	5 KM	9 KM	13 KM	17 KM	21 KM
7	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
7.1	Cakupan Layanan Penerbitan E-KTP dan Akta Kelahiran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	Persentase Layanan Penerbitan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.3	Persentase Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.4	Cakupan ketersediaan Profil Kependudukan tingkat distrik	0	100%	100%	100%	100%	100%
8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
8.1	Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa	0	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR MNERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.2	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	0	100%	100%	100%	100%	100%
8.3	Persentase Peningkatan tingkat tertib administrasi pemerintahan kampung	5%	5%	5%	5%	5%	5%
8.4	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang dibina	7 Suku	7 Suku	7 Suku	7 Suku	7 Suku	7 Suku
8.5	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.6	Persentase Peningkatan pemerintahan kampung yang dibina	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
9	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
9.1	Cakupan Pembinaan Pelayanan KB	0%	100%	100%	100%	100%	100%
9.2	Persentase Peningkatan cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKR, BKR, BKL)	0%	5%	5%	5%	5%	5%
10	PERHUBUNGAN						
10.1	Persentase Peningkatan Fasilitas Layanan Angkutan Darat umum	0	5%	5%	5%	5%	5%
10.2	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0%	100%	100%	100%	100%	100%
10.3	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
11	Persentase Peningkatan Indeks Kategori PPID	0	10%	10%	10%	10%	10%
11.1	Cakupan Peningkatan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	0	10%	10%	10%	10%	10%
12	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
12.1	Cakupan Usaha Simpan Pinjam yang Legal	0	100%	100%	100%	100%	100%
12.2	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.3	Cakupan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.4	Persentase Peningkatan SDM Koperasi terlatih	5%	5%	5%	5%	5%	5%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR MNERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12.5	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.6	Persentase Peningkatan Cakupan Pemberdayaan UMKM	5%	5%	5%	5%	5%	5%
13	PENANAMAN MODAL						
13.1	Persentase Investor yang diberikan insentif	0	100%	100%	100%	100%	100%
13.2	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	0	100%	100%	100%	100%	100%
14	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
14.1	Persentase Pemuda terlatih bidang wirausaha	10%	10%	10%	10%	10%	10%
14.2	Tingkat partisipasi kontingen teluk bintuni pada even nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	STATISTIK						
15.1	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%
16	PERSANDIAN						
16.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	100%	100%	100%	100%	100%
17	KEBUDAYAAN						
17.1	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	10,50%	12%	15%	18%	20%	25%
17.2	Persentase pembinaan group kesenian dalam daerah Kabupaten	0	10%	10%	10%	10%	10%
17.3	Cakupan Pembinaan Sejarah	0	100%	100%	100%	100%	100%
17.4	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	100%	100%	100%	100%	100%
17.5	Cakupan Pengelolaan Permuseuman	0	100%	100%	100%	100%	100%
18	PERPUSTAKAAN						
18.1	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	n/a	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR ENERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.2	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.3	persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan	n/a	2%	3%	4%	5%	6%
18.4	Persentase kegiatan pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah yang dilaksanakan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
19	KEARSIPAN						
19.1	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	0	17%	33%	50%	67%	83%
19.2	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
19.3	Tingkat Ketersediaan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	n/a	16,67%	33,3%	50,0%	66,7%	83,3%
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.1	Persentase Peningkatan Kelompok Nelayan yang dibina	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1.2	Persentase Peningkatan Kelompok Pembudidaya ikan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2	PARIWISATA						
2.1	Persentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	1%	2%	3%	4%	5%	6%
2.2	Cakupan Promosi Pemasaran Pariwisata	0	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Persentase Cakupan Fasilitasi Pengembangan HAKI Ekonomi Kreatif	0	2%	2%	2%	2%	2%
2.4	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	5%	5%	5%	5%	5%
3	PERTANIAN						
3.1	Persentase kelompok tani yang dimonitor dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Persentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (IUT, embung, RPH, dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR MNERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.3	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0	100%	100%	100%	100%	100%
3.5	Persentase layanan perizinan usaha pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Cakupan Kelompok Tani yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERDAGANGAN						
4.1	Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PERINDUSTRIAN						
5.1	Cakupan Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Cakupan Pelayanan Sistem Informasi Industri Nasional	0	100%	100%	100%	100%	100%
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	SEKRETARIAT DAERAH						
1.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	n/a	2,8	2,9	3	3,1	3,2
1.2	Persentase koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian dan pembangunan	0	100%	100%	100%	100%	100%
2	SEKRETARIAT DPRD						
2.1	Persentase pelaksanaan dukungan kinerja DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
3.1	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR NERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3	Cakupan Pengawasan Ormas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.5	Persentase konflik sosial terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN						
1.1	Persentase Peningkatan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	7%	7%	7%	7%	7%	10%
1.2	Persentase Peningkatan Cakupan sinkronisasi program kegiatan perangkat daerah Lingkup Koordinasi Bidang ESDA/TRIW/PPM	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2	KEUANGAN						
2.1	Tingkat tertib penyusunan anggaran daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Tingkat tertib administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Tingkat ketercapaian target pendapatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
3.1	Peningkatan Persentase SDM aparatur yang memiliki standar kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.2	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
4.1	Persentase hasil penelitian yang telah diimplementasikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
5	LINSUR PENGAWASAN						
5.1	Tingkat pengawasan pelaksanaan SPIP perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Setiap Tahun					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.2	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	55	60	60	60	60
6	UNSUR KEWILAYAHAN						
6.1	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat distrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Cakupan koordinasi pemberdayaan kampung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah distrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.4	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Persentase pemerintahan kampung yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	PUNGGI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
7.1	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat distrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Teluk Bintuni ini merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2024 dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman kepada rencana kerja pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD tahun 2024 ini menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah, kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan kewilayahan serta kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Startegis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat: kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2024.

Selanjutnya RKPD ini sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2024.